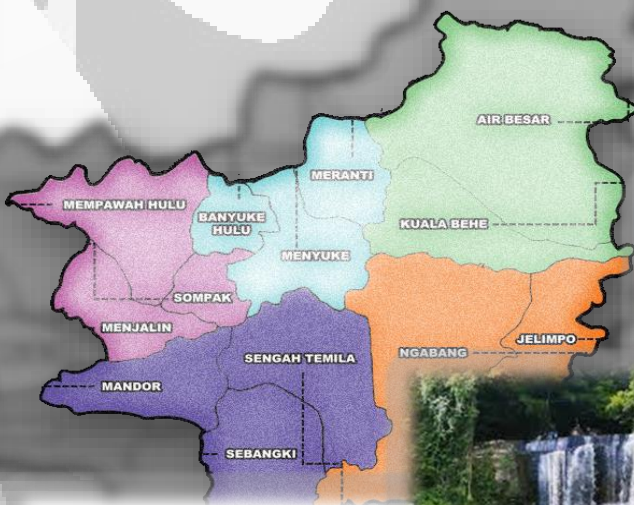




**Peraturan Bupati Landak Nomor 12  
Tahun 2024**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD)  
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025**



**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Landak Yang Maju, Mandiri,  
dan Berdaya Saing melalui penguatan fundamental ekonomi dan  
peningkatan daya saing**





BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi/Lembaga Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Urusan Daerah, Kecamatan dan Desa.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah lembaga yang bertanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Landak.
8. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Landak untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Landak untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### POKOK-POKOK PENYUSUNAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Sistematika RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan
  - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - g. BAB VIII Penutup
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
  - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
  - b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
  - c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
  - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (4) RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - b. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

### BAB III

#### PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

##### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025:

- a. Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai arahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. PD menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan DPRD.

### BAB IV

#### PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

##### Pasal 5

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA yang berisikan uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi kegiatan untuk pengusulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

##### Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Tahun 2025 hasil pembahasan bersama DPRD dengan PD Tahun 2025.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, maka Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2024 hasil pembahasan dengan DPRD tahun 2023.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 12



Salinan sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT DAERAH BAGIAN HUKUM,

PARAKNUARTI, SH  
LANDAK  
19661128199402 2 001



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	6
1.4. Maksud dan Tujuan .....	7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	8
BAB II .....	10
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	10
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	10
2.1. 1. Aspek Geografi dan Demografi.....	10
2.1. 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2.1. 3. Aspek Pelayanan Umum .....	32
2.1.3. A. Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	32
2.1.3. B. Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	46
2.1.3. C. Layanan Urusan Pilihan.....	70
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2023 dan Realisasi RPD 2023-2026.....	80
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	120
BAB III.....	146
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	146
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	146
<b>3.1. 1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Landak.....</b>	<b>146</b>
<b>3.1. 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025</b>	<b>150</b>
<b>3.1. 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025.....</b>	<b>159</b>
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	161
BAB IV .....	166
<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>166</b>
4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	166
4. 2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	172
4.2. 1. Telaahan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.....	172
4.2. 2. Tema, Sasaran, dan Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dalam Rancangan RKP Tahun 2025 .....	174



4.2. 3.	Penetapan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Landak 176	
4. 3.	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKP 2025 .....	184
4. 4.	Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Kabupaten Landak dengan Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 .....	230
<b>BAB V</b>	.....	<b>231</b>
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b>	.....	<b>231</b>
<b>BAB VI</b>	.....	<b>363</b>
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	.....	<b>363</b>
<b>BAB VII</b>	.....	<b>381</b>
<b>P E N U T U P</b>	.....	<b>381</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Landak.....	10
Tabel 2. 2 Luas Kemiringan Lereng (Ha) di Kabupaten Landak .....	12
Tabel 2. 3 Persentase Kemiringan Lereng Kabupaten Landak.....	12
Tabel 2. 4 Struktur Geologi di Kabupaten Landak.....	13
Tabel 2. 5 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Landak.....	15
Tabel 2. 6 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Landak Tahun 2022 .....	16
Tabel 2. 7 Kondisi Demografi Kabupaten Landak Tahun 2023 .....	18
Tabel 2. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Landak.....	19
Tabel 2. 9 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak (miliar rupiah), 2019-2023.....	20
Tabel 2. 10 PDRB ADHK-2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak (miliar rupiah), 2019-2023.....	21
Tabel 2. 11 PDRB ADHB Kabupaten Landak Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah), Tahun 2019-2023.....	22
Tabel 2. 12 PDRB ADHK-2010 Kabupaten Landak Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah), Tahun 2019-2023 .....	22
Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2023 .....	26
Tabel 2. 14 Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Landak, Tahun 2019-2023.....	27
Tabel 2. 15 Perkembangan IPM Kabupaten Landak dan Indikatornya Tahun 2019 – 2023.....	29
Tabel 2. 16 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Landak Tahun 2019 – 2023.....	29
Tabel 2. 17 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Landak Tahun 2018-2022 .....	29
Tabel 2. 18 Angka Harapan Hidup Kabupaten Landak dan Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 .....	30
Tabel 2. 19 Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023.....	30
Tabel 2. 20 Jumlah Kesenian di Kabupaten Landak.....	31
Tabel 2. 21 APK dan APM Kabupaten Landak Tahun 2021-2023 .....	32
Tabel 2. 22 Angka Putus Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 .....	33
Tabel 2. 23 Angka Kelulusan Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023.....	33
Tabel 2. 24 Angka Melanjutkan Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 .....	33
Tabel 2. 25 Rasio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 .....	34
Tabel 2. 26 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023.....	38
Tabel 2. 27 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023 .....	38
Tabel 2. 28 Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (m) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023 .....	39
Tabel 2. 29 Rekapitulasi Data Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Landak Tahun 2016-2021 .....	40
Tabel 2. 30 Indikator Rumah Layak Huni Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 .....	43
Tabel 2. 31 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 .....	47
Tabel 2. 32 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Landak Tahun 2018-2023.....	48
Tabel 2. 33 Indikator Perkara yang Berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 .....	49
Tabel 2. 34 Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023.....	50
Tabel 2. 35 Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 .....	52
Tabel 2. 36 Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 .....	54
Tabel 2. 37 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 .....	55
Tabel 2. 38 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Landak.....	55



Tabel 2. 39 Indikator Pertumbuhan Penduduk Desa di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023	56
Tabel 2. 40 Indikator Pehubungan Kabupaten Landak Tahun 2018-2023	57
Tabel 2. 41 Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2020-2023	58
Tabel 2. 42 Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 (Unit)	60
Tabel 2. 43 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2023 (Unit)	61
Tabel 2. 44 Perkembangan UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023	62
Tabel 2. 45 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023	62
Tabel 2. 46 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Landak (Miliar Rp) Tahun 2019-2023	63
Tabel 2. 47 Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Landak Tahun 2018-2023	64
Tabel 2. 48 Indikator Statistik di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023	65
Tabel 2. 49 Indikator Persandian di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023	66
Tabel 2. 50 Indikator Kebudayaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023	67
Tabel 2. 51 Indikator Perpustakaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023	67
Tabel 2. 52 Indikator Kearsipan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023	69
Tabel 2. 53 Indikator Perikanan Kabupaten Landak Tahun 2018-2023	71
Tabel 2. 54 Indikator Pariwisata di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023	71
Tabel 2. 55 Objek Wisata Alam di Kabupaten Landak	72
Tabel 2. 56 Objek Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Landak	74
Tabel 2. 57 Indikator Pertanian di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023	74
Tabel 2. 58 Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023	75
Tabel 2. 59 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2019-2023	76
Tabel 2. 60 Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2018-2023	77
Tabel 2. 61 Cakupan Bina Kelompok Pedagang di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023	78
Tabel 2. 62 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023	78
Tabel 2. 63 Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2019-2023	79
Tabel 2. 64 Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Landak, Tahun 2019-2023	79
Tabel 2. 65 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023	80
Tabel 2. 66 Iklim Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023	82
Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak (persen) 2018-2023	148
Tabel 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Landak	148
Tabel 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Landak (miliar rupiah), 2018-2022	149
Tabel 3. 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak, 2018-2023	153
Tabel 3. 5 Pertumbuhan dan Kontribusi Kabupaten Landak terhadap Provinsi Kalimantan Barat	156
Tabel 3. 6 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2025	159
Tabel 3. 7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak	162
Tabel 3. 8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Landak	163
Tabel 3. 9 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Landak	164



Tabel 4. 1 Tujuan RPD Kabupaten Landak.....	166
Tabel 4. 3 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2025.....	179
Tabel 4. 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 .....	180
Tabel 4. 5 Keselarasan Antara 12 (Dua Belas) Prioritas Pembangunan Daerah .....	184
Tabel 4. 6 Program Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan dan Target Tahun 2025 Kabupaten Landak yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional yang Tertuang dalam RKP.....	186
Tabel 5. 1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Landak.....	232
Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Landak Tahun 2025.....	363
Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	364



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD .....	2
Gambar 1. 2 Keterhubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan .....	7
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Landak.....	11
Gambar 2. 2 Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Landak (juta rupiah), Tahun 2019-2023.....	23
Gambar 2. 4 Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Landak, Tahun 2016-2020 (Persen)....	24
Gambar 2. 5 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019-2023 .....	25
Gambar 2. 6 Dinamika Kemiskinan Kabupaten Landak .....	26
Gambar 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 .....	28
Gambar 2. 8 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Landak Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2023 .....	28
Gambar 2. 9 Perbandingan APK dan APM Kabupaten Landak Tahun 2023 .....	32
Gambar 2. 10 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023.....	36
Gambar 2. 11 Angka Kematian Balita di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023.....	36
Gambar 2. 12 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 .....	37
Gambar 2. 13 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 .....	37
Gambar 2. 14 Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 .....	41
Gambar 2. 15 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Landak Tahun 2018-2022 .....	42
Gambar 2. 16 Rasio Satpol PP (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023.....	44
Gambar 2. 17 Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 .....	44
Gambar 2. 18 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 .....	45
Gambar 2. 19 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Landak Tahun 2020-2022.....	46
Gambar 2. 20 Rasio KDRT di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 .....	49
Gambar 2. 21 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor di Kabupaten Landak Tahun 2023 .....	63
Gambar 2. 22 Pertumbuhan Kegiatan Industri di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 .....	80
Gambar 3. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak.....	147
Gambar 4. 1 Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 .....	175
Gambar 4. 2 Prioritas Nasional.....	176
Gambar 4. 3 Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan (2023-2026).....	178



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyiratkan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 selain berpedoman pada RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, juga pada RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional bila dialokasikan di wilayah Kabupaten Landak.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 adalah tahun ke - 3 (tiga) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026. Tahapan yang dilalui meliputi: 1) Persiapan Penyusunan, 2), Penyusunan Rancangan Awal, 3). Penyusunan Rancangan, 4). Pelaksanaan Musrenbang RKPD, 5). Perumusan Rancangan Akhir dan 6). Penetapan.

Pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan diatas, menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/ kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 menerapkan pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan pendekatan atas bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan politis tidak diterapkan sebab digunakan pada saat penyusunan RPJMD.

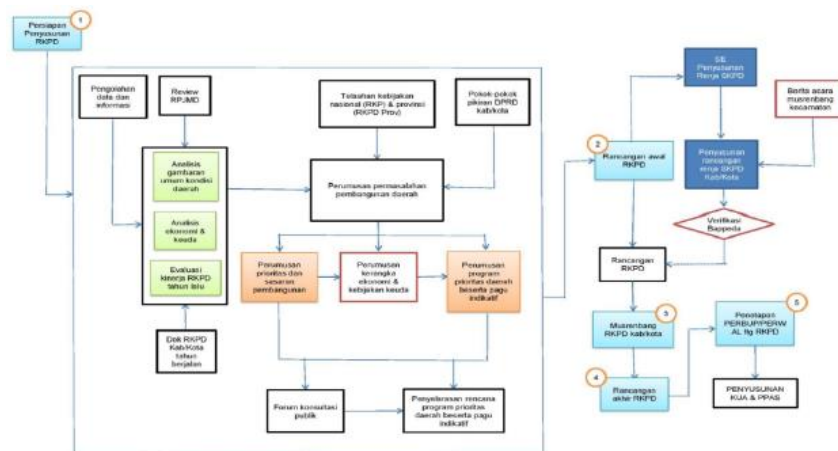


Melengkapi proses diatas, substansi penyusunan RKPD Tahun 2025 menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
  1. *Pendekatan Holistik-Tematik*; dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
  2. *Pendekatan Integratif*; dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
  3. *Pendekatan Spasial*; dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- b. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.
- c. Berbasis pada *e-planning*.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 tentu saja memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan 2024. Dengan demikian, perencanaan Tahun 2025 yang dirumuskan berpijak pada kondisi riil yang ada dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan menjawab tantangan dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang ada.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan RKPD. Selanjutnya, RKPD Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.



Gambar 1. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Landak berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
  18. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rancangan Pembangunan;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  25. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor XXX);**
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
  28. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
  29. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 20);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);



31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 772);
36. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 5);
37. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

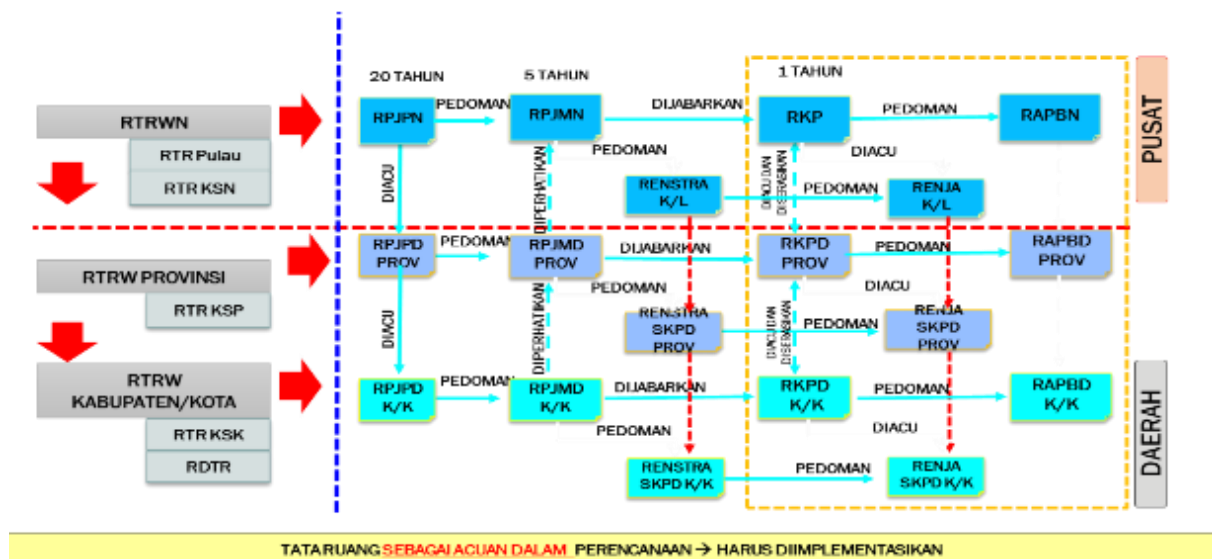
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, RKPD disusun berpedoman pada RPJMD/RPD, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini RKPD Kabupaten Landak Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD/RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, Pencapaian RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2025. Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025. Lebih lanjut, pada Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



dinyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyalarsan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Dokumen RKPD memiliki nilai strategis sebab menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Selanjutnya, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran keterhubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber : Diolah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

**Gambar 1. 2 Keterhubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan**

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Landak pada tahun 20254, guna mewujudkan sasaran-sasaran RPD 2023-2026.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Landak.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Landak



Tahun 2025.

3. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang juga meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Landak Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

#### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat kondisi geografi dan demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beberapa tahun terakhir, dan permasalahan pembangunan. Selain itu disajikan pula evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu sampai dengan tahun berjalan.

#### **Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

#### **Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan, serta kaitannya dengan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, dan identifikasi isu strategis pembangunan daerah tahun depan.

#### **Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disertai dengan target capaian kinerja dan pagu anggaran Tahun 2025 serta perencanaan prakiraan maju Tahun 2026.



## **Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini menyajikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD/RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026.

## **Bab VII Penutup**

Bab ini memuat hal-hal yang dipandang penting dan perlu dilakukan untuk terlaksananya perencanaan pembangunan Tahun 2025.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

##### 2.1. 1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1. A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif, Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober dan Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran/pecahan dari Kabupaten Mempawah, sejak tahun 1999 dan beribukota di Ngabang, Kabupaten Landak terdiri atas 13 kecamatan dan 156 desa serta 713 dusun. Kabupaten Landak memiliki potensi yang memadai dalam mendukung upaya meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan serta ketertiban masyarakat, di antaranya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi letak geografis yang apabila didayagunakan secara optimal akan memiliki nilai tambah yang sangat diperlukan sebagai sumber daya pembangunan.

Luas wilayah Kabupaten Landak adalah 9.909,10 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Sengah Temila merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu sebesar 1.963 km<sup>2</sup> kemudian Kecamatan Air Besar dengan luas wilayah 1.361,20 km<sup>2</sup> serta Kecamatan Ngabang 1.148 km<sup>2</sup>. Adapun kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Sompak yang merupakan pecahan Kecamatan Mempawah Hulu dengan luas 219,76 km<sup>2</sup>. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Landak dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Landak**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km <sup>2</sup> )
1.	Sebangki	Sebangki	885,60
2.	Ngabang	Ngabang	1.148,10
3.	Jelimpo	Jelimpo	848,80
4.	Sengah Temila	Pahauman	1963,00
5.	Mandor	Mandor	455,10
6.	Menjalin	Menjalin	322,90
7.	Mempawah Hulu	Karangan	496,34
8.	Sompak	Sompak	219,76
9.	Menyuke	Darit	594,16

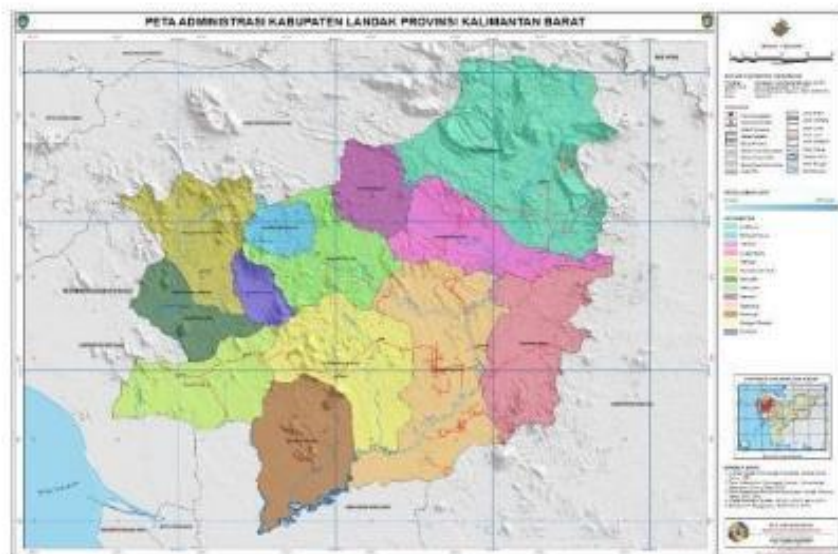


No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km <sup>2</sup> )
10.	Banyuke Hulu	Untang	273,80
11.	Meranti	Meranti	372,34
12.	Kuala Behe	Kuala Behe	968,00
13.	Air Besar	Serimbu	1.361,20
Kabupaten Landak			9.909,10

Sumber: Kabupaten Landak dalam Angka 2024

## 2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Landak terbentang pada 0°0' 55" Lintang Utara sampai dengan 0°37'41" Lintang Selatan dan 109°12' 44" Bujur Timur sampai dengan 110°15' 56,56" Bujur Timur. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Landak berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau.



Sumber: Kabupaten Landak dalam Angka, 2023

**Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Landak**

## 3) Topografi

Kabupaten Landak termasuk dalam wilayah Dataran Rendah Pegunungan Barat. Bagian Utara berbukit-bukit, ke selatan merupakan daerah lembah atau dataran yang memudahkan melakukan kegiatan sosial ekonomi. Dua sub wilayah yang termasuk dalam dataran rendah Pegunungan Barat yakni Sub Wilayah Pegunungan Niut ( $\pm 800 \text{ km}^2$ ), yang meliputi wilayah Kecamatan Air Besar sebelah utara dan sub wilayah Pegunungan Bawang ( $\pm 770 \text{ km}^2$ ) meliputi wilayah Kecamatan Mempawah Hulu dan Menyuke. Kabupaten Landak berdasarkan pembagian kelas kemiringan lahan, mencirikan daerah tersebut berada pada kelas kemiringan berbukit 15-25 dengan persentase 53,04 dengan luas 447.190,75 Ha.



**Tabel 2. 2 Luas Kemiringan Lereng (Ha) di Kabupaten Landak**

Kecamatan	Kelas Lereng					Total
	0-8	8-15	15-25	25-40	>40	
Air Besar	9.448,50	5.128,27	37.859,26	40.466,74	62.763,39	155.666,16
Banyuke Hulu	1.122,81		12.199,40		11.312,06	24.634,27
Jelimpo	3.010,27		32.433,62	346,45	25.273,20	61.063,55
Kuala Behe	5.726,58		29.095,34		18.533,30	53.355,22
Mandor	20.850,62		38.676,50		4.268,54	63.795,66
Mempawah Hulu	4.609,70		28.191,28		27.185,29	59.986,27
Menjalin	9.285,83		22.698,42		4.600,86	36.585,10
Menyuke	-		39.704,69		9.168,73	48.873,43
Meranti	673,46		10.608,89		26.367,73	37.650,08
Ngabang	28.766,78		105.380,66	335,31	9.041,87	143.524,62
Sebangki	32.274,48		19.697,60		3.912,37	55.884,44
Sengah Temila	6.734,63		61.541,05		16.677,59	84.953,27
Sompak	2.567,93		9.104,04		5.427,02	17.099,00
Total	125.071,59	5.128,27	447.190,75	41.148,50	224.531,94	843.071,06

Sumber: Peta Kemiringan Lereng

**Tabel 2. 3 Persentase Kemiringan Lereng Kabupaten Landak**

Kecamatan	Kelas Lereng					Total
	0-8	8-15	15-25	25-40	>40	
Air Besar	1,12	0,61	4,49	4,80	7,44	18,46
Banyuke Hulu	0,13	0,00	1,45	0,00	1,34	2,92
Jelimpo	0,36	0,00	3,85	0,04	3,00	7,24
Kuala Behe	0,68	0,00	3,45	0,00	2,20	6,33
Mandor	2,47	0,00	4,59	0,00	0,51	7,57
Mempawah Hulu	0,55	0,00	3,34	0,00	3,22	7,12
Menjalin	1,10	0,00	2,69	0,00	0,55	4,34
Menyuke	0,00	0,00	4,71	0,00	1,09	5,80
Meranti	0,08	0,00	1,26	0,00	3,13	4,47
Ngabang	3,41	0,00	12,50	0,04	1,07	17,02
Sebangki	3,68	0,00	2,34	0,00	0,46	6,63
Sengah Temila	0,80	0,00	7,30	0,00	1,98	10,08
Sompak	0,30	0,00	1,08	0,00	0,64	2,03
Total	14,69	0,61	53,04	4,88	26,63	100,00

Sumber: Peta Kemiringan Lereng

Pada kawasan dengan kelerengan 0-8, 8-15, dan 15-25, wilayah tersebut cenderung lebih cocok untuk pembangunan permukiman, pertanian, serta infrastruktur seperti jalan raya dan permukiman penduduk. Tingkat kelerengan yang rendah memudahkan aksesibilitas dan memungkinkan pengembangan infrastruktur dengan lebih baik. Sementara itu, wilayah dengan kelerengan 25-40 memerlukan perencanaan yang lebih hati-hati. Pembangunan di kawasan ini harus



mempertimbangkan mitigasi risiko tanah longsor dan erosi. Penggunaan lahan yang tepat seperti pertanian terasering dapat membantu mengatasi tantangan ini. Kawasan dengan kelerengan lebih dari 40 adalah wilayah yang sangat terjal dan perlu perencanaan yang sangat matang. Pembangunan di wilayah ini harus memperhitungkan risiko yang tinggi terkait erosi dan tanah longsor.

#### 4) Geologi

Berdasarkan peta topografi skala 1:250.000 seri AMS, morfologi Kabupaten Landak umumnya merupakan pegunungan bergelombang hingga tinggi dengan puncak-puncak pegunungan hingga lebih dari 1000 m di atas permukaan air laut, terutama ada di bagian utara, sedangkan di bagian selatan, terutama di sekitar kota Ngabang ke arah selatan memperlihatkan morfologi dataran setempat yang berawarawa dengan ketinggian 50 m di atas permukaan air laut.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Landak antara lain podsolik merah kuning (batuan endapan), terbentuk dari bahan induk endapan, terdapat di Kecamatan Sengah Temila, Mempawah Hulu, Ngabang, Menyuke, Air Besar, dan Kuala Behe, podsolik merah kuning (batuan beku dan endapan), terbentuk dari bahan induk batuan beku, banyak dijumpai di Kecamatan Mempawah Hulu, Mandor, Menjalin, dan Ngabang, podsol (batuan endapan), sebagian besar terdapat di Kecamatan Mandor dan Menjalin, latosol terdapat di bagian utara Kecamatan Menyuke yang terbentuk dari fisiografi vulkan yang berasal dari bahan induk batuan beku, warna tanahnya coklat kehitaman, terdrainase baik dan umumnya berstruktur halus di lapisan atas dan sedang di lapisan bawah, organosol dan glei humus (bahan aluvial), jenis tanah ini mempunyai karakteristik yang tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dan bahan ketebalan minimum 50 cm serta mengandung paling sedikit 30% dari bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir, kepadatan tanahnya kurang dari 0,6 dan selalu jenuh air, mudah mengerut dan tak balik, bila kering peka erosi dan mudah terbakar. Tanah jenis ini terdapat di Kecamatan Mandor, Menjalin, Sebangki, dan sebagian Sengah Temila. Terdapat beberapa formasi geologi yang tersebar di wilayah Kabupaten Landak yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2. 4 Struktur Geologi di Kabupaten Landak**

No.	Kecamatan	Jenis Batuan	Km2	%
1.	Mempawah Hulu	Intrusif dan Plutonik Asam	345,25	3,48
		Plistosen – Pliosen	255,71	2,58
		Intrusif dan Plutonik Basa	60,38	0,61



No.	Kecamatan	Jenis Batuan	Km2	%
2.	Sengah Temila	Kwarter	75,03	0,76
		Intrusif dan Plutonik Asam	1.049,22	10,59
		Kapur	45,28	0,46
		Intrusif dan Plutonik Basa	120,14	1,21
3.	Banyuke Hulu	Intrusif dan Plutonik Asam	259,64	2,62
4.	Menyuke	Intrusif dan Plutonik Asam	282,83	2,85
		Kapur	103,33	1,04
		Plistosen - Pliosen	99,2	1
		Intrusif dan Plutonik Basa	168,4	1,7
		Paleozoik	26,15	0,26
5.	Sompak	Intrusif dan Plutonik Asam	299,61	3,02
		Intrusif dan Plutonik Basa	5,11	0,05
6.	Menjalin	Kwarter	35,6	0,36
		Intrusif dan Plutonik Asam	57,45	0,58
		Kapur	11,04	0,11
		Plistosen - Pliosen	177,39	1,79
7.	Air Besar	Intrusif dan Plutonik Asam	34,45	0,35
		Kapur	387,02	3,91
		Plistosen - Pliosen	618,55	6,24
		Premo Karbon Trias Atas	14,43	0,15
		Intrusif dan Plutonik Basa	590,24	5,96
		Intrusif dan Plutonik Basa Menengah	134,89	1,36
8.	Jelimpo	Kwarter	4,12	0,04
		Intrusif dan Plutonik Asam	534,63	5,4
		Kapur	306,36	3,09
		Premo Karbon Trias Atas	13,74	0,14
		Intrusif dan Plutonik Basa	17,08	0,17
		Intrusif dan Plutonik Basa Menengah	15,13	0,15
9.	Meranti	Intrusif dan Plutonik Asam	2,41	0,02

Sumber : Profil Umum Kabupaten Landak, 2016

## 5) Hidrologi

Di Kabupaten Landak pada umumnya tekstur dan struktur tanah sangat menunjang untuk air lebih mudah dan cepat dapat diserap tanaman. Di samping itu, di wilayah ini banyak sungai kecil maupun besar sehingga akan membantu dalam kegiatan pertanian dan perikanan. Wilayah Kabupaten Landak termasuk ke dalam DAS Landak di mana Sungai Landak merupakan sungai terbesar yang ada di wilayah Kabupaten Landak. Sungai lain yang cukup besar adalah Sungai Menyuke, Sungai Mempawah, dan Sungai Mandor. Sungai Landak berperan penting bagi desa-desa yang berada di pinggir sungai tersebut, karena digunakan masyarakat sebagai air untuk mandi, cuci, makan dan minum, sumber penangkapan ikan, dan prasarana angkutan khusus. Sungai Landak sangat efektif sebagai prasarana transportasi yang menghubungkan Kota Pontianak dengan daerah Kabupaten Landak. Sungai Landak yang merupakan sungai utama, lebarnya rata-rata 60 meter dengan kedalaman rata-



rata 4 meter. Pola aliran dari sungai-sungai tersebut merupakan pola dendritik yang dicirikan dengan aliran menyebar.

Sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Landak merupakan sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun, karena itu perlu diamati debit aliran sungainya. Pengamatan yang dilakukan terhadap debit aliran sungai merupakan debit sesaat. Fluktuasi debit yang terjadi akan selalu berubah dan akan dipengaruhi oleh keadaan iklim, sifat fisik DAS dan penutupan lahan. Pada keadaan sifat fisik DAS dan penutupan lahan yang tetap, maka fluktuasi debit sungai terutama dipengaruhi oleh variasi curah hujan. Tindakan manusia berupa kegiatan-kegiatan perkebunan yang merubah pola penutupan lahan akan mempengaruhi fluktuasi debit. Berdasarkan sebaran kelas lereng dan sebaran penutupan lahan dapat diperkirakan koefisien aliran dan debit puncak, sedangkan padatan tersuspensi (TSS) berpengaruh terhadap besarnya kandungan sedimen.

Sungai Landak merupakan potensi air terjun, karena debit air yang sangat besar dengan kecepatan 0,71 meter/detik maka dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik mikro hidro. Air terjun Melanggar ini memiliki ketinggian 25 meter dan berada di bagian hulu Kota Ngabang. Kabupaten Landak juga memiliki sumber mata air yang terdapat di daerah Gunung Seha atau kawasan Wisata Gunung Seha dalam Wilayah Kecamatan Sengah Temila, terdapat sejumlah saluran air minum bersumber dari mata air.

## 6) Klimatologi

Data tersebut menggambarkan pola curah hujan, jumlah hari hujan, dan rata-rata penyinaran matahari di wilayah terkait selama setahun penuh. Bulan-bulan tertentu memiliki curah hujan yang signifikan, seperti pada bulan Agustus dengan curah hujan tertinggi, diikuti oleh bulan September. Selain itu, bulan Juni juga memiliki curah hujan yang tinggi sekitar 351,9 mm. Sebaliknya, bulan Maret memiliki curah hujan terendah yaitu 72,7 mm.

**Tabel 2. 5 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Landak**

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-rata Penyinaran Matahari
Januari	102,4	18	4,7
Februari	134,5	22	5,3
Maret	72,7	20	6,4
April	328,4	24	5,7
Mei	206,8	25	5,8
Juni	351,9	30	4,6
Juli	159,9	21	5,4



Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-rata Penyinaran Matahari
Agustus	446,6	25	5,1
September	294,8	24	4
Oktober	411,2	29	3,7
November	244,4	25	4,2
Desember	287	26	4,3

## 7) Penggunaan Lahan

Secara keseluruhan, luas total wilayah Kabupaten Landak adalah sekitar 843.071,06 Ha. Terlihat bahwa mayoritas lahan di wilayah ini digunakan untuk pertanian, khususnya pertanian lahan kering campur yang mencakup sekitar 58,50 dari total wilayah. Selain itu, perkebunan juga mendominasi dengan persentase sekitar 20,29, memainkan peran penting dalam pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan juga mencakup area hutan, baik hutan lahan kering primer maupun sekunder, serta hutan rawa sekunder dan belukar rawa yang memiliki sumbangan sekitar 11,06 dari total wilayah. Kawasan permukiman dan tanah terbuka mencakup persentase yang lebih kecil dalam penggunaan lahan, masing-masing sekitar 0,28 dan 0,58.

Selain itu, terdapat penggunaan lahan lain seperti sawah, tambak, dan pertambangan yang juga berkontribusi pada komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Landak. Namun, perlu dicatat bahwa luas tambak memiliki persentase yang sangat kecil yaitu 0,00, menunjukkan bahwa tambak belum menjadi fokus utama penggunaan lahan di wilayah ini. Data ini memberikan gambaran tentang pola penggunaan lahan di Kabupaten Landak, yang penting untuk pengelolaan dan perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

**Tabel 2. 6 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Landak Tahun 2022**

Kecamatan	Total	Persentase
Hutan Lahan Kering Primer	32.997,53	3,91
Hutan Lahan Kering Sekunder	48.019,61	5,70
Hutan Tanaman	2.785,80	0,33
Belukar	17.337,00	2,06
Perkebunan	171.074,74	20,29
Permukiman	2.344,02	0,28
Tanah Terbuka	4.849,75	0,58
Badan Air	1.567,78	0,19
Hutan Rawa Sekunder	22.357,18	2,65
Belukar Rawa	12.125,51	1,44
Pertanian Lahan Kering	2.089,40	0,25
Pertanian Lahan Kering Campur	493.227,77	58,50
Sawah	21.571,02	2,56
Tambak	16,71	0,00



Kecamatan	Total	Persentase
Pertambangan	10.707,22	1,27
Total	843.071,06	100,00

Sumber: Peta Penutupan Lahan, KLHK, Tahun 2022

### 2.1.1. B. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang dihasilkan, sebagai balas jasa seluruh kegiatan ekonomi.

Naik turunnya angka PDRB bisa juga disebut laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Landak atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 12.775,76 miliar di tahun 2022 menjadi Rp. 13.684,30 miliar di tahun 2023. Sementara, PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) meningkat dari Rp. 7.652,66 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp. 7.988,20 miliar pada tahun 2023, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah 4,39%. Dilihat dari distribusi persentase PDRB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar 36,57% dalam pembentukan PDRB. Keadaan ini tidak berbeda dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 sektor Pertanian menyumbang 35,78%. Hal ini berarti pada dua tahun terakhir peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB masih dominan. Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Landak adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 14,01% dan sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 11,38% pada pembentukan PDRB Kabupaten Landak tahun 2022.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu didukung dengan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan menumbuhkembangkan potensi sektor ekonomi unggulan daerah. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang memiliki daya ungkit (leverage) bagi pengembangan ekonomi wilayah.

Kabupaten Landak memiliki berbagai komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sub sektor perkebunan



berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan kopi, sedangkan komoditi utama dari sektor kehutanan berupa kayu bulat dan kayu belian. Sektor pertanian yang diusahakan berupa padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Potensi lainnya adalah di sektor peternakan (sapi, kambing, babi, dan unggas berupa itik dan ayam), dan sektor pertambangan (zirkon, emas, tembaga, batu pecah dan lain-lain). Selain potensi sumber daya alam daerah, Kabupaten Landak juga memiliki potensi di sektor pariwisata, baik wisata budaya, wisata alam, dan wisata bahari. Terdapat sekitar 30 objek wisata di Kabupaten Landak, yang terdiri dari 23 objek wisata alam (sebagian besar merupakan objek wisata air terjun) dan 7 objek wisata sejarah dan budaya, yang diantara objek wisatanya yang dikenal masyarakat luas adalah Makan Juang Mandor dan Rumah Betang Saham.

### 2.1.1. C. Demografi

Berdasarkan hasil himpunan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Landak, jumlah penduduk Kabupaten Landak tahun 2023 sebanyak 413.588 jiwa yang terdiri dari 216.214 laki-laki dan 197.374 jiwa perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 7 Kondisi Demografi Kabupaten Landak Tahun 2023**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sebangki	10.427	9.787	20.214
2	Ngabang	42.860	40.014	82.874
3	Jelimpo	15.391	14.045	29.436
4	Sengah Temila	34.590	31.522	66.112
5	Mandor	17.709	16.844	34.553
6	Menjalin	11.656	10.921	22.577
7	Mempawah Hulu	22.207	19.703	41.910
8	Sompak	8.681	7.795	16.476
9	Manyuke	16.469	14.734	31.203
10	Banyuke Hulu	7.437	6.590	14.027
11	Meranti	5.792	5.118	10.910
12	Kuala Behe	9.230	8.221	17.451
13	Air Besar	13.765	12.080	25.845
Total		216.214	197.374	413.588

Sumber: BPS Kabupaten Landak, 2023

Pada tabel dibawah ini, digambarkan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Landak. Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam periode 2022-2023 adalah Kecamatan Ngabang dengan laju pertumbuhan sebesar 3,39%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Air Besar sebesar 1,02 persen. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Landak untuk periode 2022-2023 adalah 1,7%.



**Tabel 2. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Landak**

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2022-2023 (%)
1	Sebangki	20.214	1,48
2	Ngabang	82.874	3,39
3	Jelimpo	29.436	2,09
4	Sengah Temila	66.112	1,77
5	Mandor	34.553	1,52
6	Menjalin	22.577	1,48
7	Mempawah Hulu	41.910	2,31
8	Sompak	16.476	1,47
9	Manyuke	31.203	1,47
10	Banyuke Hulu	14.027	1,06
11	Meranti	10.910	1,32
12	Kuala Behe	17.451	2,31
13	Air Besar	25.845	1,02

Sumber: BPS Kabupaten Landak, 2023

Penduduk di Kabupaten Landak terdistribusi di berbagai kecamatan, dengan angka populasi yang beragam. Kecamatan Ngabang memiliki jumlah penduduk tertinggi sekitar 82.874 ribu orang, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang signifikan sebesar 3,39% selama periode 2022-2023. Disusul oleh Sengah Temila dengan jumlah penduduk sekitar 66.112 ribu orang dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,77%, serta Jelimpo dengan jumlah penduduk sekitar 29.436 ribu orang dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,09%.

## 2.1. 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pembangunan terhadap masyarakat pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

### 2.1.2.A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dicermati dan diukur dari Perkembangan PDRB, Pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, Laju Inflasi, dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini).

#### 1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan



PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan yakni atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Adapun unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

#### A. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan yakni Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK-2010). Adapun unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha. PDRD ADHB dan ADHK dapat menjadi tolak ukur untuk melihat kondisi ekonomi di Kabupaten Landak. Distribusi lapangan usaha dalam PDRB ADHB dapat digunakan sebagai penilaian dalam pergeseran dan struktur perekonomian suatu daerah. Sedangkan distribusi lapangan usahan dalam PDRB ADHK dapat digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.

**Tabel 2. 9 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak (miliar rupiah), 2019-2023**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.717,95	3.840,66	4.247,15	4.700,21	5.094,21
B	Pertambangan dan Penggalian	253,20	263,43	287,23	289,81	282,98
C	Industri Pengolahan	1.187,36	1.195,79	1.321,50	1.441,83	1.450,40
D	Pengadaan Listrik	0,99	1,15	1,19	1,26	1,46
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,51	1,60	1,74	1,86	2,06
F	Konstruksi	1.044,02	1.066,93	1.154,33	1.223,55	1.283,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.572,53	1.556,52	1.627,05	1.902,87	2.062,93
H	Transportasi	220,77	227,10	217,91	277,25	326,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288,59	246,57	264,82	290,12	314,39
J	Informasi dan Komunikasi	322,37	351,96	381,70	402,78	433,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	258,11	255,40	274,70	294,76	306,78
L	Real Estat	343,06	346,17	355,21	361,68	390,95
M,N	Jasa Perusahaan	53,34	50,74	50,75	57,56	63,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	776,65	825,78	830,24	880,34	940,59
P	Jasa Pendidikan	260,80	246,10	261,62	277,49	302,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	176,88	204,86	280,98	307,43	352,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	71,56	58,43	56,03	64,95	76,69
PDRB		10.549,69	10.739,19	11.614,15	12.775,75	13.684,3

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

#### B. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)



**Tabel 2. 10 PDRB ADHK-2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak (miliar rupiah), 2019-2023**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.604,73	2.644,46	2.775,45	2.851,18	2.892,20
B	Pertambangan dan Penggalian	148,17	149,10	156,82	156,78	151,59
C	Industri Pengolahan	845,98	837,31	885,50	915,37	940,4
D	Pengadaan Listrik	0,60	0,67	0,68	7,09	0,82
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,13	1,18	1.251,60	1.332,60	1,42
F	Konstruksi	580,76	566,45	596,96	602,05	630,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.087,21	1.039,08	1.078,23	1.211,80	1.299,40
H	Transportasi	140,91	131,55	122,15	145,10	153,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	189,27	156,06	165,30	180,98	195,16
J	Informasi dan Komunikasi	215,46	232,69	251,63	265,14	286,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	188,73	187,88	194,53	198,12	208,48
L	Real Estat	221,59	224,29	233,62	234,36	257,85
M,N	Jasa Perusahaan	32,67	31,44	31,63	35,33	38,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	432,97	441,87	436,95	441,02	468,5
P	Jasa Pendidikan	175,81	166,29	174,71	185,21	200,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,82	123,91	166,06	181,17	207,08
R,S,T,U	Jasa Lainnya	46,37	40,79	41,13	46,65	54,49
PDRB		7.022,18	6.975,02	8.562,95	8.989,95	7.988,20

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

Nilai PDRB ADHK-2010 Kabupaten Landak tahun 2023 sebesar Rp. 7.988,20 Miliar, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang besarnya mencapai Rp. 1.001,75 Miliar. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Landak bersifat fluktuatif, dimana terjadi penurunan nilai pada tahun 2020 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak berkontraksi sebesar - 0.47%. Penurunan kembali terjadi di tahun 2023, namun tidak menyebabkan kontraksi



yang signifikan. Adapun kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

### C. PDRB Sisi Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor, dan (7) impor.

**Tabel 2. 11 PDRB ADHB Kabupaten Landak Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah), Tahun 2019-2023**

Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	5.967,80	6.000,59	6.223,35	6.752,61	7.371,99
Konsumsi LNPRT	137,83	136,00	143,20	162,28	191,22
Konsumsi Pemerintah	1.596,49	1.601,97	1.672,05	1.757,86	1.964,10
PMTB	2.720,26	2.668,73	2.781,76	3.069,67	3.526,92
Perubahan Inventori	494,61	627,61	659,58	790,54	1.149,11
Net Ekspor Barang dan Jasa	-370,09	-295,72	134,23	242,81	-519,03
Total	10.546,90	10.739,18	11.614,17	12.775,77	13.684,30

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

**Tabel 2. 12 PDRB ADHK-2010 Kabupaten Landak Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah), Tahun 2019-2023**

Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	4.041,74	4.036,16	4.123,61	4.293,70	4.533,03
Konsumsi LNPRT	123,75	121,27	125,88	131,01	143,08
Konsumsi Pemerintah	1.043,69	1.027,85	1.038,57	1.044,17	1.063,50
PMTB	1.709,49	1.694,09	1.725,79	1.810,79	1.951,85
Perubahan Inventori	171,46	76,75	227,79	248,12	323,5
Net Ekspor Barang dan Jasa	-68,12	15,93	71,02	124,55	-26,77
Total	7.022,01	6.972,05	7.312,66	7.652,35	7.988,20

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

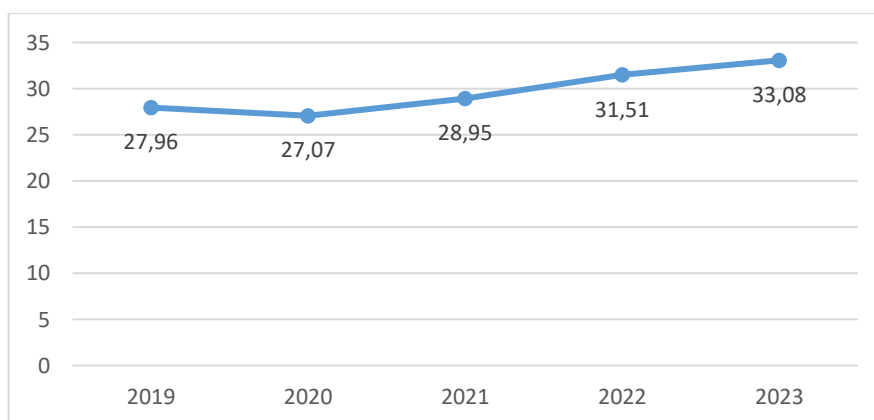
Nilai PDRB ADHB Kabupaten Landak selama lima tahun terakhir didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu rata-rata sekitar 54,44% dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Sementara kontribusi konsumsi pemerintah rata-rata sekitar 14,48% dan cenderung meningkat. Sedangkan kontribusi investasi swasta (PMTB) rata-rata sekitar 24,88% dan cenderung fluktuatif. Kecenderungan ketidakstabilan kontribusi investasi swasta ini harus jadi perhatian dalam merancang pembangunan



ekonomi Kabupaten Landak ke depan. Sementara nilai PDRB ADHK-2010 di Kabupaten Landak menurut pengeluaran selama periode tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar Rp 7.022,01 Miliar dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 12,10% menjadi Rp 7.988,20 Miliar. Namun, pengeluaran dari net ekspor cenderung fluktuatif dan bernilai negatif baik nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK-2010. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor di Kabupaten Landak tidak dapat menghasilkan barang dan jasa yang cukup menjual di pasar internasional.

#### D. PDRB Per Kapita

Nilai pada PDRB per Kapita dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Selama 5 periode tahun yaitu tahun 2019-2023, PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020.

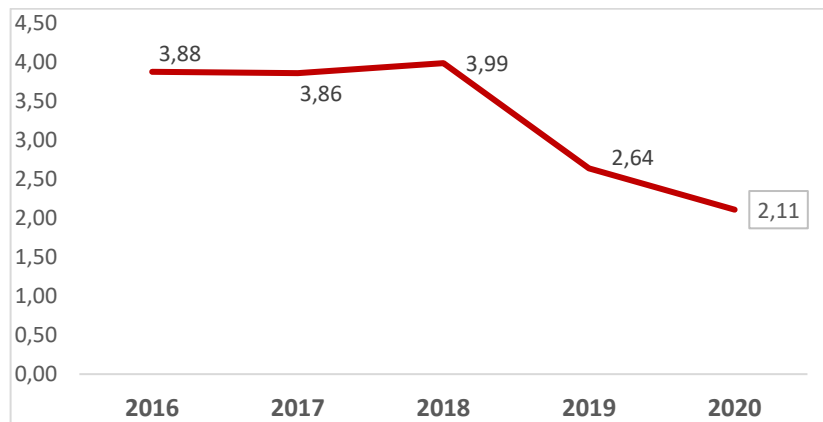


Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

**Gambar 2. 2 Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Landak (juta rupiah), Tahun 2019-2023**

#### 2) Laju Inflasi Kabupaten

Inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah maka harga barang dan jasa akan semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah semakin stabil. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Landak sejak tahun 2016 hingga hingga tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



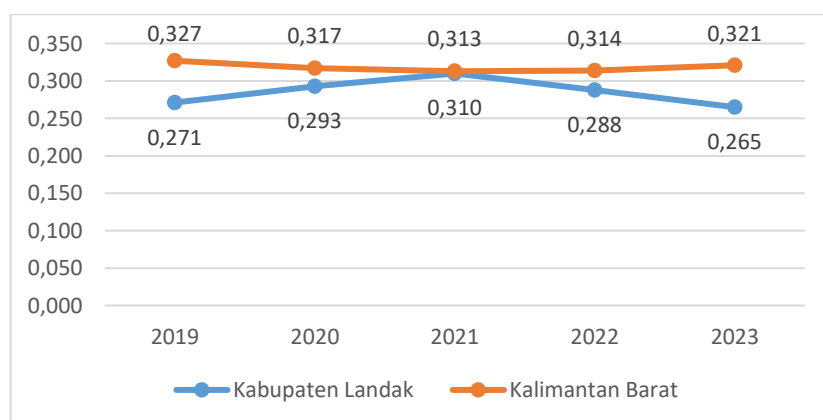
Sumber: Bappeda Kab. Landak (Sub Bidang Data dan Informasi), Tahun 2022

**Gambar 2. 3 Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Landak, Tahun 2016-2020 (Persen)**

Selama periode tahun 2016-2020 tingkat inflasi Kabupaten Landak relatif terkendali dan rendah yaitu kurang dari 4% setiap tahunnya. Tingkat inflasi ini sudah sejalan dengan asumsi makro APBN yang menargetkan inflasi maksimum 3 persen +/- 1 persen. Dengan kata lain, kondisi perekonomian terutama daya beli masyarakat Landak terus membaik dan stabil.

### 3) Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1, artinya jika Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan pendapatan secara sempurna demikian pula sebaliknya jika Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketimpangan pendapatan yang sempurna di masyarakat. Dengan demikian semakin Indeks Gini mendekati nilai 0 maka kondisi pemerataan pendapatan semakin baik. Sampai dengan tahun 2023 nilai Indeks Gini Kabupaten Landak tercatat sebesar 0,265 dan mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian tersebut maka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Landak tergolong cukup baik atau kondisi pemerataan pendapatannya semakin membaik.



Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2024



## **Gambar 2. 4 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019-2023**

Berdasarkan gambar di atas secara umum Indeks Gini Kabupaten Landak pada tahun 2019-2023 lebih baik dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat. Mengacu pada Indeks Gini Kalimantan Barat yang dipublikasi BPS pada Februari 2023, maka dapat diketahui bahwa Indeks Gini di daerah perkotaan per September 2022 tercatat sebesar 0,337 dan untuk daerah perdesaan tercatat 0,268. Dengan demikian diasumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Landak bercirikan perdesaan yang menempatkan Kabupaten Landak pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

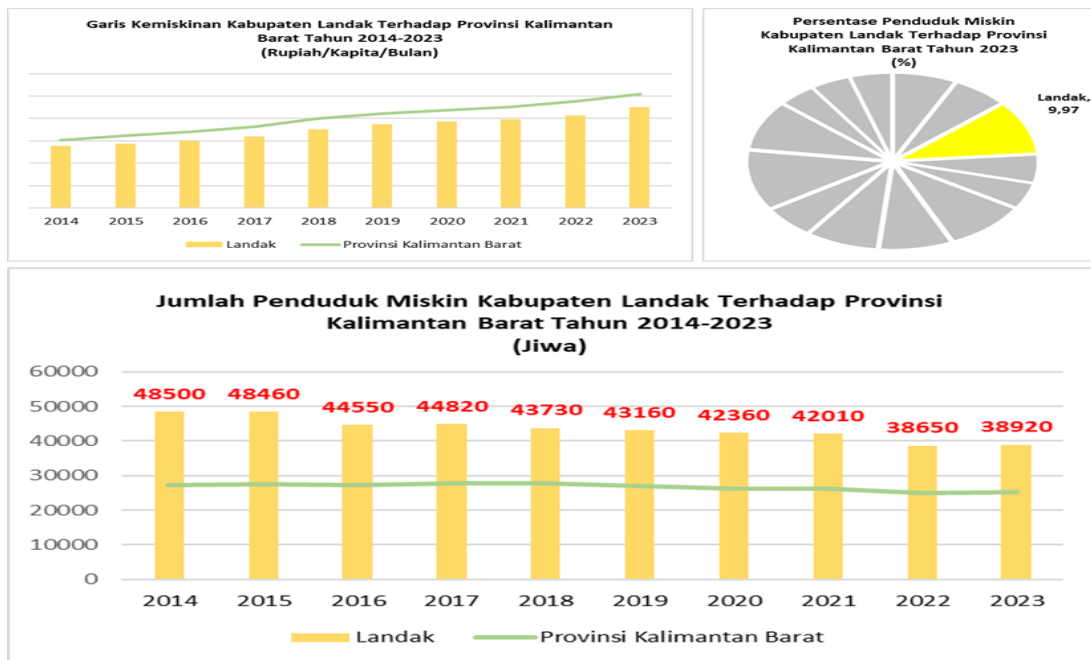
### **2.1.2.B. Kesejahteraan Sosial**

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain meliputi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja. Indikator ini mengalami perubahan pada setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah kebijakan pemerintah

#### **1) Kemiskinan**

##### **A. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Kemiskinan di Kabupaten Landak diukur menggunakan data kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2014-2023. Berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, Kabupaten Landak cenderung mengalami peningkatan standar garis kemiskinan namun posisinya tetap berada dibawah rata-rata garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Landak berada pada nilai Rp 415.681 per-Kapita/bulan selisih sebesar Rp 56.186,1 dengan Provinsi Kalimantan Barat yang berada pada nilai Rp 507.867 per-Kapita/bulan.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

**Gambar 2. 5 Dinamika Kemiskinan Kabupaten Landak**

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Landak terhadap Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 9,97%. Sementara itu, persentase penduduk miskin rata-rata di Provinsi Kalimantan Barat adalah 7,03%. Hal tersebut menempatkan Kabupaten Landak sebagai kabupaten dengan proporsi penduduk miskin tertinggi kedua setelah Kabupaten Melawi. Kendatipun demikian, tren jumlah penduduk miskin di Kabupaten Landak dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir relatif menurun. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Landak berjumlah 48.500 jiwa dan berkurang hingga 9.580 jiwa di tahun 2023 menjadi 38.920 jiwa. Perhatikan tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2023**

No	Kabupaten/ Kota	Kemiskinan Kab/Kota									
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sambas	49,30	49,29	44,88	45,42	45,48	43,84	41,41	41,49	37,65	38,71
2	Bengkayang	16,90	16,49	18,04	18,48	17,94	17,69	17,11	16,92	15,97	16,87
3	Landak	48,50	48,46	44,55	44,82	43,73	43,16	42,36	42,01	38,65	38,92
4	Mempawah	15,00	13,88	14,61	15,30	14,61	14,02	13,18	13,82	14,30	14,15
5	Sanggau	19,70	20,26	20,27	20,62	21,59	21,41	21,16	21,70	21,74	23,34
6	Ketapang	54,20	55,39	53,07	54,28	54,86	53,84	53,45	53,04	49,92	49,95
7	Sintang	35,70	36,83	40,36	41,46	42,65	40,30	39,19	39,40	36,76	35,49
8	Kapuas Hulu	24,30	23,74	24,49	23,96	24,76	25,22	23,93	24,03	23,43	22,59
9	Sekadau	12,10	12,56	11,97	12,74	12,29	12,28	11,92	12,69	11,91	12,09
10	Melawi	24,00	24,56	25,05	25,28	26,24	25,71	25,34	25,47	24,57	24,18
11	Kayong Utara	9,90	10,41	10,89	10,75	11,13	11,21	10,90	10,72	10,52	10,77
12	Kubu Raya	29,50	28,38	27,83	29,53	28,86	27,37	25,90	25,47	24,39	25,33
13	Kota Pontianak	30,90	31,56	34,13	33,18	31,76	31,46	30,70	30,11	29,61	29,92



No	Kabupaten/ Kota	Kemiskinan Kab/Kota									
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	Kota Singkawang	12,00	11,90	11,21	11,61	11,17	10,90	10,23	11,03	10,82	11,06
Kalimantan Barat		382,00	383,71	381,35	387,43	387,07	378,41	366,78	367,90	350,24	353,37
Rata-rata Provinsi		27,29	27,41	27,24	27,67	27,65	27,03	26,20	26,28	25,02	25,24

Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi Kalimantan Barat, diakses Maret 2024

Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun. IKK (P1) menurun dari 1,82 (2018) menjadi 1,32 (2023) dan IKK (P2) turun dari 0,46 (2018) menjadi 0,27 (2023). Makna dari penurunan ini menggambarkan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Landak belum masuk pada kategori parah (melarat).

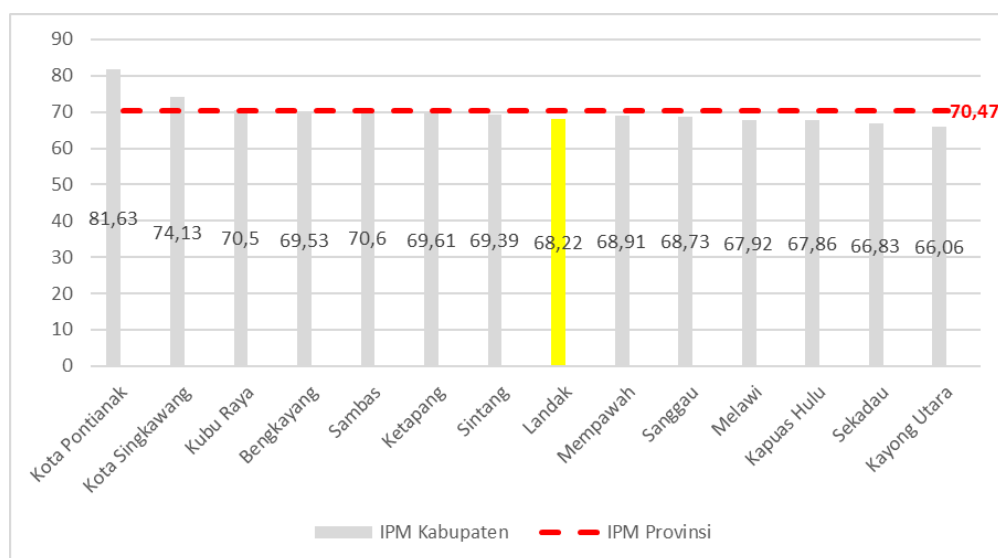
**Tabel 2. 14 Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Landak, Tahun 2019-2023**

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)</b>	374.117	385.314	395.486	414.536,-	415.681,-
<b>Jumlah Penduduk Miskin (000)</b>	43,160	42,360	42,010	38,65	38,92
<b>Perentase Penduduk Miskin</b>	11,47	11,12	10,99	10,01	9,97
<b>Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>	1,71	1,54	1,29	1,40	1,32
<b>Indek Keparahan Kemiskinan (P2)</b>	0,38	0,38	0,26	0,36	0,46

Sumber: BPS Kabupaten Landak, Tahun 2023

## 2) Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil data yang dihimpun melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak termasuk Kabupaten yang memiliki nilai IPM dibawah provinsi.

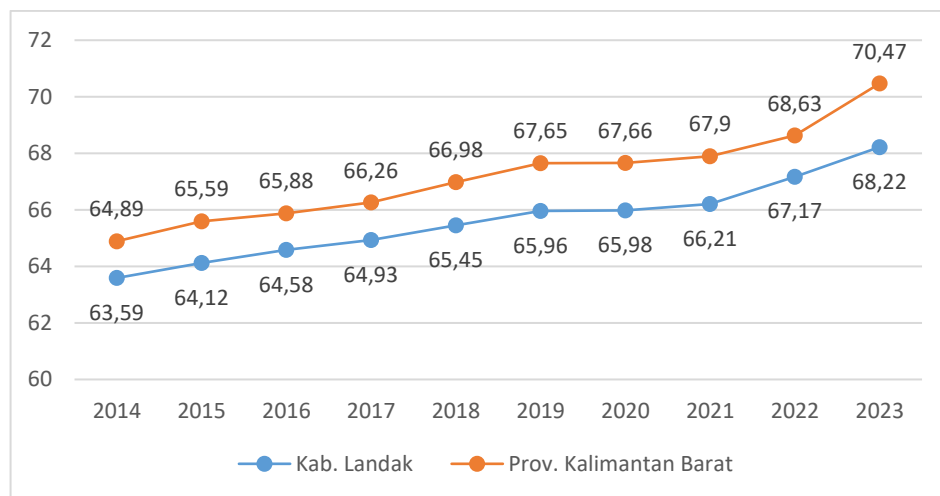


Sumber: Hasil Olahan Data BPS, 2024



**Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023**

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai IPM rata-rata di Kabupaten Landak masih berada dibawah nilai rata-rata IPM provinsi. Nilai rata-rata IPM Kabupaten Landak dalam kurun waktu 2014-2023 berada diangka 65,62 atau selisih 1,57 poin dengan nialai rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat. Perhatikan grafik berikut.



Sumber: Hasil Olahan Data BPS, 2024

**Gambar 2. 7 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Landak Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2023**

Pada grafik tersebut Kabupaten Landak memiliki selisih IPM paling rendah dengan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,30 poin. Terjadi pelebaran selisih IPM antara Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 hingga 2021 sebesar 1,53 hingga 1,69 dan mengalami penurunan selisih di tahun 2022 sebesar 1,46. Namun pada tahun 2023, menjadi puncak tertinggi selisih IPM antara Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 2,25. Meskipun belum dapat mencapai nilai rata-rata IPM di Provinsi Kalimantan Barat, IPM Kabupaten Landak mengalami peningkatan yang konsisten selama 10 tahun terakhir.

Komponen penyusun IPM di Kabupaten Landak yang menyebabkan gap terhadap IPM Provinsi Kalimantan Barat adalah angka melek huruf, pendapat riil perkapita yang cenderung stagnan hingga rata-rata lama sekolah yang relatif menurun. Sehingga, diperlukan perumusan kebijakan sektor pendidikan yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik serta akses menuju lokasi sarana pendidikan. Komponen lainnya, rendahnya peningkatan riil perkapita menunjukkan kebutuhan akan kebijakan afirmatif dan komprehensif terkait dengan ketenagakerjaan dan industri. Berikutnya komponen penyusun IPM Kabupaten Landak;



**Tabel 2. 15 Perkembangan IPM Kabupaten Landak dan Indikatornya Tahun 2019 – 2023**

Indikator IPM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,70	72,84	73,04	73,39	73,77
Rata2 Lama Sekolah (tahun)	7,10	7,11	7,12	7,15	7,24
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,39	12,40	12,43	12,44	12,53
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	7.403	7.357	7.431	7.969	8.423
IPM Kabupaten Landak	65,96	65,98	66,21	67,17	68,22
IPM Propinsi Kalimantan Barat	67,65	67,66	67,90	68,63	70,47

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2024

### 3) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Indikator ini berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

**Tabel 2. 16 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Landak Tahun 2019 – 2023**

Daerah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Landak	7,10	7,11	7,12	7,15	7,24
Propinsi Kalimantan Barat	7,31	7,37	7,45	7,59	7,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Landak, 2024

### 4) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah/mengenyam pendidikan formil (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

**Tabel 2. 17 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Landak Tahun 2018-2022**

Daerah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Landak	12,37	12,39	12,40	12,43	12,44
Provinsi Kalimantan Barat	12,55	12,58	12,60	12,65	12,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Landak, 2023



## 5) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. lihat Tabel 2.18. Capaian ini menunjukkan usia Harapan Hidup Kabupaten Landak selalu lebih tinggi dari usia harapan hidup Kalimantan Barat dan berada pada urutan 3 tertinggi dari 14 Kabupaten/Kota.

**Tabel 2. 18 Angka Harapan Hidup Kabupaten Landak dan Kalimantan Barat Tahun 2019-2023**

Daerah	Usia Harapan Hidup (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2022
Kabupaten Landak	72,70	72,84	73,04	73,39	73,92
Propinsi Kalimantan Barat	70,56	70,69	70,76	71,02	71,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Landak, 2023

## 6) Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada 17 lapangan. Penduduk usia kerja yang bekerja di 17 lapangan usaha pada tahun 2017 sebanyak 189.781 jiwa. Empat tahun berikutnya, penduduk usia kerja yang bekerja bertambah menjadi 192.344 jiwa (2020) atau bertambah rata-rata 0,45% per tahun.

Hingga tahun 2020, terdapat 277.344 jiwa penduduk usia kerja (tenaga kerja) terdiri dari 52,2% laki-laki dan 47,8% perempuan. Penduduk usia kerja ini terbagi atas Angkatan Kerja (AK) sebanyak 199.077 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 78.267 jiwa. Dari total AK, sebagian besar (96,6%) sudah bekerja dan selebihnya (3,4%) merupakan pengangguran. Seiring dengan struktur ekonomi Kabupaten Landak yang berbasis pertanian, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, yakni sekitar 57,31 persen. Angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur dan jasa, masing-masing 16,47 dan 26,22 persen.

Keadaan pasar kerja di Kabupaten Landak menunjukkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja terus bertambah setiap tahunnya, rata-rata pertambahannya 2,56% per tahun selama periode 2017-2020, namun penambahan permintaan tenaga kerja lebih rendah. Tingkat pengangguran cenderung bertambah dari 2,03% (2017) menjadi 3,4% (2020), kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 3,22% dan menjadi 1,70% pada tahun 2022. TPT di Kabupaten Landak jauh lebih rendah dari rerata Kalimantan Barat (5,82%).

**Tabel 2. 19 Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

INDIKATOR	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023



Persentase Penduduk Yang Bekerja	97,77	97,31	96,62	96,78	96,31	96,31
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,23	2,69	3,38	3,22	1,70	2,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Landak, 2023

## 7) Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Keragaman seni budaya yang ada di Kabupaten Landak dimanfaatkan oleh kalangan seniman untuk melestarikan budaya yang dimiliki. Terdapat beberapa pagelaran seni yang diikutsertakan di Kabupaten Landak yaitu Upacara Adat Robo-Robo, Upacara Adat Ziarah Akbar dan Tumpang Negeri, Upacara Adat Naik Dango, dan Festival Budaya Binua Landak. Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya jumlah grup dan gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian di Kabupaten Landak yang terlampir pada Tabel 2.20 berikut.

**Tabel 2. 20 Jumlah Kesenian di Kabupaten Landak**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah grup kesenian	25	39	48	48	70	70
2.	Jumlah gedung kesenian	0	0	0	0	0	0
3.	Jumlah klub olahraga	295	125	125	n/a	n/a	n/a
4.	Jumlah gedung olahraga	295	297	297	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, 2019-2024

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang tangguh, berbobot dan sehat. Salah satu pendukung terwujudnya hal tersebut, ketersediaan gedung olahraga dapat membantu masyarakat Kabupaten Landak dalam mengembangkan kekuatan dan kemampuan fisik.ada tahun 2020 terdapat 125 klub olahraga dan 297 gedung olahraga di Kabupaten Landak.



### 2.1. 3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3. A. Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### 1) Pendidikan

#### A. Angka Partisipasi Kasar dan Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk yang sedang bersekolah pada tiap jenjang pendidikan, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk kelompok usia sekolah sesuai jenjang pendidikan kelompok tersebut. Secara umum, nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat fasilitas pendidikan tanpa melihat berapa usianya, APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

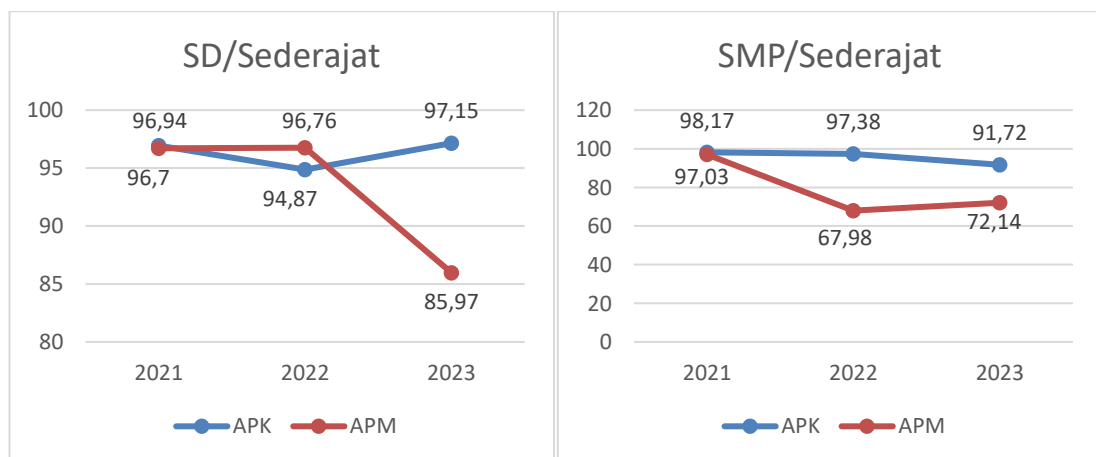
Nilai APK dan APM pada tingkatan wajib sekolah 9 tahun di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif. Pada tahun 2023 nilai APK dan APM di Kabupaten Landak tergolong tinggi karena berada diatas angka 50, namun mengalami penurunan untuk nilai APK pada jenjang SMP/ sederajat dan nilai APM pada jenjang SD/ sederajat.

**Tabel 2. 21 APK dan APM Kabupaten Landak Tahun 2021-2023**

Jenjang Pendidikan	APK (%)			APM (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD/Sederajat	96,94	94,87	97,15	96,70	96,76	85,97
SMP/Sederajat	98,17	97,38	91,72	97,03	67,98	72,14

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2024

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau lebih cepat bersekolah. Selisih nilai APK dan APM Kabupaten Landak tahun 2023 mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan SD/ sederajat terdapat selisih 11,18% dan SMP/ sederajat 19,58% anak usia sekolah yang terlambat atau lebih cepat bersekolah.



Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2024

**Gambar 2. 8 Perbandingan APK dan APM Kabupaten Landak Tahun 2023**



## B. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menggambarkan keadaan penduduk kelompok umur sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Faktor utama penyebab putus sekolah adalah keadaan ekonomi rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskiknan. Angka Putus Sekolah akan lebih baik jika semakin rendah atau cenderung menurun, hal ini dapat diwujudkan dengan program WAJAR 9 tahun dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Angka Putus Sekolah baik di jenjang sekolah dasar maupun menengah di Kabupaten Landak dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, ini menunjukkan hal positif bagi daerah dalam pengentasan masyarakat putus sekolah. Namun pada tahun 2023 angkanya kembali mengalami peningkatan, tercatat untuk jenjang SD/ sederajat meningkat 0,01% dan jenjang SMP/ sederajat meningkat 0,08% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2. 22 Angka Putus Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SD/Sederajat	0,48	0,14	0,03	0,04
SMP/Sederajat	1,24	0,20	0,05	0,13

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2024

Angka kelulusan sekolah di Kabupaten Landak pada tahun 2023 tergolong tinggi pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah, dimana hal ini dapat dipertahankan setiap tahunnya. Angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang sama juga berbanding lurus dengan angka kelulusan sekolah, sehingga dapat disimpulkan penduduk yang lulus sekolah masih melanjutkan pendidikannya dengan minimal menyelesaikan 9 tahun wajib belajarnya. Walau pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kelulusan sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah menengah sebesar 0,02% dan penurunan angka melanjutkan sekolah dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat sebesar 7,22%.

**Tabel 2. 23 Angka Kelulusan Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SD/Sederajat	100,00	100,00	100,00	100,00
SMP/Sederajat	99,99	100,00	99,98	100,00

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2024

**Tabel 2. 24 Angka Melanjutkan Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	107,3	111,68	92,78	92,78



Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2024

### C. Ketersediaan Sekolah Guru dan Murid

Diperlukan data rasio/perbandingan jumlah guru dan murid untuk mengetahui apakah jumlah tenaga pendidik sudah atau belum mencukupi atau sudah terpenuhi. Rasio guru terhadap murid merupakan indikator untuk mengetahui berapa banyak murid yang berada dalam tanggung jawab satu guru. Makin tinggi angka rasio, maka seorang guru harus bertanggung jawab terhadap murid dengan jumlah yang makin banyak pula. Pada jenjang SD hingga SMP yang merupakan pendidikan wajib dasar penduduk, idealnya 1 orang guru bertanggung jawab terhadap 20 orang murid pada jenjang tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008).

Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Landak dari tahun 2020-2022 tidak berubah jauh, namun terus mengalami peningkatan angka rasio. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan angka rasio sebesar 13,70 pada jenjang SD/ sederajat dan 11,84 pada jenjang SMP/ sederajat. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dimana jumlah guru bertambah atau perkembangan negatif karena jumlah murid yang berkurang. Dilihat dari nilai APK, maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/ Sederajat dan terjadi peningkatan jumlah guru namun penurunan jumlah murid untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Dibandingkan dengan angka ideal yaitu 1 orang guru bertanggung jawab terhadap sekitar 20 orang murid, maka rasio guru terhadap murid di Kabupaten Landak tahun 2023 masih sesuai standar. Dimana 1 orang guru bertanggung jawab terhadap sekitar 12 hingga 14 orang murid. Hal ini perlu di pertahankan pemerintah bersamaan dengan peningkatan kualitas guru dan murid.

Tabel 2. 25 Rasio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SD/ Sederajat	14,28	14,10	15,80	13,70
SMP/ Sederajat	14,46	21,75	22,07	11,84

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2024

## 2) Kesehatan

### A. Sumber Daya Kesehatan

Pembangunan kesehatan terus berlangsung di Kabupaten Landak. Hal ini tampak pada penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan. Hingga 2020, terdapat Rumah Sakit Umum 1 unit, Poliklinik 18 unit. Puskesmas sebanyak 16 unit tersebar di seluruh



kecamatan. Jumlah Apotik relative banyak yakni 23 unit namun sebagian besar (19 unit) masih berada di Kecamatan Ngabang dan 3 kecamatan lain (yaitu Kecamatan Sengah Temila 2 unit, Kec. Menjalin dan Menyuke masing-masing 1 unit). Sarana kesehatan lainnya adalah Posyandu 606 unit dan Polindes 128 unit.

Rasio Puskesmas, Poliklinik pada tahun 2020 tergolong tinggi, yaitu 1:11.694. Demikian juga keberadaan rumah sakit yang 1 unit, terasa masih sangat kurang dalam melayani penduduk Kabupaten Landak yang berjumlah 397.610 jiwa.

Jumlah tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam pembangunan kesehatan masyarakat dalam 4 tahun terakhir semakin berkurang. Tenaga Kesehatan Paramedis (Bidan, Perawat, Farmasi dan Ahli Gizi) berkurang dari 453 orang (2017) menjadi 369 orang (2020). Demikian juga tenaga Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis) jumlahnya bertambah dari 27 orang (2017) menjadi 16 orang (2020). Rasio dokter per satuan penduduk 1 berbanding 2.485. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 1.078. Rasio ini masih tergolong tinggi dan masih perlu penambahan dokter dan paramedis lainnya.

Hingga tahun 2020, tenaga kesehatan yang berperan dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Landak terdiri dari Dokter (16 orang), Perawat (171 orang), Bidan (175 orang), Farmasi (8 orang) dan Ahli Gizi (13 orang).

## **B. Angka Kematian Bayi**

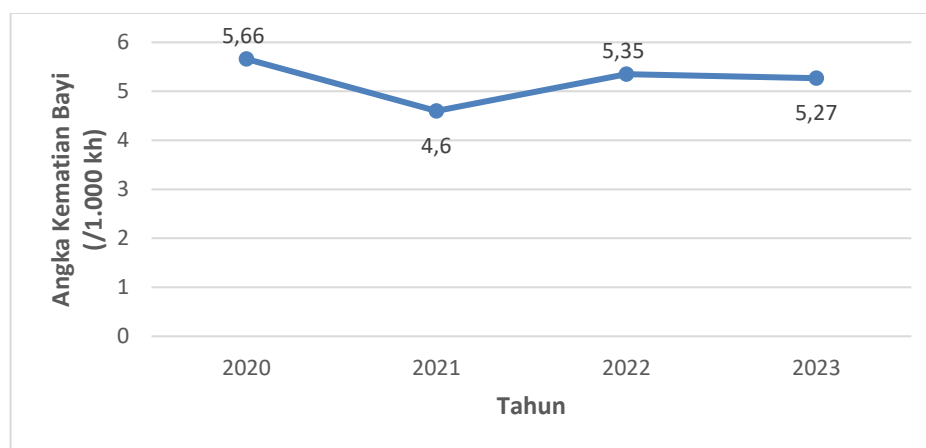
Angka kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun merupakan indikator untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini erat kaitannya dengan status sosial keluarga si bayi. Angka kematian bayi dapat pula menjadi indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan pada suatu daerah. Begitu pula dengan angka kematian balita yang berumur 1 hingga 5 tahun merupakan indikator untuk menggambarkan kesadaran masyarakat dalam tumbuh kembang anak dan kualitas pelayanan kesehatan.

Angka kematian bayi di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif dimana terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 yaitu 4 hingga 5 bayi per 1.000 kelahiran. Secara umum, angka kematian bayi di Indonesia berkisar 9 hingga 10 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Membandingkan kondisi tersebut, maka angka kematian bayi di Kabupaten Landak cenderung sedang, sehingga ini menjadi langkah yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Landak. Namun target penurunan angka kematian bayi harus terus digencarkan oleh pemerintah. Pada



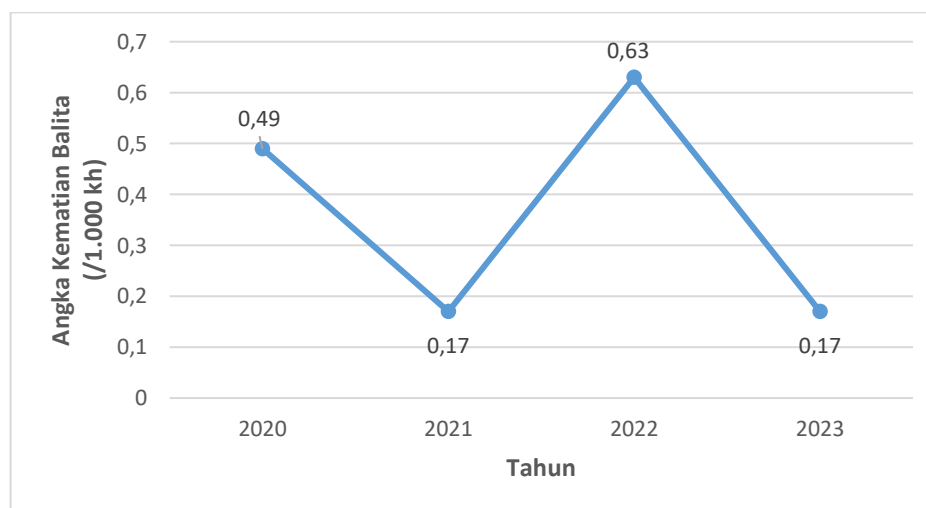
tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun sebelumnya, dimana angka kematian bayi mengalami penurunan.

Angka kematian balita di Kabupaten Landak juga bersifat fluktuatif dengan penurunan drastis pada tahun 2021 dan 2023. Angka kematian balita di Kabupaten Landak cenderung rendah yaitu berkisar 1 hingga 2 balita per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini merupakan langkah positif pemerintah untuk tetap mengendalikan angka agar bertahan di angka rendah. Pada tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun sebelumnya, dimana angka kematian balita mengalami penurunan.



Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2024

**Gambar 2. 9 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**



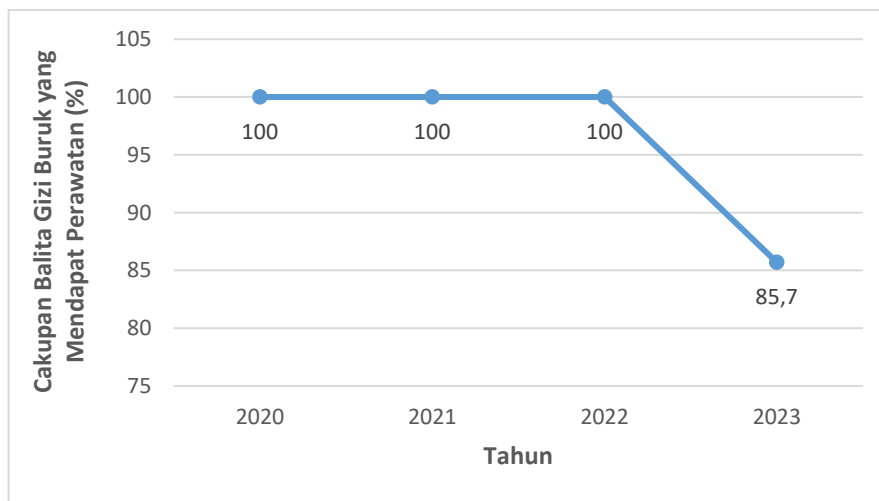
Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2024

**Gambar 2. 10 Angka Kematian Balita di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

Balita yang sehat menjadi indikator keluarga yang sehat, sehingga semakin tinggi jumlah balita yang mengalami gizi buruk maka semakin rendah pula kualitas kesehatan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Adapun jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Landak adalah 100% setiap tahunnya (Tahun 2020-2022), namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 85,7% saja. Pada tahun 2023 terdapat total kasus

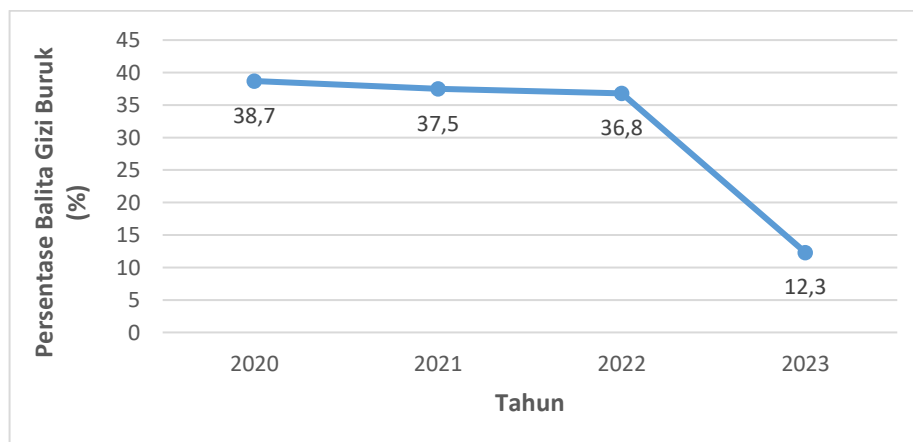


balita gizi buruk sebanyak 12,3% dari total balita di Kabupaten Landak. 2,8% diantara mengalami gizi buruk dengan kondisi sangat kurus dan 9,5% diantaranya mengalami gizi kurang, namun masih terdapat 14,3% balita yang belum mendapat perawatan kesehatan yang baik dan sesuai standar.



Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2024

**Gambar 2. 11 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**



Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2024

**Gambar 2. 12 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

Upaya pemerintah dalam penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Landak tergolong sangat baik karena hampir setiap tahun 100% kasus dapat ditangani dengan perawatan kesehatan yang baik dan sesuai standar. Persentase balita gizi buruk juga konsisten mengalami penurunan yang positif setiap tahunnya. Perlu adanya evaluasi terkait penurunan penanganan kasus yang terjadi dan upaya untuk kembali mempertahankan 100% kasus tertangani.



### 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Landak. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Sarana jalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Landak, sangat bermanfaat untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi masyarakat. Potensi jalan yang ada di Wilayah Kabupaten Landak mencakup jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Dengan itu akses masyarakat kepada fasilitas publik ataupun mobilitas perekonomian akan semakin mudah dan efisien yang pada gilirannya akan mendorong tingkat perekonomian daerah itu sendiri. Adapun total panjang jalan menurut kewenangan pemerintah Kabupaten Landak sepanjang 982,42 km tercatat sejak tahun 2020 hingga 2023 dengan panjang yang sama.

**Tabel 2. 26 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

Jenis Permukaan Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal	209,2	551,10	485,42	490,92	493,07
Kerikil	334,84	134,27	298,43	297,48	294,30
Tanah	341,14	290,92	195,25	191,11	191,77
Lainnya	97,24	6,13	3,32	2,91	3,28
Total	982,42	982,42	982,42	982,42	982,42

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2024

**Tabel 2. 27 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

Jenis Permukaan Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Mantap	544,04	644,70	613,40	610,38	614,30
Tidak Mantap	438,38	337,72	369,02	372,04	368,12
Total	982,42	982,42	982,42	982,42	982,42

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2024

Panjang jalan di Kabupaten Landak diidentifikasi berdasarkan perkerasan dan kondisi permukaan jalan. Secara dominan, perkerasan jaringan jalan di Kabupaten Landak sudah berupa aspal dengan kondisi yang mantap, namun tetap perlu diperhatikan untuk perawatan ruas jalan dalam mempertahankan kondisi tersebut.



Masih terdapat pula perkerasaan jalan yang tidak mantap, sehingga perlu adanya perbaikan jalan. Selama 5 tahun terakhir rata-rata kondisi jalan mantap di Kabupaten Landak dapat dipertahankan di atas 50% dari panjang jalan status kabupaten. Hal ini merupakan upaya baik yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kualitas jalan.

### B. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Jaringan drainase adalah salah satu jaringan yang krusial dalam sistem jaringan infrastruktur wilayah yang menampung limpasan air hujan. Idealnya setiap jaringan jalan yang terbangun hendaknya diikuti juga oleh pembangunan jaringan drainase. Namun, kenyataannya jaringan drainase mayoritas terkonsentrasi di Kawasan Perkotaan, yakni di Kecamatan Ngabang. Sebanyak 58,4 jaringan drainase di Kabupaten Landak berada di Kecamatan Ngabang.

Indikator drainase dalam kondisi baik berarti pembuangan aliran air tidak tersumbat merupakan hasil dari perbandingan antara panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air dengan panjang seluruh drainase. Adapun panjang total jaringan drainase terbangun dengan kondisi baik di Kabupaten Landak di tahun 2023 yaitu 5.314.100 meter. Apabila dibandingkan dengan banyaknya penduduk yang terlayani oleh jaringan drainase, maka persentase penduduk yang terlayani oleh drainase hanya sebesar 3,29% saja. Setiap tahunnya terdapat peningkatan drainase dengan kondisi baik di Kabupaten Landak.

**Tabel 2. 28 Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (m) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

Tahun					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.219.920,85	2.221.226,30	2.225.916,66	2.230.297,29	2.687.640,00	5.314.100,00

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2024

### C. Rasio Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Rasio irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah rasio irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas irigasi kabupaten dikalikan 100. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Landak terus mengalami peningkatan dari 2018-2022 yaitu 22,40, 22,42, 22,46, 22,51, dan 22,52. Sedangkan untuk tahun 2023 belum tercatat perkembangan rasio irigasi di Kabupaten Landak. Hal ini berarti pengembangan dan perbaikan irigasi di Kabupaten Landak terus meningkat, harapannya dapat mempengaruhi produktifitas hasil panen dari lahan yang teraliri irigasi.



**Tabel 2. 29 Rekapitulasi Data Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Landak Tahun 2016-2021**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	SATUAN
Out Came	206,00	268,00	160,00	271,00	n/a	n/a	6.860,00	HA
Panjang Total Saluran Primer Dan Sekunder Yg Terbangun (M)	2,219,920.85	2,221,226.30	2,225,916.66	2,230,297.29	n/a	n/a	2,209,240	METER
Rasio Jaringan Irigasi (%)	22,40	22,42	22,46	22,51	22,52	n/a		%

JENIS BANGUNAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	SATUAN
Bangunan Bagi	24,00	6,00	19,00	5,00	n/a	n/a	200,00	UNIT
Bangunan Bendung	14,00	3,00	12,00	2,00	n/a	n/a	213,00	UNIT
Normalisasi Sungai	10.693,00	4.300,00	10.725,00	4.047,00	n/a	n/a	116.766,15	METER
Perkuatan Tebing Pasangan Bronjong	367,00	-	18,00	18,00	n/a	n/a	2.747,00	METER
Saluran Irigasi	3.990,98	1.305,45	4.696,36	4.380,63	n/a	n/a	60.088,43	METER
Embung	-	-	-	1,00	n/a	n/a	1,00	UNIT
Rehab Embung	-	-	-	-	n/a	n/a	1,00	UNIT
Rehab Bagi	-	7	3	1	n/a	n/a	32	UNIT
Rehab Bendung	5	6	2	2	n/a	n/a	68	UNIT
Rehab Saluran	220,20	472,00	339,70	274,70	n/a	n/a	2.440,65	METER

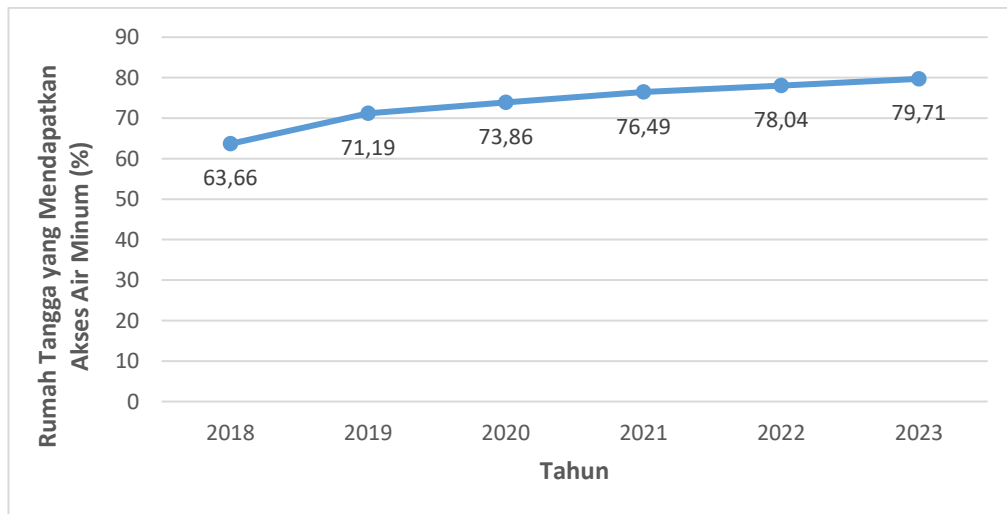
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Landak

#### 4) Perumahan dan Permukiman

##### A. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum

Rumah tangga pengguna air minum atau yang teraliri air dari PDAM adalah rumah tangga yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air minum yang terus diupayakan oleh pemerintah. Kebutuhan air minum di Kabupaten Landak masih sangatlah penting dalam rangka mendukung program masyarakat yang sehat. Khususnya di pedesaan, masyarakat masih rendah kesadarannya terhadap air minum serta masih rendahnya pula sarana dan prasarana air minum yang dibangun di pedesaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Landak. Adapun penggunaan air bersih untuk keperluan rumah tangga adalah 87,89 dari total penggunaan air bersih di Kabupaten Landak.

Secara bertahap pemerintah kabupaten terus berupaya untuk dapat memenuhi pelayanan mengenai air minum bagi masyarakat pedesaan, hal ini terlihat telah dibangunnya instalasi pengelolaan air minum sederhana di beberapa desa. Karena masih minimnya anggaran dan masih menggandakan anggaran dari Pusat sehingga tidak dapat memenuhi dan melayani seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Landak. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum pada tahun 2018 sampai 2023 terus mengalami peningkatan.



**Gambar 2. 13 Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

*Sumber: Data Prioritas DPURPERA Kabupaten Landak, 2024*

## **B. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**

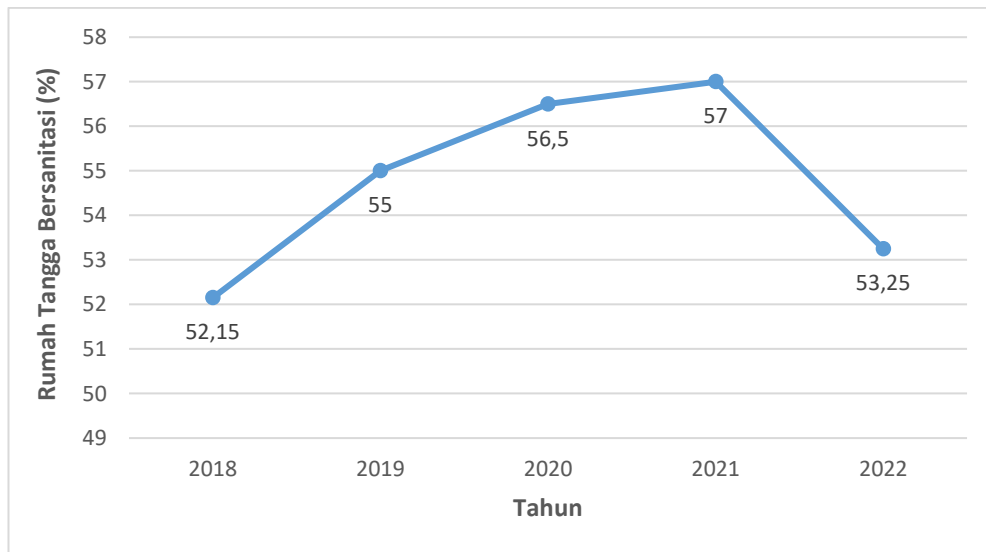
Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya.

Rasio elektrifikasi Kabupaten Landak hanya 64,2% dan rasio desa berlistriaknya 82,6%, sehingga masih terdapat 17,4% desa yang belum berlistrik.

## **C. Rumah Tangga Bersanitasi**

Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Rumah tangga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Landak. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada dan dikalikan 100.

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Landak masing-masing mengalami kenaikan pada awal periode tahun 2018 sampai akhir periode 2022. Pada tahun 2018 rumah tangga bersanitasi sebesar 52,15, meningkat pada tahun 2019 hingga 2021 menjadi 55,00, 56,50, dan 57,00. Namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 53,25, berarti masih terdapat 46,75 rumah tangga yang belum bersanitasi pada tahun 2022.



**Gambar 2. 14 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Landak Tahun 2018-2022**

*Sumber: Data Prioritas DPURPERA Kabupaten Landak, 2024*

#### **D. Lingkungan Permukiman Kumuh**

Berdasarkan SK Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Landak dengan Nomor 050/181/HK-2016 terdapat 13 lokasi, yakni 6 lokasi di Kecamatan Ngabang, 1 lokasi di Kecamatan Sengah Temila, 1 lokasi di Kecamatan Menyuke, 2 lokasi di Kecamatan Mempawah Hulu, 1 lokasi di Kecamatan Mandor, 1 lokasi di Kecamatan Menjalin dan 1 lokasi di Kecamatan Jelimpo.

Terdapat lokasi kumuh dengan kategori ringan, sedang hingga berat di Kabupaten Landak. Kawasan kumuh dengan kategori berat terdapat di Dusun Sale Terpadu, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu. Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas serta penataan kawasan kumuh. Adapun luas permukiman kumuh hingga tahun 2022 menjadi 185,43 Ha. Berdasarkan data dari Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Landak, jumlah permukiman kumuh yang tertangani dari tahun 2020 hingga 2022 hanya di 5 kecamatan setiap tahunnya.

#### **E. Rasio Rumah Layak Huni**

Indikator rasio rumah layak huni merupakan hasil perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Landak terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018, rasio rumah layak huni di Kabupaten Landak sebesar 59,92% dan meningkat sebanyak 2,48 sampai dengan tahun 2021, yakni menjadi 62,40%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 50,76%. Peningkatan rasio rumah layak huni masih belum signifikan dan bahkan terjadi penurunan, masih terdapat 49,24% rumah



tidak layak huni di Kabupaten Landak yang membutuhkan perhatian untuk segera dilakukan penanganan.

**Tabel 2. 30 Indikator Rumah Layak Huni Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase rumah tangga pengguna air minum (%)	73,86	76,49	77,52	79,71	73,86	76,49
Rumah tangga bersanitasi (%)	52,15	55,05	56,51	57,05	53,25	n/a
Persentase luasan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan (%)	n/a	n/a	n/a	1,87	185,43	n/a
Persentase jalan lingkungan yang terbangun (%)	n/a	68,50	71,05	73,76	n/a	n/a
Rasio rumah layak huni (%)	59,92	60,43	61,15	62,40	n/a	50,76

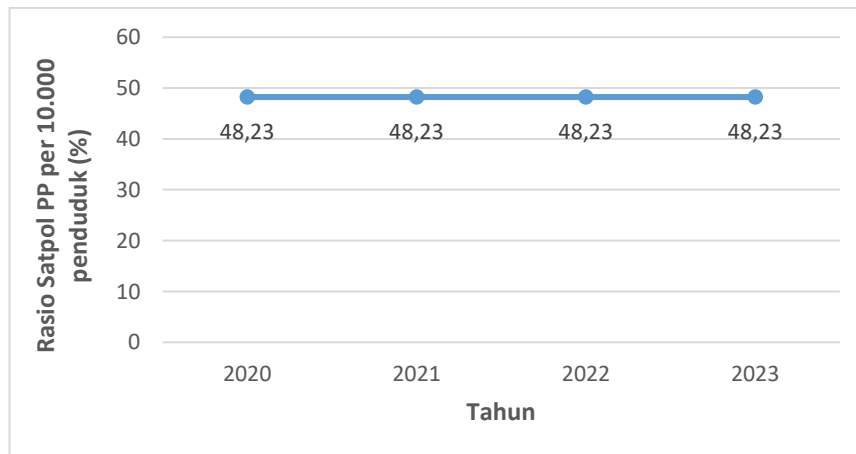
Sumber: Data Prioritas DPURPERA Kabupaten Landak, 2024

## 5) Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio Satpol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Landak perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah Satpol PP dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Satpol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Satpol PP pada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada level individu Satpol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Hakikat dari rasio Satpol PP per 10.000 penduduk selanjutnya akan memberikan kepastian tentang tingkat keterpenuhan SDM dalam pelayanan Trantibum (ketenteraman dan ketertiban umum) dan penegakan Perda (Peraturan Daerah), dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Angka Rasio Satpol PP di Kabupaten Landak bersifat stagnan di angka 48,23%, yang artinya penambahan jumlah Satpol PP setara dengan penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya. Dibandingkan pada daerah sekitar Kabupaten Landak, angka ini cenderung tinggi. Hal ini menjadi langkah baik pemerintah untuk menjadi ketertiban daerah. Dapat dilihat dari cakupan pengendalian terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan Perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat yang terus meningkat dan mencapai 100% di tahun 2023 berdasarkan data prioritas Salpo PP Kabupaten Landak Tahun 2024.

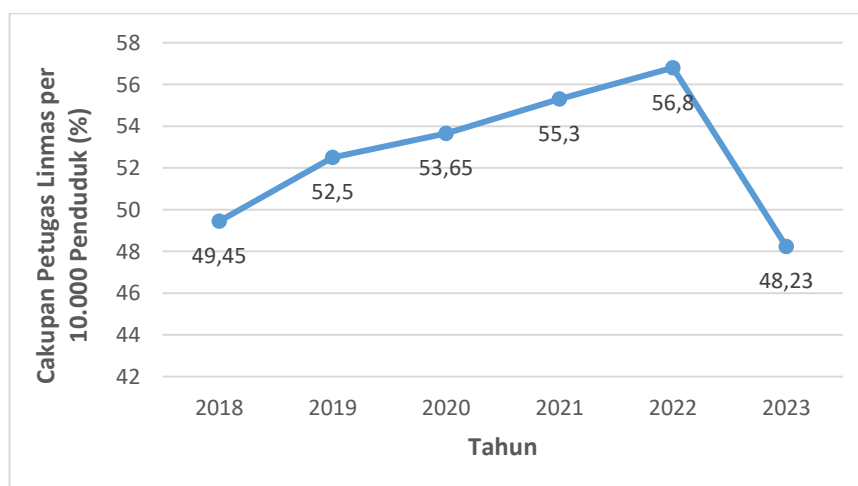


**Gambar 2. 15 Rasio Satpol PP (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

*Sumber: Data Prioritas Satpol PP Kabupaten Landak, 2024*

### **B. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk**

Cakupan petugas Linmas adalah perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Cakupan petugas Linmas diharapkan dapat menggambarkan perbandingan jumlah sumber daya apatur Linmas dengan jumlah penduduk sebagai objek penerima layanan, sehingga dari rasio tersebut dapat diketahui beban kerja personil Linmas dalam menjalankan tugasnya. Kabupaten Landak merupakan wilayah yang berpotensi rentan konflik. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah petugas Linmas dengan jumlah penduduk. Adapun cakupan petugas Linmas di Kabupaten Landak terus meningkat tiap tahunnya, namun mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2023.



**Gambar 2. 16 Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

*Sumber: Data Prioritas Satpol PP Kabupaten Landak, 2024*

### **C. Rasio Pos Kamling per jumlah desa/kelurahan**

Rasio pos siskamling digunakan untuk melihat perkembangan sejumlah pusat pengamanan sosial masyarakat. Pos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan)



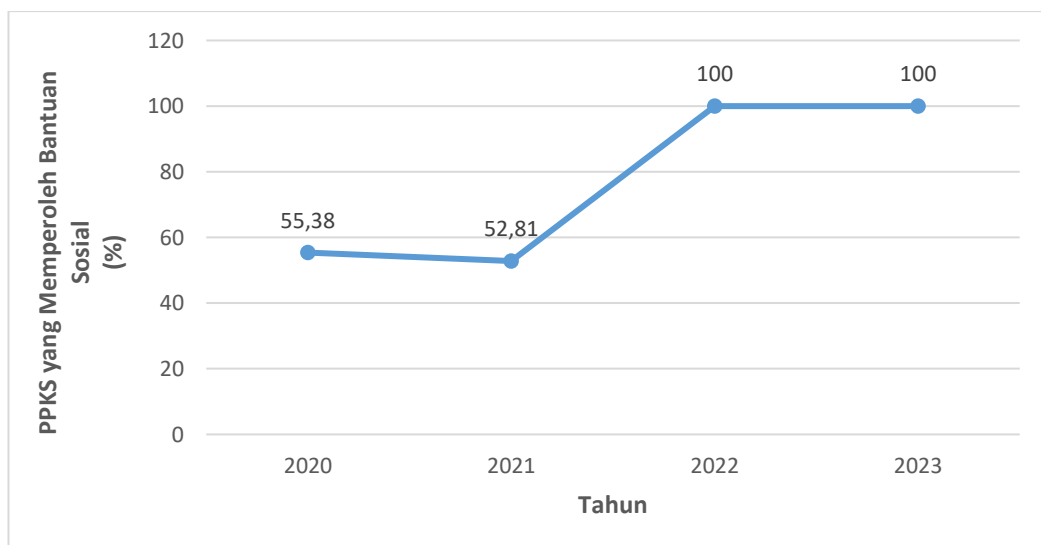
merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamanan lingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Siskamling adalah kelembagaan sosial terbawah yang lahir dari inisiatif masyarakat untuk menciptakan keamanan lingkungan secara bottom up. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah seluruh kelurahan di Kabupaten Landak. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap kelurahan di Kabupaten Landak. Lihat Tabel 2.32.

## 6) Sosial

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial, penurunan jumlah PPKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

### A. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

PPKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan persentase jumlah PPKS yang diberikan bantuan terhadap jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan. Adapun PPKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Landak meningkat hingga 100% pada tahun 2023.



**Gambar 2. 17 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

*Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2024*

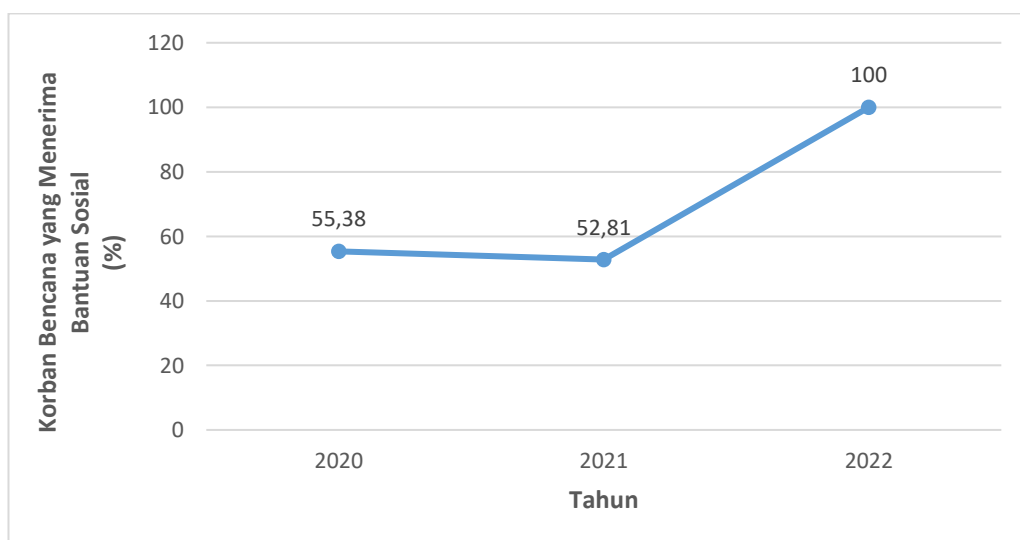


## B. PPKS yang Tertangani

PPKS yang tertangani merupakan persentase jumlah PPKS yang tertangani terhadap jumlah PPKS yang ada, yang berarti PPKS tertangani mengalami peningkatan kualitas kesejahteraan. Perbedaannya dengan PPKS yang memperoleh bantuan sosial adalah telah terjadinya peningkatan kualitas kesejahteraan pada PPKS yang tertangani, dimana PPKS yang tertangani juga bagian dari PPKS yang memperoleh bantuan sosial. Adapun PPKS yang tertangani di Kabupaten Landak setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 100%.

## C. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial

Korban bencana yang menerima bantuan sosial merupakan persentase jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun terhadap jumlah korban yang seharusnya menerima. Adapun korban bencana yang menerima bantuan sosial di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif. Namun terjadi ketimpangan yang luar biasa di tahun 2021, dimana terjadi penurunan drastis terhadap bantuan korban bencana yaitu menjadi 22 dari tahun sebelumnya yaitu 78.



**Gambar 2. 18 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Landak Tahun 2020-2022**

*Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2024*

### 2.1.3. B. Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 1) Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok



penduduk yang tergolong miskin, kelompok penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang (1) bekerja, (2) punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan (3) yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah AK bertambah setiap tahunnya meskipun pertambahannya tergolong rendah, yakni rata-rata 0,48 per tahun selama periode 2018-2023. Jumlah AK bertambah dari 190.692 jiwa pada tahun 2018 menjadi 218.027 jiwa di tahun 2023 yang terdiri dari laki-laki 62,3% dan perempuan 37,7%. Angkatan Kerja di tahun 2023, sebagian besar (97,76%) sudah bekerja. Laki-laki yang bekerja (62,52%) lebih banyak dari perempuan yang bekerja (37,48%). Kualitas AK yang bekerja tergolong rendah. Sebagian besar (67,57%) berlatar belakang pendidikan SMP ke bawah dan SMA/SMK (26,38%), selebihnya lulusan perguruan tinggi (6,05%).

Produktivitas Kerja merupakan nilai produksi per Angkatan Kerja yang bekerja pada 17 lapangan usaha yang diukur dengan rupiah harga konstan-2010. Perkembangan produktivitas pekerja selama periode 2018 hingga 2023 meningkat, dari Rp. 26,18 juta rupiah/orang per tahun menjadi Rp. 37,48 juta rupiah/orang per tahun. Angka ini jauh melebihi upah minimum kabupaten. Peningkatan produktivitas ini merupakan indikasi peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2018-2020 cenderung meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2021 dan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2022, sehingga dapat diketahui sudah terjadi pemulihan dan stabilisasi ekonomi pada tahun tersebut. Namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 2,24%. Pemerintah perlu untuk kembali mempertahankan penurunan TPT yang telah terjadi pada tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Terdapat perbedaan yang jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki 81,83% dan TPAK perempuan 57,46%. Hal ini menandakan penopang utama dalam ekonomi rumah tangga adalah kaum laki-laki. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi masih terbatas dan perlu diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

**Tabel 2. 31 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022



1	AK (jiwa)	190.69 2	191.60 7	199.077	193.451	194.380	218.02 7
2	Produktivitas Kerja (juta rupiah)	26,18	27,96	27,07	28,95	31,51	37,48
3	TPT (%)	2,29	2,75	3,38	3,22	1,78	2,24
4	TPAK (%)	74,46	68,39	71,78	70,19	72,29	71,13

Sumber: BPS Kabupaten Landak, 2024 dan Sakernas, 2021

## 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### (a) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dicermati dari ukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selama periode 2018-2023, IPG di Kabupaten Landak menunjukkan trend positif dan capaiannya tergolong tinggi. IDG meningkat sangat cepat dari 64,47 pada tahun 2017 menjadi 67,59 di tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 65,53. IDG Kabupaten Landak berada di ranking 8 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023. Hal ini merupakan penurunan dari peringkat 5 pada tahun 2022, perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk membangun keadilan terhadap perempuan di Kabupaten Landak. Namun secara umum capaian IDG Kabupaten Landak masih dapat bersaing dengan capaian IDG Kalimantan Barat. Semakin dekat angka IDG ke 100, pertanda semakin kecil ketidakadilan pembangunan terhadap perempuan.

**Tabel 2. 32 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

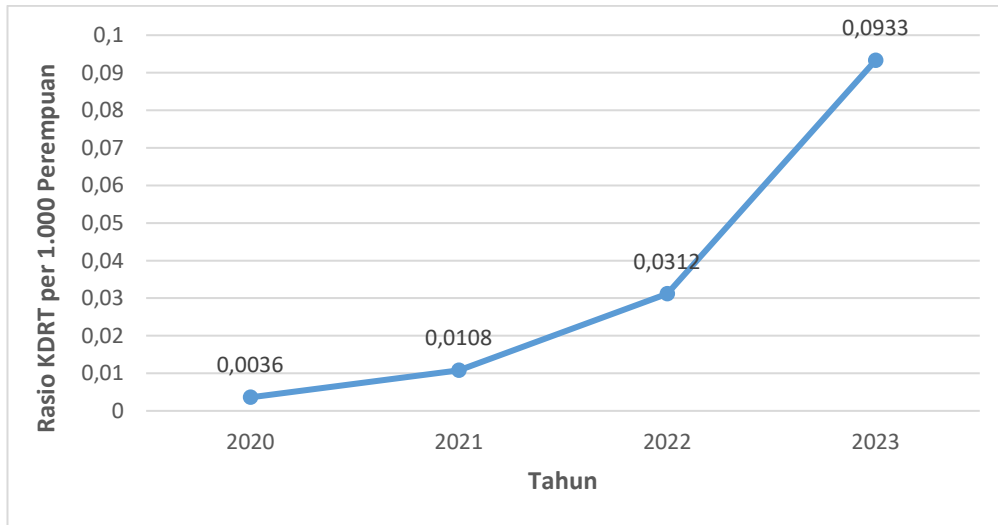
Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Barat	64,46	64,47	68,07	68,07	71,14	73,18	73,05
Landak	64,07	64,47	67,80	68,47	67,44	67,59	65,53

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2024

### (b) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Kepala Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) mengungkapkan dari tahun ke tahun ada kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Kasus tindak pidana tersebut antara lain adalah pembunuhan, melarikan anak di bawah umur, perbuatan cabul, pencurian, pelecehan seksual, perkosaan, narkoba, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Rasio KDRT merupakan persentase jumlah perempuan yang mengalami KDRT terhadap 1.000 perempuan di suatu daerah. Hal ini sebagai indikator untuk keamanan perempuan dan anak dalam suatu keluarga di masyarakat.

Rasio KDRT di Kabupaten Landak tergolong kecil yaitu hanya 0,0933 per 1.000 perempuan di Kabupaten Landak. Namun perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa tiap tahun angka rasio KDRT terus mengalami peningkatan, walaupun nilainya kecil.



**Gambar 2. 19 Rasio KDRT di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

*Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2024*

**(c) Perkara yang Berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perkara yang menimpa perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam kurun waktu 1 tahun. Dari banyaknya kasus perkara hukum, terdapat 30 kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Landak pada tahun 2023. Kasus ini dari tahun ke tahun dominan mengalami penurunan yang berarti ini menjadi perubahan yang positif. Adapun korban dari seluruh kasus tersebut mendapatkan layanan bantuan hukum 100 setiap tahunnya (periode tahun 2018-2023).

**Tabel 2. 33 Indikator Perkara yang Berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perkara	29	23	18	23	41	30
2	Korban yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2024*

**3) Pangan**

Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjaminan, dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Definisi tentang ketahanan pangan dirujuk dari FAO (1996) yang diadopsi ke dalam UU RI No. 7 Tahun 1996, menyebutkan bahwa terdapat empat komponen



yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu, (LIPI, 2004) 1) Kecukupan ketersediaan pangan, 2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) Aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan, serta 4) Kualitas/keamanan pangan. Adanya empat komponen tersebut, kemudian dapat diukur ketahanan pangan tingkat rumah tangga dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Pengukuran ketahanan pangan tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen ketahanan tersebut, untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan upaya Kabupaten Landak sebagai daerah yang memiliki ketahanan pangan, diperlukan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan berbagai regulasi yang mengatur, mendukung serta mengendalikan pembangunan pertanian tersebut. Regulasi Ketahanan Pangan adalah Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dan sebagainya.

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Sedangkan Ketersediaan pangan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah kemampuan daerah untuk memiliki dan menyediakan sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Landak cenderung terus mengalami penurunan dari 284,95 kg/jiwa/tahun pada tahun 2018 menjadi 258,36 kg/jiwa/tahun di tahun 2021. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena akan berpengaruh pada ketahanan dan kemandirian pangan di Kabupaten Landak. Walau demikian, kegiatan penguatan cadangan pangan yang dilakukan oleh daerah meningkat di tahun 2021 menjadi 13. Ini merupakan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menyimpan bahan pangan pokok yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Berikut perkembangan regulasi terkait ketahanan pangan di Kabupaten Landak tahun 2018-2023.

**Tabel 2. 34 Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Regulasi Ketahanan Pangan (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Regulasi Ketahanan Pangan (%)	100	100	100	100	100	100



No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa/tahun)	284,95	272,61	258,83	258,36	n/a	n/a
4	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal)	1034,03	1077,87	1.011,40	1.021,53	n/a	n/a
5	Ketersediaan Protein Perkapita (gram)	24,24	25,27	24,96	23,94	n/a	n/a
6	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,30	80,30	76,48	75,60	85,80	86,50
7	Penguatan Cadangan Pangan (%)	15,00	5,00	8,85	13,00	n/a	n/a
8	Indeks Ketahanan Pangan Kab.Landak	n/a	n/a	n/a	75,23	77,07	76,89

Sumber: Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Landak, 2023

#### 4) Pertanian

Permasalahan pertanian erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Landak selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

Persentase luasan lahan yang bersertifikat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 63, tahun 2019 sebanyak 30, dan tahun 2020 sebanyak 100. Pada tahun 2021, sebanyak 83 dari luasan lahan di Kabupaten Landak telah bersertifikat. Jumlah sertifikat tanah sebanyak 268 di tahun 2021, namun Sebagian besar sertifikat tersebut belum dipecah dan dibalik nama. Untuk izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk usaha dari tahun 2019 hingga 2020 meningkat, dimana pada tahun 2019 hanya terdapat 2 izin, dan di tahun 2021 terdapat 40 izin. Hal tersebut mengindikasikan mulai bertumbuhnya iklim berusaha di tahun 2021.

Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah daerah dan para stakeholders untuk selalu meningkatkan bukti kepemilikan tanah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bila status kepemilikan tanah sudah jelas akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Landak. Jenis peluang investasi yang masih terbuka lebar di Kabupaten Landak adalah investasi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pertanian.

#### 5) Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas



minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

**Tabel 2. 35 Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan RPPLH Kabupaten	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
3	Penanganan sampah (%)	63,00	77,00	74,01	74,94	76,14	76,21
4	Timbulan Sampah yang Ditangani (ton)	n/a	n/a	11.240,54	12.321,67	11.579,63	11.769,94
5	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan (perusahaan)	20	20	5	30	n/a	n/a
6	Indeks Kualitas Udara	96,27	97,61	94,11	95,03	95,32	95,36
7	Indeks Kualitas Air	57,79	58,38	50,00	53,00	55,00	55,00
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,87	48,87	32,48	32,62	34,09	35,71
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,19	66,35	64,04	65,56	66,75	67,12

Sumber: Lakip Kabupaten Landak 2018-2023

#### (a) Persentase Penanganan Sampah

Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Landak cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 63,00% menjadi 76,21% pada tahun 2023. Penyebab tidak tercapainya target 100% pada indikator ini dikarenakan masih terbatasnya anggaran dalam upaya peningkatan pengadaan alat-alat pengolah sampah, baik sampah yang dapat didaur ulang maupun sampah yang harus dimusnahkan, khususnya di daerah yang padat penduduk dan daerah terpencil.

#### (b) Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan adalah jumlah perusahaan wajib Izin Lingkungan yang telah diawasi berbanding dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Izin Lingkungan. Jumlah cakupan pengawasan terhadap Izin Lingkungan di Kabupaten Landak pada tahun 2018-2019 sebanyak 20 perusahaan, menurun di tahun 2020 sebanyak 5 perusahaan, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 30 perusahaan. Tahun 2020 hanya terdata 5 perusahaan karena adanya pandemik Covid-19 sehingga anggaran terpotong dan adanya surat edaran dari Bupati Landak agar tidak melakukan kegiatan di luar kantor.

#### (c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indeks yang menggambarkan kualitas lingkungan disuatu daerah. Komponen pembentuk indeks ini adalah indeks



kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Landak pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 masing masing sebesar 67,19; 66,35; 64,04; 65,56; 66,75; dan 67,12. Terjadi peningkatan IKLH setiap tahunnya menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup semakin membaik di Kabupaten Landak yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pada pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, telah mencantumkan tujuan Administrasi Kependudukan adalah mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali.

Guna mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan gratis untuk rakyat diwujudkan dalam pengurusan kartu tanda penduduk, akte, pengurusan pajak, dan izin-izin usaha. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan terpadu.

Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meskipun masih dalam tahap penyempurnaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Standar pelayanan yang telah diterapkan serta dukungan sistem kerja berbasis elektronik telah memperlancar pelaksanaan pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sampai pada tahun 2023 tetap berjalan. Hingga tahun 2023,



dari wajib e-KTP 291.677 jiwa yang sudah memiliki e-KTP berjumlah 269.286 jiwa, sehingga diperoleh realisasi sebesar 92,32%.

Kepemilikan penduduk ber-akta kelahiran diperoleh dari perhitungan jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir di Kabupaten Landak sebesar 91,95%, dimana masih terdapat 8,05% anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki akta lahir pada tahun 2023.

Kepemilikan pasangan Berakta Nikah diperoleh dari perhitungan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 32.312 akta di bagi dengan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan sebanyak 156.868 sehingga diperoleh realisasi sebesar 17,08% pada tahun 2023.

**Tabel 2. 36 Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kepemilikan e-KTP	106.373	103.911	102.035	100.610	266.276	269.286
2	Jumlah Wajib e-KTP	282.458	279.974	284.792	283.778	288.137	291.677
3	Penduduk Umur 0-17 ber-Akta Kelahiran (%)	n/a	n/a	82,69	80,72	93,05	93,40
4	Jumlah Penerbitan Akta Nikah	746	13.957	16.200	22.157	28.116	32.312
5	Persentase Penerbitan Akta Nikah (%)	n/a	n/a	9,76	24,18	15,10	17,08

Sumber: Data Prioritas Disdukcapil Kabupaten Landak, 2024

## 7) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Aspek pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Landak terdapat perkembangan yang positif dalam kurun waktu 2018-2023. Beberapa indikator dalam aspek tersebut menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun. Misalnya jumlah desa yang telah memiliki batas wilayah administrasi, namun masih terdapat 150 desa lagi yang belum memiliki batas administrasi yang ditetapkan. Demikian pula jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa, semula pada tahun 2021 hanya terdapat 98 desa, namun tahun 2023 meningkat menjadi 155 desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa. Status desa-desa juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, sudah terdapat 42 desa mandiri (bertambah 11 desa dibandingkan tahun 2022). Sementara desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada lagi pada tahun 2023.

Terkait data revitalisasi BUMDES didasarkan pada hasil pemeringkatan BUMDES menggunakan aplikasi baru yang dimulai tahun 2024 untuk menilai kinerja BUMDES, sehingga untuk data tahun 2023 seterusnya dibandingkan tahun sebelumnya



akan berbeda status dan sistem. Adapun aplikasi tersebut diterbitkan oleh Kemendes PDTT secara daring.

**Tabel 2. 37 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Keterangan	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	26	7	0	0	0	0
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	99	100	54	54	24	13
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa	21	39	63	63	71	60
4	Jumlah Desa Maju	Desa	7	6	26	26	31	42
5	Jumlah Desa Mandiri	Desa	3	5	5	13	30	41
6	Jumlah Desa yang telah memiliki batas wilayah administrasi	Desa	0	0	0	4	6	6
7	Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	Desa	n/a	n/a	n/a	98	138	155
8	Desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	%	n/a	n/a	n/a	90	95	0
9	Indeks Desa Membangun	Indeks	n/a	n/a	0,5802	0,9409	0,6926	0,7253
10	Jumlah BUMDES baru yang terbentuk	BUMDES	n/a	n/a	124	146	152	154
11	Jumlah revitalisasi BUMDES berkembang	BUMDES	0	0	0	1	5	11
12	Jumlah revitalisasi BUMDES maju	BUMDES	0	0	0	1	0	0
13	Jumlah revitalisasi BUMDES bersama berkembang	BUMDES	0	0	0	0	1	2
14	Jumlah revitalisasi BUMDES bersama maju	BUMDES	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemb. Desa Kabupaten Landak, 2024

## 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### (a) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Landak bertambah setiap tahunnya yang juga berbanding lurus dengan peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Pertambahan ini lebih dikarenakan jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Landak sebesar 1,70% per tahun pada periode 2020-2023.

**Tabel 2. 38 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Landak**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 2023	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023 (%)
1	Sebangki	20,21	0,82
2	Ngabang	82,87	1,86
3	Jelimpo	29,44	1,15
4	Sengah Temila	66,11	0,98
5	Mandor	34,55	0,84
6	Menjalin	22,58	0,82
7	Mempawah Hulu	41,91	1,27



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 2023	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023 (%)
8	Sompak	16,48	0,82
9	Manyuke	31,2	0,82
10	Banyuke Hulu	14,03	0,59
11	Meranti	10,91	0,73
12	Kuala Behe	17,45	1,27
13	Air Besar	25,85	0,57
Total		413,59	1,70

Sumber: BPS Kabupaten Landak, 2023

Penduduk di Kabupaten Landak terdistribusi di berbagai kecamatan, dengan angka populasi yang beragam. Kecamatan Ngabang memiliki jumlah penduduk tertinggi sekitar 82,87 ribu jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang signifikan sebesar 1,86% selama periode 2020-2023. Disusul oleh Sengah Temila dengan jumlah penduduk sekitar 66,11 ribu jiwa dan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,98%. Adapun Kecamatan Meranti merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Landak dengan sekitar 10,91 ribu jiwa dan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,73%. Jika diperhatikan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk selama periode 2020-2023, Kecamatan Meranti masih lebih unggul dibandingkan Kecamatan Banyuke Hulu dan Kecamatan Air Besar. Secara keseluruhan, distribusi penduduk di Kabupaten Landak mencerminkan variasi dalam pertumbuhan penduduk di berbagai kecamatan. Kecamatan Ngabang menjadi fokus utama dengan jumlah penduduk tertinggi dan tingkat pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa kecamatan lainnya menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil namun tetap berkontribusi terhadap populasi total di Kabupaten Landak.

Adapun rata-rata Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) di Kabupaten Landak mengalami penurunan, yaitu 2,90 pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,38. TFR erat kaitannya dengan angka kelahiran usia remaja (15-19 tahun) yang juga mengalami penurunan periode tahun 2020-2023 terhadap pendudukan wanita usia remaja. Hal ini juga didukung dengan kecenderungan peningkatan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan subur di Kabupaten Landak.

**Tabel 2. 39 Indikator Pertumbuhan Penduduk Desa di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

No	Keterangan	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	rata-rata	2,90	2,88	2,76	2,38
2	Angka Kelahiran Usia Remaja (15-19 Tahun)	Kelahiran per 10.00 wanita usia remaja	80,43	79,76	45,50	43,5



3	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	jumlah	59.032	58.117	58.867	58.876
4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	%	9,82	10,65	10,58	7,55

Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2024

## 9) Perhubungan

Bidang urusan perhubungan merupakan indikator kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi pada suatu daerah. Adapun sarana dan prasarana transportasi pada suatu daerah merupakan aspek dasar untuk meningkatkan mobilisasi dan konektivitas suatu daerah. Berikut merupakan indikator perhubungan di Kabupaten Landak periode tahun 2018-2023.

**Tabel 2. 40 Indikator Perhubungan Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	71.298	70.336	68.856	82.384	79.143	88.986
2	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis (buah)	1	1	1	1	1	1
3	Persentase layanan angkutan darat (%)	80	85	85	85	85	85
4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (rasio)	0,02	0,02	0,02	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (orang)	71.298	34.075	20.330	21.540	17.709	16.107
6	Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional (rasio)	47,24	47,24	47,24	54,03	53,5	53,5
7	Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan (%)	80	80	85	85	n/a	n/a
8	Level Keselamatan Transportasi (%)	85	85	90	90	n/a	n/a
9	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Memadai (%)	52,98	55,92	58,7	n/a	n/a	n/a
10	Persentase tersedianya angkutan umum, angkutan antar jemput yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan di dalam dan luar kabupaten (%)	n/a	53,85	53,85	53,85	53,85	n/a
11	Persentase tersedianya trayek angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)	8,33	8,33	8,33	8,33	n/a	69,23
12	Tingkat kecukupan pemenuhan kebutuhan terhadap terminal (%)	58,8	58,8	58,8	58,8	n/a	n/a
13	Tingkat kelayakan kondisi terminal (%)	58,8	58,8	58,8	58,8	n/a	n/a



No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	Jumlah penumpang angkutan darat selama satu tahun (orang)	71.298	70.336	56.914	53.051	17.709	16.347
15	Persentase Angkutan darat dibanding jumlah penumpang (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,1	0,2
16	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala (unit)	n/a	n/a	1.700	1.539	1.698	1.698
17	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (unit)	n/a	n/a	50	22	22	12
18	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (%)	n/a	n/a	0,1	0,1	0,1	0,1

Sumber: Data Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Landak, 2024

### 10) Komunikasi dan Informasi

Bidang urusan komunikasi dan informasi merupakan indikator untuk mengetahui jangkauan dan kualitas pelayanan yang di berikan pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Berikut indikator komunikasi dan informasi di Kabupaten Landak periode tahun 2020-2023.

**Tabel 2. 41 Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

No	Nama Data	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Layanan Aplikasi yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah	Jumlah	55	56	56	n/a
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	58	68	58	n/a
3	Menara Telekomunikasi	Jumlah	142	181	142	n/a
4	Website Domain	Jumlah	37	37	36	n/a
5	Subdomain	Jumlah	18	19	18	n/a
6	Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Jumlah	0	9	n/a	n/a
7	Infrastruktur Jaringan WAN	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Infrastruktur Jaringan LAN	Jumlah	31	44	31	n/a
9	Jumlah Server	Jumlah	3	3	3	n/a
10	Radio Komunikasi (Repeater/link) - Streaming Rapela 105,5 FM	Jumlah	0	1	n/a	n/a
11	Radio Komunikasi (Base Stasiun/RIG) - Rapela (Radio Pemerintah Kabupaten Landak)	Jumlah	1	1	n/a	n/a
12	Jumlah SPBE yang Dibangun dan Dikembangkan untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unit	0	0	61	n/a
13	Jumlah Website yang Dikelola dan Dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah	n/a	n/a	39	39
14	Persentase Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Layanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah	n/a	n/a	n/a	1



No	Nama Data	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
15	Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	Jumlah	n/a	n/a	n/a	1
16	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	2,6	2,6	2,6	2,6
17	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	n/a	n/a	75,00	75,00
18	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	1	1	1	1
19	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	1	1	1	1
20	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	1	1	1	1
21	Persentase Data Statistik yang Tersusun dengan Baik	%	1	1	1	1
22	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Dilakukan	Jumlah	0	0	0	4
23	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	%	0	0,6	0	0,6
24	Persentase Kelengkapan Metadata Variabel dari Kegiatan Statistik	%	0	0	0	0
25	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	n/a	40,34	53,07	90,73
26	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	0	0	0	0
28	Tersedianya peraturan daerah kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada
29	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Nama Data	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
	menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota					
30	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	21,48	51,23	86,18	91,53
31	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	ada
33	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah	0	0	0	0
34	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah	0	0	0	0
35	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah	0	0	0	4
36	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	2,6	2,6	2,6	2,6

Sumber: Data Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, 2024

## 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### (a) Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi di Kabupaten Landak memiliki iklim perkembangan yang tidak stabil namun cenderung positif pada periode tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Landak adalah 88,92% dari total koperasi yang berdiri yaitu 334. Ini menunjukkan peningkatan aktifitas koperasi sebesar 65,99% selama periode tahun 2018-2023.

**Tabel 2. 42 Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 (Unit)**

No	Kecamatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sebangki	7	6	6	6	6	8
2	Ngabang	104	87	85	98	117	132
3	Jelimpo	10	11	11	13	16	18
4	Sengah Temila	20	23	19	22	27	31
5	Mandor	12	12	10	11	16	18
6	Menjalin	7	8	7	9	10	18
7	Mempawah Hulu	14	13	11	12	14	22
8	Sompok	1	1	0	0	0	0



No	Kecamatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Menyuke	9	11	7	9	10	11
10	Banyuke Hulu	2	2	2	2	2	2
11	Meranti	7	7	6	6	6	7
12	Kuala Behe	8	10	9	10	10	12
13	Air Besar	18	18	18	18	18	18
Jumlah		196	209	191	216	252	297
Jumlah Koperasi Berdiri		n/a	n/a	238	267	294	334

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

Meskipun koperasi yang tidak aktif jumlahnya relatif kecil, namun upaya pembinaan kepada mereka tetap diperlukan agar tidak diikuti oleh koperasi lain yang aktif. Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab koperasi tidak aktif, yaitu antara lain:

1. Pembinaan koperasi yang lebih fokus pada koperasi aktif karena sulitnya berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif.
2. Berpindahnya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas usaha sendiri yang lebih menjanjikan karena memberikan kebebasan dan lepas dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.
3. Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan kualitas produk.
4. Minimnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi terganggu perkembangannya.
5. Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke perkebunan yang memaksa sebagian koperasi pertanian kehilangan aktivitas.

Dilihat dari jenis koperasi aktif di Kabupaten Landak pada tahun 2023, dari 297 koperasi yang ada, terdiri dari KUD sebanyak 14 unit, KPRR sebanyak 7 unit, KOPKAR sebanyak 6 unit, KOPPAS sebanyak 2 unit, dan lainnya sebanyak 268 unit.

**Tabel 2. 43 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2023 (Unit)**

No	Kecamatan	KUD	KPRR	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	Jumlah
1	Sebangki	1	0	0	0	7	8
2	Ngabang	5	2	4	2	119	132
3	Jelimpo	0	0	1	0	17	18
4	Sengah Temila	1	4	1	0	25	31
5	Mandor	1	0	0	0	17	18
6	Menjalin	1	0	0	0	17	18
7	Mempawah Hulu	2	0	0	0	20	22
8	Sompak	0	0	0	0	0	0
9	Menyuke	1	1	0	0	9	11
10	Banyuke Hulu	0	0	0	0	2	2
11	Meranti	1	0	0	0	6	7
12	Kuala Behe	0	0	0	0	12	12



No	Kecamatan	KUD	KPRR	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	Jumlah
13	Air Besar	1	0	0	0	17	18
Jumlah		14	7	6	2	268	297

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

### (b) Jumlah UMKM

Selama periode tahun 2018-2022, jumlah UMKM di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif yang menunjukkan iklim usaha di Kabupaten Landak belum stabil. Bila dilihat dari perkembangan jenis usahanya, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar pada usaha kecil dan menengah pada tahun 2019, sedangkan untuk usaha mikro cenderung lebih stabil perkembangannya.

**Tabel 2. 44 Perkembangan UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Jenis UMKM	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usaha Mikro (unit)	302	2.177	19.913	n/a	n/a	n/a
2	Usaha Kecil (unit)	n/a	n/a	600	269	492	713
3	Usaha Menengah (unit)	n/a	184	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah		n/a	3.500	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2024

## 12) Penanaman Modal

### (a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan realisasi jumlah investor berskala nasional dalam lima tahun terakhir ini di Kabupaten Landak cukup memadai, yaitu dari 98 investor tahun 2021 menjadi 1.224 investor pada tahun 2022.

**Tabel 2. 45 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

Tahun	PMDN + PMA
2019	136
2020	56
2021	98
2022	1.224
2023	n/a

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kab. Landak, Tahun 2023

### (b) Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Landak ternyata belum diikuti pula dengan realisasi investasinya. Realisasi investasinya mengalami fluktuasi dan meningkat kembali di tahun 2022.











**Tabel 2. 46 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Landak (Miliar Rp) Tahun 2019-2023**

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PMA	640,00	81,62	700,00	119,25	770,00	221,00	1.040,00	n/a	n/a	174,06
PMDN	780,00	176,21	860,00	122,76	950,00	479,74	850,00	n/a	n/a	1.624,53
Total	1.420,00	257,83	1.560,00	242,01	1.720,00	700,78	1.890,00	1.546,72	514,03	1.798,59

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Landak, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan realisasi investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Landak yang pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, namun tahun 2021 kembali meningkat hingga ke tahun-tahun selanjutnya. Secara total realisasi investasi yang dicapai pada tahun 2023 melebihi target investasi yang ingin dicapai yaitu sebesar 514,03 miliar rupiah. Hal ini merupakan langkah positif dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah mencapai target investasi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Landak pun sebagian besar di sektor primer terutama tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan yang menjadi potensi kabupaten.

Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	Industri Makanan	Pertambangan	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran
			
Rp.903.271.060.000,-	Rp.648.421.660.000,-	Rp.215.575.980.000,-	Rp.21.703.000.000,-
Perdagangan dan Reparasi	Konstruksi	Listrik, Air, dan Gas	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi
			
Rp.8.239.100.000,-	Rp.1.290.400.000,-	Rp.73.200.000,-	Rp.21.980.000,-
Total 1.798.596.380.000			

**Gambar 2. 20 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor di Kabupaten Landak Tahun 2023**

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kab. Landak, Tahun 2024

### 13) Pemuda dan Olahraga

Hasil Sensus Penduduk 2023 menunjukkan terdapat potensi pemuda yang produktif (umur 15-40 tahun) sebanyak 178.171 jiwa (43,08%) di Kabupaten Landak. Aktivitas kepemudaan juga beragam, berdasarkan hasil Data Prioritas Disporapar Kabupaten Landak terdapat 83 organisasi pemuda sebagai wadah penyaluran potensi pemuda produktif yang dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Kabupaten Landak



juga telah menciptakan atlet-atlet dari kegiatan kepemudaan dan olahrag, namun perlu adanya kontribusi dalam peningkatan kualitas para atlet dimana hanya terdapat 4,94% atlet yang berprestasi dari total atlet yang dimiliki daerah. Secara keseluruhan perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Landak cenderung baik karena terdapat perkembangan positif tiap tahunnya.

Aktivitas kepemudaan di Kabupaten Landak dapat tersalurkan dengan berbagai aktivitas olahraga. Sarana dan fasilitas olah raga, meskipun jumlahnya terbatas, namun sudah tersedia, seperti lapangan voli, lapangan sepak bola lapangan basket, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, dan kolam renang. Jumlah ini masih perlu ditingkatkan jika mengingat luas wilayah serta sebaran penduduk yang ada. Jika dibandingkan prasarana olahraga dengan klub olahraga, jumlahnya masih belum sebanding.

**Tabel 2. 47 Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	62	70	83	83	83	83
2	Jumlah Atlet	32	70	70	70	129	162
3	Jumlah Atlet Berprestasi	2	1	0	0	6	8
4	Jumlah Pelatih Bersertifikat	38	105	105	105	105	105

*Sumber: Data Prioritas Disporapar Kabupaten Landak, 2024*

#### 14) Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat dan mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan seperti untuk pengembangan usaha, penelitian dan keperluan lainnya. Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Penyajian data yang terstruktur tersebut dapat dilihat dalam publikasi buku yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya, dimana data yang tersedia dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan, serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, risiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan.



Ketersediaan dokumen daerah dalam angka mengindikasikan bahwa pengelolaan basis data wilayah berjalan dengan baik. Basis data dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak data penting yang diperlukan dalam proses pembuatan rencana pengembangan wilayah dari berbagai sektor seperti misalnya kependudukan, geografi dan lain sebagainya.

Dokumen PDRB skala daerah, yaitu PDRB menurut lapangan usaha. Dokumen PDRB menurut lapangan usaha berisi data PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi (jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit-unit produksi). Karena publikasi PDRB tidak hanya satu tahun data, maka penghitungan publikasi dalam laporan ini didasarkan pada ketersediaan data yang ada, bukan pada tahun publikasinya.

**Tabel 2. 48 Indikator Statistik di Kabupaten Landak Tahun 2018-20223**

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Buku Kabupaten dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2024*

## 15) Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan persandian merupakan urusan yang berdiri sendiri sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pengamanan informasi pada era digital sekarang ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Era keterbukaan dan terkoneksi sistem jaringan di Kabupaten Landak menjadikan informasi rentan terhadap potensi serangan cyber. Insiden cyber merupakan kejadian yang mengganggu berjalannya sistem elektronik, misalnya serangan virus, pencurian data, informasi pribadi, hak kekayaan intelektual perusahaan, web defacement dan gangguan akses terhadap layanan elektronik.

Adapun urusan persandian di Kabupaten Landak berkaitan dengan tingkat keamanan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah. Secara keseluruhan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Landak telah sesuai dengan standar dari Pemerintah Pusat, bahkan terdapat beberapa sistem informasi yang terintegrasi langsung dengan Pemerintah Pusat. Namun secara tingkat keamanan di Pemerintah Daerah cenderung rendah yaitu hanya sekitar 24,84%



dalam 4 tahun terakhir, meski demikian terdapat peningkatan tiap tahunnya. Kabupaten Landak juga belum memiliki sumber daya manusia yang tersertifikasi kompeten secara resmi untuk pengelolaan sistem informasi yang ada.

**Tabel 2. 49 Indikator Persandian di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	23,1	23,72	24,03	28,52
2	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik	%	23,1	23,72	24,03	28,52
3	Persentase ASN Pengelola TIK Yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	%	0	0	0	0

*Sumber: Data Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, 2024*

## 16) Kebudayaan

Indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya digunakan untuk mengukur sejumlah aktifitas yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik perkembangan seni dan budaya daerah. Indikator ini sangat penting terutama untuk menjelaskan adanya perhatian daerah dalam menunjang bidang ekonomi pariwisata berbasis seni dan budaya. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Landak periode tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yaitu 1 festival menjadi 4 festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya menjadi wadah bagi grup kesenian yang terdapat di Kabupaten Landak untuk unjuk kemampuan dan memperkenalkan budaya ke khalayak umum. Adapun jumlah grup kesenian di Kabupaten Landak mengalami perkembangan positif hingga tahun 2023 berjumlah 70 grup, dengan 26 diantara merupakan grup kesenian Seni Dayak yang merupakan suku asli dan dominan yang hidup di Kabupaten Landak.

Indikator pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya merupakan tolok ukur dalam melihat adanya jaminan perhatian dalam usaha pelestarian benda peninggalan peradaban masa lalu. Persentase benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Landak adalah 100%, dimana terdapat 29 benda, situs, atau kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan di Kabupaten Landak. Pemerintah tetap perlu meningkatkan kinerja dalam pengamanan benda, situs, atau kawasan cagar budaya mengingat masih terdapat 70 benda, situs, atau kawasan cagar budaya yang diinventarisasikan di Kabupaten Landak. Pelestarian ini berfungsi dalam mendukung perkembangan ilmu dan pengetahuan, serta budaya.



**Tabel 2. 50 Indikator Kebudayaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	1	2	3	4
2	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah	39	45	70	70
3	Jumlah Kesenian Seni Dayak	Jumlah	26	26	26	26
4	Jumlah Benda, Situs, atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	24	24	25	29
5	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	Jumlah	58	64	70	70
6	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan (Penyebarlusasan, Pengkajian, dan Penayaan Keberagaman)	Jumlah	58	64	70	70
7	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	Jumlah	58	64	70	70

Sumber: Data Prioritas Disporapar Kabupaten Landak, 2024

### 17) Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Landak. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

**Tabel 2. 51 Indikator Perpustakaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Pengelola dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Dibina	Orang	61	62	231	40
2	Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	1,06	0,49	0,79	0,69
3	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan (Sudah Termasuk e-Book)	Judul	7.079	8.305	8.305	8.415



No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
4	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Kategori	n/a	n/a	n/a	Sedang (49,73)
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Kategori	0	0	Sedang (68,63)	Sedang (51,46)
6	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	4227	1979	3203	2799
7	Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan	Eksemplar	0	0	0	3
8	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1 : 56,16	1 : 48,29	1 : 48,81	1 : 48,17
9	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	0	0	0,27	2,68
10	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1 : 6518	1 : 6469	1 : 1755	1:4455
11	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	0	0	31,46	13,79
13	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Eksemplar	n/a	n/a	n/a	3
14	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Eksemplar	n/a	n/a	n/a	2
15	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Judul	41	41	41	57

Sumber: Data Prioritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2024

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Landak mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan persentase atau jumlah pengunjung, serta indeks pembangunan literasi masyarakat. Pada Tahun 2023 persentase atau jumlah pengunjung dan indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selama periode 4 tahun perkembangan tersebut cenderung menurun dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan perlunya fokus upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas dan keinginan membaca masyarakat karena fasilitas membaca telah terus berkembang tiap tahunnya.

## 18) Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa



tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

**Tabel 2. 52 Indikator Kearsipan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kategori	Baik (65,50)	Kurang (48,00)	Cukup (54,72)	Sangat Baik (74,71)
2	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip secara Baku	%	33	n/a	n/a	5,26
3	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Pegawai	5.100	n/a	n/a	77
4	Persentase Ketersediaan Arsip Daerah Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban	%	0	45,02	59,12	36,21
5	Persentase Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	%	0	0	0	50%
6	Jumlah Unit Kearsipan yang Dibina	UK	39	38	38	38
7	Jumlah Pengguna Layanan Akses Arsip Statis Terbuka	jumlah	0	0	0	8
8	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	0	44,08	26,02	75,15
9	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	0	36,00	100	1,53
10	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	0	0	0	67,43%
11	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	0	0	0	0,28%
12	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	0	0	0	100%
13	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	jumlah	0	0	0	0
14	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	jumlah	0	0	0	0
15	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang	jumlah	0	0	0	0



No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
	dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK					
16	Pencarian arsip statis yang Pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	%	0	0	0	100%
17	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	%	0	0	0	100%

Sumber: Data Prioritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2024

### 2.1.3. C. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Landak. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

#### 1) Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan), dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Indikator utama yang diperhatikan pada bidang urusan kelautan dan perikanan adalah produksi perikanan dan konsumsi ikan. Produksi perikanan yang dimaksud



merupakan perbandingan antara jumlah produksi perikanan terhadap target daerah. Sedangkan konsumsi ikan yang dimaksud merupakan perbandingan antara jumlah konsumsi ikan terhadap target daerah (kg) dikalikan 100. Tiap tahunnya perkembangan kedua indikator di Kabupaten Landak cenderung menurun pada tahun 2018 hingga 2021, dan mulai mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun pertumbuhannya tidak signifikan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pada sektor perikanan. Berikut perkembangan indikator bidang urusan perikanan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023.

**Tabel 2. 53 Indikator Perikanan Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Perikanan	ton	1.323,95	1.059,88	1.040,42	1.084,13	1.251,82	1.383,55
2	Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	35.58	34.18	35,78	33,50	47,33	n/a
3	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	orang	n/a	n/a	307	363	531	320
4	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar yang di Produksi	ekor	n/a	n/a	12.229.647	14.754.913	16.810.000	17.076.268

*Sumber: Data Prioritas Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, 2024*

## 2) Pariwisata

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Landak adalah dengan melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Landak. Terdapat beberapa lokasi objek wisata di Kabupaten Landak seperti air terjun, sungai berbatu, keraton atau sekadar taman bermain.

**Tabel 2. 54 Indikator Pariwisata di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kunjungan wisatawan (jiwa)	55.295	96.477	24.119	59.977	87.249	88.522



No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah lokasi wisata yang ada	30	30	30	30	30	30
3	Jumlah objek wisata potensial yang dikembangkan	30	30	30	30	30	30
4	PAD sektor pariwisata (miliar rupiah)	n/a	2,54	1,93	2,68	3,49	3,62

Sumber: Data Prioritas Disporapar Kabupaten Landak, 2024

Terjadi peningkatan kunjungan wisata yang melonjak di tahun 2019, kemudian terjadi penurunan kunjungan wisata pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan kunjungan wisata yang terjadi pada tahun 2020 dapat diprediksikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, namun kondisi ini terus pulih pada tahun-tahun selanjutnya. Secara keseluruhan jumlah kunjungan wisata normal ke Kabupaten Landak ada berkisar 60 ribuan jiwa. Berikut ini disajikan beberapa objek wisata alam, sejarah maupun budaya di Kabupaten Landak. Peningkatan jumlah wisatawan juga dipengaruhi pengadaan festival budaya dan seni, atau kegiatan keagamaan, selain itu objek wisata alam di Kabupaten Landak yang sangat banyak dan indah. Potensi ini perlu dikelola oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat lokal untuk meningkatkan PAD sektor pariwisata.

**Tabel 2. 55 Objek Wisata Alam di Kabupaten Landak**

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari Ngabang	Jarak dari Pontianak	Sarana Angkutan
1.	Air Terjun Panga'ak	Desa Antan Rayan, Kec. Ngabang	45	229	Pribadi
2.	Air Terjun Angan Tembawang	Jelimpo, Kec. Jelimpo	35	219	Pribadi
3.	Air Terjun Sentagung	Desa Mungguk, Kec. Ngabang	20	204	Pribadi
4.	Air Terjun Banangar	Desa Perbua, Kec. Air Besar	71	253	Pribadi
5.	Air Terjun Remabo	Desa Skendal, Kec. Air Besar	67	249	Pribadi
6.	Riam Jambu	Desa Jambu, Kec. Air Besar	61	243	Pribadi
7.	Goa Kelelawar	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	70	252	Pribadi
8.	Goa Sanjan	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	70	252	Pribadi
9.	Air Terjun Morban	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	68	250	Pribadi
10.	Air Terjun Entilis	Desa Merayuh, Kec. Air Besar	72	254	Pribadi
11.	Air Terjun Trinting	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	90	272	Pribadi
12.	Air Terjun Ringin	Desa Sepangah	80	262	Pribadi
13.	Air Terjun Ampar Ensot	Desa Merayuh	70	252	Pribadi
14.	Air Terjun Ampar Jawa	Desa Antan Rayan	85	267	Pribadi



No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari Ngabang	Jarak dari Pontianak	Sarana Angkutan
15.	Pagung Banban	Desa Merayuh	80	262	Pribadi
16.	Danau Niut	Desa Bentiang	90	272	Pribadi
17.	Air Terjun Badawat	Desa Dange Aji	85	276	Pribadi
18.	Air Terjun Pelayong	Desa Bentiang	70	252	Pribadi
19.	Riam Sabadak	Desa Keranji Birah Sebatih	40	149	Pribadi
20.	Panorama Gunung Sehak	Desa Polo'ant/Asong Kec. Sengah Temila	35	135	Pribadi
21.	Riam Solakng	Senakin	57	125	Pribadi
22.	Air Terjun Tikalong	Desa Tunang	119	123	Pribadi
23.	Bukit Marabukatn	Desa Bandol, Untang Kec. Banyuke Hulu	90	150	Pribadi
24.	Air Merah	Desa Munggu, Kec. Ngabang	23	205	Pribadi
25.	Riam Panjang	Desa Munggu, Kec. Ngabang	24	206	Pribadi
26.	Riam Sebebat	Desa Munggu, Kec. Ngabang	25	207	Pribadi
27.	Tanjung Selipat (Dara Itam)	Desa Semedang, Kec. Kuala Behe	35	217	Pribadi
28.	Bukit Padang	Desa Pakumbang, Kec. Sompak	45	124	Pribadi
29.	Bukit Tiang	Desa Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu	67	127	Pribadi
30.	Riam Siname	Desa Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu	67	127	Pribadi
31.	Saka Empat	Desa Tapakng, Kec. Sompak	64	125	Pribadi
32.	Jajajk Buru	Desa Gombang. Kec. Sengah Temila	54	142	Pribadi
33.	Hutan Babut	Desa Dara Itam, Kec. Jelimpo	27	191	Pribadi
34.	Goa Andu	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	50	240	Pribadi
35.	Riam Stiin	Desa Tenguwe, Kec. Air Besar	105	288	Pribadi
36.	Goa Simiret	Desa Bentiang, Kec. Air Besar	198	381	Pribadi
37.	Air Terjun Kane/Engkanan	Desa Bentiang, Kec. Air Besar	103	286	Pribadi
38.	Air Terjun Madis	Desa Sempatung, Kec. Air Besar	128	311	Pribadi
39.	Air Terjun Kejato Unga	Desa Dange Aji, Kec. Air Besar	87	270	Pribadi
40.	Riam Terisitn	Desa Anik, Kec. Menyuke	30	183	Pribadi
41.	Riam Kuru	Desa Temahar, Kec. Jelimpo	35	215	Pribadi
42.	Air Terjun Melancar	Desa Kampet, Kec. Banyuke Hulu	85	238	Pribadi
43.	Riam Labur	Desa Kayu Ara, Kec. Jelimpo	30	213	Pribadi
44.	Riam Selane	Desa Muun, Kec. Ngabang	70	255	Pribadi
45.	Riam Sentaguk	Desa Muun, Kec. Ngabang	71	256	Pribadi
46.	Bukit Sabu Enek	Desa Amboyo Selatan, Kec. Ngabang	25	157	Pribadi
47.	Bukit Sumpit	Desa Pawis, Kec. Jelimpo	20	194	Pribadi
48.	Danau Mengkadikng	Desa Temiang Sawi, Kec. Ngabang	17	197	Pribadi
49.	Riam Ebong	Desa Pahuman, Kec. Sengah Temila	40	137	Pribadi



No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari Ngabang	Jarak dari Pontianak	Sarana Angkutan
50.	Cagar Alam Gunung Niut	Kecamatan Air Besar	128	311	Pribadi

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 2024

Selain objek wisata alam, terdapat pula objek wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Landak sebagai berikut.

**Tabel 2. 56 Objek Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Landak**

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari Ngabang	Jarak dari Pontianak	Sarana Angkutan
1.	Keraton Ismahayana	Desa Raja, Kec. Ngabang	2	183	Pribadi
2.	Makam Raja Landak	Desa Raja, Kec. Ngabang	3	184	Pribadi
3.	Makam Juang Mandor	Mandor, Kec. Mandor	89	95	Umum
4.	Makam Pak Kasih	Desa Sidas, Kec. Sengah Temila	30	147	Umum
5.	Rumah Betang	Desa Saham, Kec. Sengah Temila	40	142	Pribadi
6.	Makam Abdul Kahar	Desa Munggu, Kec. Ngabang	20	181	Pribadi
7.	Tugu Lan Fang	Desa Mandor, Kec. Mandor	89	95	Umum

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 2024

### 3) Pertanian dan Perkebunan

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari. Pada tahun 2021, sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling mendominasi untuk struktur perekonomian di Kabupaten Landak yaitu sebesar 36,13 dalam pembentukan PDRB.

**Tabel 2. 57 Indikator Pertanian di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB (%)	35,22	35,78	36,13	20,85	20,31
2	Produksi sektor pertanian (ton)	102.856,61	102.913,70	104.417,84	126.836,86	327.011,91
3	Produksi sektor perkebunan (ton)	252.428	248.967	244.313	n/a	n/a



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	35,86	36,63	39,19	30,28	30,84
5	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	86,52	90,24	93,80	109,28	87,47
6	Nilai Tukar Petani (satuan)	93,86	96,92	96,00	97,57	n/a
7	Jumlah Produktivitas Perkebunan Karet (Kg/Ha/thn)	508,10	400,94	406,61	750,00	n/a
8	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Kg/Ha/thn)	1.721,55	1.721,68	1.609,37	1.152,00	n/a
9	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kopi (Kg/Ha/thn)	210,00	201,00	201,00	1.486,00	n/a
10	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kakao (Kg/Ha/thn)	224,90	124,91	128,52	842,00	n/a
11	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kemiri (Kg/Ha/thn)	571	1.428	1.428	304	n/a

Sumber: Data Prioritas Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, 2024; Kabupaten Landak dalam Angka, 2017-2024; dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Landak, 2021

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relatif mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 2023. Hasil pertanian yang dominan di Kabupaten Landak masih berupa padi dan jagung setiap tahunnya. Pada bidang perkebunan, terdapat beberapa tanaman perkebunan utama di Kabupaten Landak di antaranya karet, kopi, kemiri, kakao dan kelapa sawit. Kopi merupakan komoditas perkebunan yang paling tinggi jumlah produktivitasnya pada tahun 2022 sebesar 1.486,00 kg/Ha/tahun.

**Tabel 2. 58 Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No.	Jenis	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Padi	Kw/Ha	37,96	35,86	36,63	39,19	317.426,1 ton	n/a
2.	Jagung	Kw/Ha	48,62	55,27	66,25	n/a	45.248,4 ton	n/a
3.	Ubi Kayu	Kw/Ha	150,64	131,04	277,82	n/a	n/a	n/a
4.	Ubi Jalar	Kw/Ha	76,18	76,38	187,54	n/a	n/a	n/a
5.	Kedelai	Kw/Ha	7,05	9,02	0,00	n/a	n/a	n/a
6.	Kacang Tanah	Kw/Ha	16,11	17,90	12,22	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan, 2023

Terdapat perbedaan satuan data untuk produktivitas pangan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2021 dengan data di tahun 2022-2023. Secara umum pertumbuhannya produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Landak cenderung meningkat, terkecuali untuk kedelai dan kacang tanah.



#### 4) Kehutanan

Sumber daya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan serta mencegah timbulnya pemanasan global. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan hutan rakyat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Landak tahun 2014-2034, Kabupaten Landak mempunyai Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Dan Hutan Desa dengan luasan sebesar 15.776 Ha tersebar di seluruh desa di Kabupaten Landak.

#### 5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

**Tabel 2. 59 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Harga Berlaku Sektor Pertambangan (miliar rupiah)	253,20	263,43	287,23	289,81	282,98
2	Kontribusi Sektor Pertambangan (%)	2,40	2,45	2,47	2,27	2,07



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	2,85	0,63	5,18	-0,03	-3,31

Sumber: Kabupaten Landak dalam Angka, 2020-2024

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2018 hingga 2023 bersifat fluktuatif. Dimana mengalami penurunan di tahun 2019 hingga 2020 dan 2021 hingga 2023, peningkatan terjadi pada tahun 2021. Laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2023 turun sebesar -3,31%. Pengembangan sektor pertambangan sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor PDRB. Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan juga dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 6) Perdagangan

### (a) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi terbesar kedua (setelah sektor pertanian) terhadap PDRB Kabupaten Landak.

Pada tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Landak berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 2.062,93 miliar rupiah. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Landak tahun 2023 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 13.684,30 miliar rupiah. Dengan demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Landak pada tahun 2023 sebesar 15,08%. Kontribusi dan pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Landak tampak fluktuatif dari tahun ke tahun dengan nilai kontribusinya berkisar 14% hingga 15%. Artinya, perekonomian daerah tidak mengalami perubahan struktur ekonomi. Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada beberapa tahun ke depan adalah bagaimana meningkatkan kontribusi tersebut agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya sehingga besaran kontribusi sektor perdagangan bisa mendekati angka 15,50%.

**Tabel 2. 60 Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Harga Berlaku Sektor Perdagangan (miliar rupiah)	1.572,53	1.556,52	1.627,05	1.902,87	2.062,93
2	Kontribusi Sektor Perdagangan (%)	14,91	14,49	14,01	14,89	15,08



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	5,43	-4,43	3,77	12,39	7,22

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2020-2024

### (b) Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Landak yang mencakup kelompok usaha atau pedagang informal. Adapun jumlah kelompok pedagang informal yang ada menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Namun tidak dengan kelompok usaha informal, terlihat tidak ada kelompok yang terbentuk tiap tahunnya.

**Tabel 2. 61 Cakupan Bina Kelompok Pedagang di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

No	Jenis Kelompok	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelompok Usaha Informal	0	0	0	n/a	n/a
2	Kelompok Pedagang Informal	569	577	589	n/a	n/a
Jumlah		569	577	589	n/a	n/a

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2024

### (c) Fasilitas Perdagangan

Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang. Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya.

Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan di Kabupaten Landak pada tahun 2022 terdapat 1.338 unit fasilitas penunjang yang terdiri dari 614 unit toko, 56 unit minimarket, 261 unit kios, dan 407 unit warung. Namun persebarannya yang belum merata di Kabupaten Landak, sebaran fasilitas umumnya lebih banyak tersebar pada pusat-pusat kawasan di kabupaten. Adapun fasilitas ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

**Tabel 2. 62 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

No.	Sarana Perdagangan (Unit)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Toko	326	529	614	614	617
2	Minimarket	17	22	32	56	60
3	Kios	251	261	261	261	271
4	Warung	130	338	407	407	463
Jumlah		724	1.150	1.314	1.338	1.411

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2024

## 7) Perindustrian

### (a) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor/lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Landak setelah



sektor pertanian dan sektor perdagangan. Pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Landak berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 1.450,40 miliar rupiah. Dengan demikian, diketahui bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Landak mengalami peningkatan pada periode tahun tersebut. Namun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Landak bersifat fluktuatif dan di tahun 2023 pertumbuhannya menurun dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2. 63 Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Harga Ber laku Sektor Industri (miliar rupiah)	1.187,36	1.195,79	1.321,50	1.441,93	1.450,40
2	Kontribusi Sektor Industri (%)	11,25	11,13	11,38	11,29	10,60
3	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	4,80	-0,97	5,75	3,37	2,73

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2020-2024

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Di Kabupaten Landak, ternyata perkembangan sektor industri di Kabupaten Landak relatif fluktuatif dan lambat. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan infrastruktur, seperti listrik, air bersih, dan jalan. Akibatnya, daerah ini sangat tergantung pada produksi komoditi primer sektor pertanian dan perkebunan dan tidak mampu menikmati nilai tambah besar dari ketersediaan sektor industri. Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan beberapa tahun ke depan adalah bagaimana mempercepat ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi sektor industri agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya, sehingga kontribusi sektor industri pengolahan bisa mendekati 12,00%.

**(b) Jumlah Industri Kecil Menengah**

Perkembangan industri di Kabupaten Landak tercermin pada peningkatan kegiatan usaha industri kecil menengah, dimana jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Landak pada tahun 2021 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

**Tabel 2. 64 Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Landak, Tahun 2019-2023**

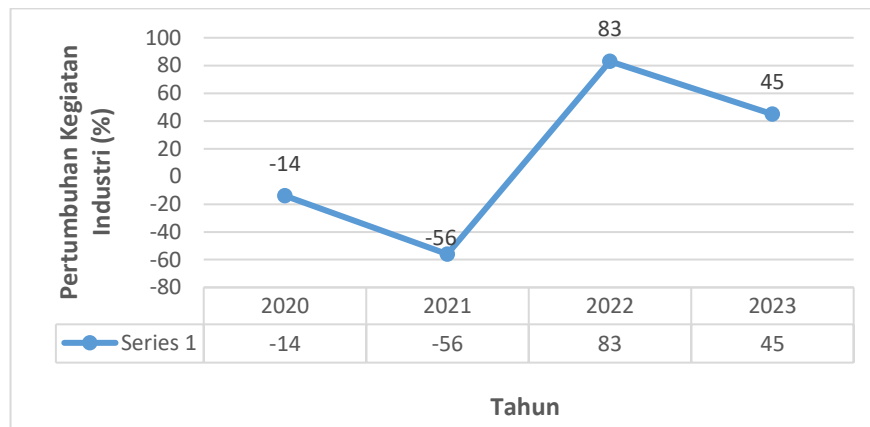
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Kecil Menengah (Unit)	269	600	269	492	713

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2024

Dilihat dari persebarannya, sebagian besar kegiatan usaha kegiatan industri kecil menengah terkonsentrasi di Kecamatan Ngabang, Kecamatan Meranti, dan Kecamatan



Mandor. Adapun secara keseluruhan, pertumbuhan kegiatan industri di Kabupaten Landak tiap tahunnya mengalami peningkatan tiap tahunnya.



**Gambar 2. 21** Pertumbuhan Kegiatan Industri di Kabupaten Landak Tahun 2020-2023

*Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2024*

**(c) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Landak, telah diidentifikasi dan diinventarisasi berbagai Sentra IKM dan pembinaan kelompok pengrajin. Sampai tahun 2022, terdapat 1 kawasan industri. Sedangkan jumlah kelompok bina pengrajin bersifat fluktuatif, dimana terjadi peningkatan pada tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Hal ini diprediksikan akibat dampak Covid-19. Sampai dengan Tahun 2023 pembinaan terhadap pengrajin relatif kecil dikarenakan keterbatasan pendanaan.

**Tabel 2. 65** Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelompok Bina Pengrajin (Orang)	600	301	301	492	713

*Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2024*

**2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2023 dan Realisasi RPD 2023-2026**

Evaluasi merupakan satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Evaluasi ini menggunakan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/ kegiatan.

Hasil evaluasi RKPD tahun lalu memberikan gambaran kinerja masing-masing program dan kegiatan seluruh perangkat daerah. Data tersebut menyajikan realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sepanjang Tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan pertimbangan arah kebijakan,



misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacuper kembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

RPD Kabupaten Landak memiliki periode perencanaan pembangunan mulai Tahun 2023 sampai dengan 2026, RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari periode RPD, Hasil evaluasi RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.66 ebagao berikut :



Tabel 2. 66 Iklim Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPD Kabupaten Landak pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Landak Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Landak yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten Landak s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten Landak s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						I		II		III		IV													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																									
01.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	84,7	Persen	891.561.280.000	84,55	232.361.928.711			31.603.596.577			80.285.685.437			38.536.490.863			66.988.011.737	0	217.413.784.614	0	217.413.784.614	0,00%	24,39%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentasi meningkatnya pemerataan mutu pada jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs	78	Persen	441.740.186.000	75	13.219.952.229						2.625.046.454			7.355.163.528			3.139.215.191	0	13.119.425.173	0	13.119.425.173	0,00%	2,97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	78	Persen	649.446.000															0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentasi meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	78	Persen	300.000.000	75	191.277.621.535			1.703.550.108			47.363.654.103			90.106.138.756			49.749.503.845	0	188.922.846.812	0	188.922.846.812	0,00%	62974,28 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentasi meningkatnya pelayanan dalam upaya pengendalian perizinan pendidikan	78	Persen	150.000.000															0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.06 PROGRAM	Presentasi meningkatnya	79	Persen	627.545.000															0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan



PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	satuan pendidikan dalam menerapkan bahasa dan sastra																				dan Kebudayaan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																					
01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	272.320.783.000	100	81.043.428.830	21	11.056.236.622	28	24.447.584.230	0,52	14.873.227.211	0,333	23.473.403.090	49,85	73.850.451.153	49,85	73.850.451.153	49,85%	27,12%	Dinas Kesehatan
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100	Persen	485.879.916.000	100	121.397.853.966		381.422.411	5	24.428.915.227	16	32.094.476.193	51	56.824.651.393	72	113.729.465.224	72	113.729.465.224	72,00%	23,41%	Dinas Kesehatan
01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terwujudnya Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	16	Puskesmas	428.373.000	16	417.870.398		3.512.500	4	60.093.706	12	55.307.374	4	283.491.734	20	402.405.314	20	402.405.314	125,00%	93,94%	Dinas Kesehatan
01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Teroptimisasinya Upaya Pelayanan Kesehatan	100	Persen	153.020.000											0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan
01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas kesehatan Promosi kesehatan	100	Persen	918.702.000	100	625.728.193		22.255.800		80.756.000		122.708.000		396.136.730	0	621.856.530	0	621.856.530	0,00%	67,69%	Dinas Kesehatan
01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan	100	Persen	100.089.894.000	100	25.619.180.544	5	347.022.212	30	428.317.520		471.649.004		23.184.865.324	35	24.431.854.060	35	24.431.854.060	35,00%	24,41%	Rumah Sakit Umum Daerah



	keuangan/aset																				
01.02.02 PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100	Persen	120.427.107.000	100	3.051.402.300		6.777.750	30	91.502.750		292.141.823		610.914.457	30	1.001.336.780	30	1.001.336.780	30,00%	0,83%	Rumah Sakit Umum Daerah
01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terwujudnya Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan					121.139.300				28.719.600		56.487.343		15.064.700		100.271.643		100.271.643	0,00%	0,00%	Rumah Sakit Umum Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
01.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatkan evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	38.355.493.100	100	9.949.414.668	13,31	1.324.844.116	33,38	3.321.188.134	21,04	2.094.004.436	27,98	2.784.798.321	95,73	9.524.835.007	95,73	9.524.835.007	95,73%	24,83%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Meningkatnya Ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber daya air	45,89	Persen	12.087.845.000	41,72	7.212.949.800	0,615	106.354.205	6,777	1.171.841.212	13,48	2.330.836.772	20,58	3.559.515.783	41,46	7.168.547.972	41,46	7.168.547.972	90,35%	59,30%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan
01.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	80,49	Persen	49.864.192.800	77,49	31.097.239.728	0,12	49.574.600	10,44	4.192.707.800	35,21	14.130.287.058	30,72	12.330.383.343	76,504	30.702.952.801	76,504	30.702.952.801	95,05%	61,57%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan



01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Persampahan	80,49	Persen	5.108.583.200	14,06	50.000.000						14,02	49.871.000	14,02	49.871.000	14,02	49.871.000	17,42%	0,98%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	
01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan sistem pengelolaan air limbah/sanitasi layak (%)	64,55	Persen	22.339.285.000	60,05	19.392.035.090		0,49	158.402.055	30,13	9.731.041.090		9.271.634.045	30,624	19.161.077.190	30,624	19.161.077.190	47,44%	85,77%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	
01.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman (Luas Kawasan Target Yang Ditangani /HA)	4	Hektar	5.770.248.000	1	1.512.855.783		5.449.700	34.148.100		11.655.000	0,067	1.365.407.784	0,067	1.416.660.584	0,067	1.416.660.584	1,68%	24,55%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	
01.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	85,5	Persen	75.186.744.600	76,45	6.853.776.400				0,05	4.689.750	71,76	6.696.618.400	71,81	6.701.308.150	71,81	6.701.308.150	84,00%	8,91%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Kecamatan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan	20	Persen	25.940.495.700	5	4.711.438.550	0,03	24.844.700	1,089	1.026.761.900	2,291	107.970.975		3.534.884.272	3,411	4.694.461.847	3,411	4.694.461.847	17,06%	18,10%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	84	Persen	862.025.000	69	1.882.096.000	0,27	7.430.000	0,91	24.575.620	39,47	742.944.700		1.106.604.000	40,65	1.881.554.320	40,65	1.881.554.320	48,40%	218,27%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Jalan kondisi mantab	51,88	Persen	355.276.307.700	50,38	56.865.173.842	0,056	63.527.254	4,027	4.545.482.734	16,25	18.343.374.040	28,81	32.525.682.651	49,15	55.478.066.679	49,15	55.478.066.679	94,74%	15,62%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	100	Persen	1.229.072.300	50	208.581.604	3,888	16.222.100	10,01	41.771.200	14,392	60.038.100	21,51	89.770.300	49,813	207.801.700	49,813	207.801.700	49,81%	16,91%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggara Penataan Ruang	21,41	Persen	2.119.294.400	15,65	143.218.867	1,196	10.950.588	5,165	47.275.800	8,453	77.361.010		5.465.300	14,81	141.052.698	14,81	141.052.698	69,20%	6,66%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang di Rehabilitasi dan di Relokasi	105	Unit Rumah	164.864.000	100	460.846.800	1,236	5.696.300	27,89	128.544.705	32,83	151.307.950		173.860.196	61,96	459.409.151	61,96	459.409.151	59,01%	278,66%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan



01.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penyediaan Rumah layak huni yang berhasil ditangani	12	Dokumen	50.176.382.200	100	196.034.090	3,889	7.625.000	32,99	64.677.700	33,98	66.630.300	28,97	56.792.510	99,84	195.725.510	99,84	195.725.510	832,02%	0,39%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		0		824.321.000	100	2.575.130.999			0,192	4.966.000	0,162	4.188.000		2.565.637.453	0,355	2.574.791.453	0,355	2.574.791.453	0,00%	312,35%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan Perumahan layak hunih	100	Persen	618.241.000	100	41.005.800			9,838	4.034.300	1,265	519.000	87,48	35.874.534	98,59	40.427.834	98,59	40.427.834	98,59%	6,54%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		#N/A		206.080.000											0		0		0,00%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0										0		0			0,00%	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																					
02.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	83,23	Persen	427.730.800	55	56.774.970	1,356	1.400.000	6,536	6.747.845	5,006	5.168.000	37,03	38.234.834	49,939	51.550.679	49,939	51.550.679	60,00%	12,05%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
02.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pembebasan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah untuk menunjang pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	83,23	Persen	0											0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					



1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	94	Persen	31.512.589.000	91	8.049.932.931	1.185.702.385	2.827.477.007	1.806.046.490	2.026.768.318	0	7.845.994.200	0	7.845.994.200	0,00%	24,90%	Satuan Polisi Pamong Praja		
01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100	Persen	2.480.342.000	100	348.550.708	35.227.560	122.179.643	93.189.695	93.442.888	0	344.039.786	0	344.039.786	0,00%	13,87%	Satuan Polisi Pamong Praja		
01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan dan kebakaran	100	Persen	2.233.213.000	100	167.222.100	11.990.500	99.961.480	23.908.250	27.447.280	0	163.307.510	0	163.307.510	0,00%	7,31%	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	94	Persen	12.122.188.000		3.025.494.964	403.637.847	692.710.983	741.114.344	1.256.457.236	0	3.093.920.410	0	3.093.920.410	0,00%	25,52%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Sedang	Risiko	4.751.671.000	10	720.096.716		36.528.000	144.545.600	470.261.610	0	651.335.210	0	651.335.210	0,00%	13,71%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		



01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan dan kebakaran	100	Persen	247.836.000										0	0	0	0	0,00%	0,00%	Badan Penanggulan Bencana Daerah
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																				
01.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	82	Persen	16.434.827.000	100	3.984.315.544	23,96	971.260.288	32,04	1.303.323.920	604.451.077	1.073.032.151	56	3.952.067.436	56	3.952.067.436	68,29%	24,05%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana	
01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	100	Persen	288.660.000	100	58.930.869	9,84	3.592.300	19,37	7.067.900	70,79	12.366.500	34.744.200	100	57.770.900	100	57.770.900	100,00%	20,01%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana
01.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	90	Persen	202.765.000										0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana
01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang ditangani	100	Persen	952.489.000	100	305.893.340	62,67	37.058.700	0,89	26.672.900		148.246.015	63,56	211.977.615	63,56	211.977.615	63,56%	22,26%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana	
01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	85	Persen	6.052.579.000	80	302.992.049	13,57	41.114.300	29,98	90.852.155	32.440.650	136.458.885	43,55	300.865.990	43,55	300.865.990	51,24%	4,97%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana	



01.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Peningkatan Penanganan Bencana	100	Persen	378.456.000	100	282.708.200	8	4.480.000	54,42	30.474.133	1.200.000	244.230.475	62,42	280.384.608	62,42	280.384.608	62,42%	74,09%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana		
01.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	Persen	608.295.000	100	43.017.848	10		10	30	875.000	50	41.906.850	100	42.781.850	100	42.781.850	100,00%	7,03%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							6,80	5,96	14,86	24,09	14,48	28,36	17,92	37	54,06	95,34					
Predikat Kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	ST					
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
02.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PUG	100	Persen	1.002.765.000	100	800.000.000	71,43	500.000.000	28,57	200.000.000		100.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100,00%	79,78%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana		
02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan / pendampingan perlindungan perempuan	95	Persen	421.141.000	80	29.999.700	93	29.205.503				740.100	93	29.945.603	93	29.945.603	97,89%	7,11%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana		
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tingkat Kecamatan	13	Kecamatan	324.424.000									0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana		
02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	100	Persen	73.502.000	100	9.999.800	100	9.738.601				254.700	100	9.993.301	100	9.993.301	100,00%	13,60%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana		



02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Persen	345.153.000	10	34.999.800		30.831.752			2.030.000		2.088.200	0	34.949.952	0	34.949.952	0,00%	10,13%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana	
02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan/Pendamp ingan Perlindungan Anak	95	Persen	121.659.000	80	25.000.000	29	24.450.200	41				533.400	70	24.983.600	70	24.983.600	73,68%	20,54%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana	
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																					
02.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk	92	Persen	324.358.000	100	301.400.000	25	61.460.560	25	30.297.200	25	60.439.100		136.677.950	75	288.874.810	75	288.874.810	81,52%	89,06%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana
02.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,3	Persen	8.095.731.000	72	5.194.796.540	10	300.320.950	25	910.652.744	30	1.203.366.350		2.720.284.210	65	5.134.624.254	65	5.134.624.254	424,84%	63,42%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana
02.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Poktan (Kelompok Kegiatan) yang mendukung program Bangsa Kencana	81	Persen	9.559.705.000	75	2.559.300.100	10	8.939.400	15	97.781.061	20	612.870.000		1.089.935.200	45	1.809.525.661	45	1.809.525.661	55,56%	18,93%	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>																					



02.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUHLATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20	Unit	1.451.326.000	70	6.000.028	0	0	5.957.000	86,5	86,5	5.957.000	86,5	5.957.000	432,50%	0,41%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	1	Laporan	1.851.630.000	1	1.108.470.259	0	9.545.600	12.233.100	1	129.013.039	2	150.791.739	2	150.791.739	200,00%	8,14%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya daerah rawan pangan	13	Kecamatan	177.805.000								0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota	4	Dokumen	1.005.630.000	1	9.000.000	0	0	3.960.000	1	740.900	1	4.700.900	1	4.700.900	25,00%	0,47%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>																		
02.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	99	Persen	16.121.369.000	98	3.965.766.886	613.492.046	1.359.912.600	881.665.917		1.013.452.329	0	3.868.522.892	0	3.868.522.892	0,00%	24,00%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	4	Dokumen	1.947.318.000	4	114.955.696		14.840.144	64.922.052		35.165.000	0	114.927.196	0	114.927.196	0,00%	5,90%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Data Kualitas Lingkungan Hidup dan Konservasi Lingkungan Hidup	4	Dokumen	6.510.039.000	4	612.867.337	8.822.900	116.904.186	259.902.926		208.203.325	0	593.833.337	0	593.833.337	0,00%	9,12%	Dinas Lingkungan Hidup



02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH yang tersedia	72	Persen	2.838.453.000	68,5	978.780.298		177.515.376	401.230.180	191.862.907		172.929.628	0	943.538.091	0	943.538.091	0,00%	33,24%	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Layanan Izin dan/atau Layanan Pemeriksaan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Persetujuan Teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	98	Izin Usaha	339.631.000	20	82.403.936		27.388.600	20.954.100			34.057.610	0	82.400.310	0	82.400.310	0,00%	24,26%	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izn PPLH, PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	80	Persen	940.442.000	74,25	203.469.298		50.235.200	34.189.900		37.012.146		81.970.700	0	203.407.946	0	203.407.946	0,00%	21,63%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif "	8	Lembaga	282.249.000	87	69.071.374					26.166.713		42.603.061	0	68.769.774	0	68.769.774	0,00%	24,36%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Yang Dilaksanakan	98	Persen	570.980.000	98	88.753.696			7.969.800		10.008.100		28.823.340	0	46.801.240	0	46.801.240	0,00%	8,20%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perolehan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100	Persen	220.722.000	100	53.558.684		7.442.200	12.218.700		20.028.800		13.825.200	0	53.514.900	0	53.514.900	0,00%	24,25%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	100	Persen	220.160.000	100	46.061.712		4.034.300	7.820.194				0	11.854.494	0	11.854.494	0,00%	5,38%	Dinas Lingkungan Hidup	



02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	76	Persen	20.582.729.000	70	6.615.068.528		1.054.118.510	2.768.842.624		1.458.527.276	1.299.143.716	0	6.580.632.126	0	6.580.632.126	0,00%	31,97%	Dinas Lingkungan Hidup		
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
02.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang dilaksanakan (%)	95	Persen	24.607.323.000	95	5.864.482.862	36,69	1.114.297.557	31,56	1.941.767.777	9,206	1.122.262.468	22,73	1.619.512.626	100,19	5.797.840.428	100,19	5.797.840.428	105,47%	23,56%	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100	Persen	938.519.000	100	406.526.922	54,99	91.233.800	7,199	58.332.300	13,79	38.028.850		218.361.370	75,99	405.956.320	75,99	405.956.320	76,00%	43,25%	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
02.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100	Persen	1.223.446.000	100	277.669.700	75	115.655.120	8,333	28.297.700	8,333	5.000.000	8,333	127.284.100	100	276.236.920	100	276.236.920	100,00%	22,58%	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	75	Persen	412.753.000	60	80.000.000	17,647	26.579.600	17,647	42.845.420	17,647	10.404.000		52.941	79.829.020	52.941	79.829.020	70,59%	19,34%	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	
02.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	78	Persen	232.050.000										0	0	0	0		0,00%	0,00%	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					
02.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran,	95	Persen	14.571.147.000	75	3.392.314.003		611.107.564	1.166.425.556		755.133.527	793.928.397	0	3.326.595.044	0	3.326.595.044	0,00%	22,83%	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha		



KABUPATEN/KOTA	sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset																	n Des
02.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan wilayah desa yang ditata	80	Persen	914.049.000	65	154.808.158	24.780.700	56.092.850	13.353.706	50.146.535	0	144.373.791	0	144.373.791	0,00%	15,79%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
02.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	90	Persen	4.549.235.000	75	2.155.418.900	29.372.336	1.299.881.340	90.352.440	730.500.300	0	2.150.106.416	0	2.150.106.416	0,00%	47,26%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
02.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	90	Persen	15.785.018.000	75	3.555.199.888	583.773.681	747.587.925	918.831.300	1.115.021.723	0	3.365.214.629	0	3.365.214.629	0,00%	21,32%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
02.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	95	Persen	570.351.000	80	281.193.210	116.229.900	49.631.552	16.227.598	94.436.940	0	276.525.990	0	276.525.990	0,00%	48,48%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
02.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	98	Persen	19.179.263.000	95	5.229.077.691	734.416.717	1.452.752.472	1.164.159.386	1.485.562.040	0	4.836.890.615	0	4.836.890.615	0,00%	25,22%	Dinas Perhubungan	
02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan yang tersedia	95	Persen	5.395.041.000	80	2.759.201.439	79.934.000	516.172.650	693.534.900	1.460.922.000	0	2.750.563.550	0	2.750.563.550	0	50,98%	Dinas Perhubungan	



02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		0	0	478.881.000															Dinas Perhubunga n	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
02.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	18.145.861.000	100	4.514.235.343	9,59	488.726.003	25,19	1.284.219.111	936.586.609	1.550.285.881	34,78	4.259.817.604	34,78	4.259.817.604	35%	23,48%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
02.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan	65	Persen	7.237.832.000	50	2.099.801.124	0,2	3.973.353	1,43	28.511.572	71	1.410.445.413	644.114.108	72,63	2.087.044.446	72,63	2.087.044.446	112%	28,84%	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Layanan Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	76	Unit	5.458.962.000	61	557.317.000			49.626.240	8	340.461.300	167.228.800	8	557.316.340	8	557.316.340	11%	10,21%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				
02.20.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	85	Persen	1.658.796.000	70	423.793.872			4	16.028.000	29,44	124.763.148	177.086.634	33,44	317.877.782	33,44	317.877.782	39%	19,16%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																				



PERSANDIAN																						
02.21.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tersedianya keamanan Informasi Pemerintah	65	Persen	1.451.426.000	50	185.999.168			10	18.339.897	20	37.092.300			126.030.839	30	181.463.036	30	181.463.036	46%	12,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																						
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>																						
02.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/ aset	80	Persen	14.331.376.000	75	3.681.428.201		651.287.383		1.144.651.052		956.329.590			819.210.792	0	3.571.478.817	0	3.571.478.817	0%	24,92%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria n dan Perdagangan
02.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,5	Persen	120.000.000	5	34.013.500		9.584.800		11.171.550		11.027.800			1.999.800	0	33.783.950	0	33.783.950	0%	28,15%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria n dan Perdagangan
02.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	0		516.343.000	0	86.810.760		3.840.300		17.218.700		64.984.200			0	86.043.200	0	86.043.200	0%	16,66%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
02.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kekuatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	70	Persen	271.151.000	50	35.050.600						8.902.000		25.718.700	0	34.620.700	0	34.620.700	0%	12,77%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	



02.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25	Persen	335.675.000	10	36.912.000						36.796.300	0	36.796.300	0	36.796.300	0%	10,96%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase tingkat kesadaran keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan	55	Persen	550.156.000	30	569.999.600		45.076.610		17.959.500		506.845.400	0	569.881.510	0	569.881.510	0%	103,59%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya rasio pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	0		1.094.118.000	0	140.502.250		68.961.300		34.229.750		36.849.300	0	140.040.350	0	140.040.350	0%	12,80%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya rasio pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	0		4.552.322.000	0	26.863.460						26.814.500	0	26.814.500	0	26.814.500	0%	0,59%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>																			
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Pencari Kerja dilatih	20	Orang	520.330.000	5	66.868.000		66.865.000					0	66.865.000	0	66.865.000	0%	12,85%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80	Orang	386.187.000	20	70.568.000		17.915.900		10.577.800		11.279.400	0	70.565.900	0	70.565.900	0%	18,27%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola yang Layak (memiliki PP/PKB)	7	Perusahaan	902.879.000	7	147.607.700		34.684.086		32.201.116		49.589.968	0	147.558.912	0	147.558.912	0%	16,34%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga



																		Kerja
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>																		
02.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	15.167.105.000	100	3.780.138.807	733.477.153	1.113.265.027	980.299.958	952.384.561	0	3.779.426.699	0	3.779.426.699	0%	24,92%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
02.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4	Dokumen	856.937.000	1	194.060.100					0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
02.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	804.063.000	1	106.103.000		21.183.300	84.893.246		0	106.076.546	0	106.076.546	0%	13,19%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
02.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Pelayanan Perizinan dan non perizinan berusaha dan non Berusaha	7693	Izin	2.434.513.000	1868	299.957.460	5.936.455	86.175.099	129.863.698		0	301.687.191	0	301.687.191	0%	12,39%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
02.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	138	Kegiatan Usaha	2.734.375.000	33	676.532.032	32.312.030	115.972.700	191.474.486	302.627.511	0	642.386.727	0	642.386.727	0%	23,49%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
02.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	40	Dokumen	622.903.000	10	112.499.772	16.848.050	25.807.504	32.391.500	36.955.800	0	112.002.854	0	112.002.854	0%	17,98%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu	



PENANAMAN MODAL	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan																				Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																					
02.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	15.196.084.000	100	3.682.305.195	11,33	668.050.295	8,59	1.043.667.798	12,21	857.332.001	15,869	1.008.910.953	47,999	3.577.961.047	47,999	3.577.961.047	48%	23,55%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
02.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	34,56	Persen	802.252.000	27,16	471.534.480			0,36	9.414.000	0,36	16.166.000	0,298	24.177.758	1,018	49.757.758	1,018	49.757.758	3%	6,20%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
02.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olahraga ditingkat provinsi	25	Persen	4.932.990.000	65	5.344.017.782		2.336.342.182		168.020.580	57	813.918.130		2.024.267.576	57	5.342.548.468	57	5.342.548.468	228%	108,30%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
02.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pembinaan Pramuka	0	Pembinaan	988.700.000	50	300.000.000			50	300.000.000				50	300.000.000	50	300.000.000	0%	30,34%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																					
02.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		0	0	775.791.000	0	115.409.217		40.506.942		6.534.367		29.446.411		31.963.704		108.451.424	0	108.451.424	0%	13,98%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02.23.03 PROGRAM PELESTARIAN	Jumlah Naskah Kuno Yang Dilestarikan	24	Eksemplar	150.853.000	6	10.626.780		5.962.800		2.664.000		200.000		317.200		9.144.000	0	9.144.000	0%	6,06%	Dinas Kearsipan dan



KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																			Perpustakaan
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>																			
02.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kera, Meningkatnya Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan / Aset	78	Persen	14.208.142.000	75	2.912.389.788	643.988.298	752.981.181	673.646.389	590.138.490	2.660.754.358	0	2.660.754.358	0%	18,73%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
02.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	90	Persen	584.475.000	75	105.850.020	53.432.964	22.504.550	11.199.500	104.282.409	191.419.423	0	191.419.423	0%	32,75%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
02.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Keberadaan dan Keutuhan Arsip	95	Persen	255.929.000	75	29.071.200			5.324.700	9.718.400	15.043.100	0	15.043.100	0%	5,88%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
02.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	7	Persen	129.303.000	0	1.017.000				689.600	689.600	0	689.600	0%	0,53%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>																			
02.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	78	Persen	2.712.637.000	75	2.298.347.510		1.000.000.000	32.604.845	1.260.904.090	0	2.293.508.935	0	2.293.508.935	0,00%	84,55%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan	78	Persen	455.581.000	75	35.914.100		25.844.250	5.940.952		0	31.785.202	0	31.785.202	0,00%	6,98%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase jumlah pembinaan sejarah yang dilaksanakan	78	Persen	828.023.000	75	296.801.300			201.282.000	91.982.547	0	293.264.547	0	293.264.547	0,00%	35,42%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



02.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase jumlah cagar budaya dilestarikan dan dikelola	78	Persen	990.430.000	75	187.200.000														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
02.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah museum yang dikelola	0	Persen	0																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							9,66	15,10	5,31	25,94	5,74	21,99	2,41	31,72	23,11	94,75					
Predikat Kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST					
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
03.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	32	Ton	402.252.000	29	4.800.000	0	0		400.000	29	4.400.000	29	4.800.000	29	4.800.000	90,63%	1,19%		Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
03.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	914	Ton	2.866.017.000	899	1.375.535.600	0		186.340.000	46.518.535	10.000	265.730.100	10000	498.588.635	10000	498.588.635	1094,09%	17,40%		Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
03.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8	Dokumen	461.078.000									0	0	0	0	0,00%	0,00%		Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
03.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Jenis Olahan Perikanan	7	Jenis	398.414.000	7	140.080.000	0	0		4.000.000	7	1.899.400	7	5.899.400	7	5.899.400	100,00%	1,48%		Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					
03.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	85	Persen	83.339.031.000	85	22.577.977.719		3.226.929.437		7.860.136.935		4.919.428.243	85	5.944.712.990	85	21.951.207.605	100,00%	26,34%		Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	



03.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengadaan Alsintan	2095	Unit	4.890.749.000	520	2.832.922.468	0	1.176.360.650	177.896.514	332	655.370.362	332	2.009.627.526	332	2.009.627.526	15,85%	41,09%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan		
03.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1078	Unit	50.845.578.000	265	21.454.749.736	2.605.000	84	4.018.216.300	84	9.252.881.780	98	6.671.868.509	266	19.945.571.589	266	19.945.571.589	24,68%	39,23%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
03.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah penyakit ternak yang dicegah dan ditanggulangi	5	Jenis	1.546.798.000	5	395.293.932	0	5	74.870.000	5	22.054.460	5	296.098.005	15	393.022.465	15	393.022.465	300,00%	25,41%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
03.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya OPT dan tertanggulangnya bencana	13	Kecamatan	574.080.000	13	2.427.000.000	0	20.000.000	60.793.230	13	940.073.700	13	1.020.866.930	13	1.020.866.930	100,00%	177,83%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan		
03.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi standarisasi mutu dan hasil pertanian dan pendataan poktan pengolah TPH	4	Laporan	77.839.000	1	16.317.714	0	0	500.000	1	15.670.898	1	16.170.898	1	16.170.898	25,00%	20,77%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan		
03.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	156	WKPP	5.110.324.000	156	1.294.868.600	0	141.395.000	364.463.780	156	393.247.525	156	899.106.305	156	899.106.305	100,00%	17,59%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan		
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																				
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																				
03.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase jumlah rekomendasi pemuhan komitmen perolehan perizinan berusaha	90	Persen	211.279.000	90	33.376.268		33.375.730			0	33.375.730	0	33.375.730	0%	15,80%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria n dan Perdaganga n			
03.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	90	Persen	1.786.205.000	90	113.858.888		20.069.932	88.217.543		5.013.732	0	113.301.207	0	113.301.207	0%	6,34%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria n dan Perdaganga n		



03.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok barang penting	90	Persen	1.382.188.000	90	3.285.402.887		26.268.763	16.375.206	1.253.319.008	0	1.295.962.977	0	1.295.962.977	0%	93,76%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	90	Persen	206.080.000							0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	90	Persen	949.266.000	60	155.263.148	72.387.720	41.788.400	14.763.500	25.165.100	0	154.104.720	0	154.104.720	0%	16,23%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.30.07 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	90	Persen	206.080.000							0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>																	
03.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersusunnya laporan rencana pembangunan industri	4	Dokumen	1.929.930.000	1	130.145.815	3.458.160	96.284.576		29.970.771	0	129.713.507	0	129.713.507	0%	6,72%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah laporan pengendalian izin usaha industri yang diterbitkan	4	Dokumen	123.648.000	1	29.999.885		29.976.985			0	29.976.985	0	29.976.985	0%	24,24%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		0	0	336.856.000	0	40.000.816	39.973.216				0	39.973.216	0	39.973.216	0%	11,87%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																			
03.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	388.517.000	1	22.000.200			18.770.194	2.696.400	337.700	0	21.804.294	0	21.804.294	0%	5,61%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			
03.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	16	Lokasi	3.435.116.000	1	76.252.700			12.121.200	35.754.850	1	27.386.340	1	75.262.390	1	75.262.390	6%	2,19%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
03.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Pariwisata	4	Kegiatan	415.988.000	1	174.997.300		0,5	153.618.765	0,5	20.325.800		1	173.944.565	1	173.944.565	25%	41,81%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
03.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	15	Pelaku Ekraf	230.161.000									0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
03.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	"Jumlah Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif	4	Orang	816.005.000									0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
03.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya	85	Persen	13.851.235.000,00	100	2.785.212.121	362.914.575	905.718.057	556.139.117	861.226.874	0	2.685.998.623	0	2.685.998.623	0,00%	19,39%	Dinas Perkebunan		



	evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset																					
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengadaan Alsintan		4.216.434.000,00									0	0	0	0,00%	0,00%			Dinas Perkebunan		
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1.365.773.000,00		1.411.331.447		106.457.030		399.068.400		274.871.882	0	780.397.312	0	780.397.312	0,00%	57,14%		Dinas Perkebunan		
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya OPT dan tertanggulangnya bencana		780.965.000,00									0	0	0	0	0,00%	0,00%		Dinas Perkebunan		
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi standarisasi mutu dan hasil pertanian dan pendataan poktan pengolah TPH		423.311.000,00									0	0	0	0	0,00%	0,00%		Dinas Perkebunan		
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian		439.758.000,00									0	0	0	0	0,00%	0,00%		Dinas Perkebunan		
				<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>			<b>0,00</b>	<b>6,10</b>	<b>3,71</b>	<b>24,55</b>	<b>3,71</b>	<b>26,30</b>	<b>444,2</b>	<b>29,07</b>	<b>451,59</b>	<b>86,02</b>						
				<b>Predikat Kinerja</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>	<b>ST</b>	<b>T</b>						
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>																						
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran - Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota di Bidang Organisasi	100	Persen	78.385.701.210	100	25.680.810.958	25	2.851.019.022	25	6.755.854.388	25	6.234.586.187	25	9.277.611.032	100	25.119.070.629	100	25.119.070.629	100%	32,05%	Sekretariat Daerah



04.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu Persentase kerjasama yang aktif Persentase Ketersediaan Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota di SKPD Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Oranisasi Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Persentase Raperda yang Diundangkan Menjadi Peraturan Daerah	96,25	Persen	97.389.603.180	95,5 95,5 100 100 100 98,25 98	15.639.096.280		74.387.656	12,5	1.274.141.576	12,5	3.200.650.850	70	9.838.655.622	95	14.387.835.704	95	14.387.835.704	99%	14,77%	Sekretariat Daerah
04.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	100	Persen	10.245.042.010	73,33	1.446.737.431	19,8	36.383.269	31,8	330.737.042	3	551.366.327	37	485.393.939	91,6	1.403.880.577	91,6	1.403.880.577	92%	13,70%	Sekretariat Daerah
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.02 SEKRETARIAT DPRD																					
04.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	95	Persen	117.173.982.000	95	32.395.814.368	21,01	5.741.920.279	28,74	7.852.611.258		7.043.245.101	35,08	11.363.097.354	84,83	32.000.873.992	84,83	32.000.873.992	89%	27,31%	Sekretariat DPRD
04.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	95	Persen	33.373.674.000	95	13.076.111.883	14,72	1.925.040.902	18,41	2.407.935.362	5,07	662.640.311	57,94	7.576.542.376	96,14	12.572.158.951	96,14	12.572.158.951	101%	37,67%	Sekretariat DPRD



		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
		22,16	12,05	32,05	21,10	12,54	20,05	61,93	43,68	128,69	96,88											
		Predikat Kinerja																				
		SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST	ST											
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
<b>5.01 PERENCANAAN</b>																						
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran dan meningkatnya Evaluasi kinerja	90	Persen	18.619.497.000	85	4.207.925.808	21,25	500.757.942	35,89	1.459.991.743	15	943.300.897	12,86	1.222.662.975	85	4.126.713.557	85	4.126.713.557	94%	22,16%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen bahan perumusan dan pengambilan kebijakan berupa hasil koordinasi, informasi, pedoman, pustaka, dan arsip tersedia tepat waktu	100	Persen	8.004.025.000	80	1.089.792.736	30,61	56.395.900	24,16	110.644.768	17,14	406.245.908	28,57	462.921.277	100,48	1.036.207.853	100,48	1.036.207.853	100%	12,95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan yang terlaksana	75	Persen	8.799.811.000	60	760.077.996			20	149.195.582	32	338.938.420	27	267.126.814	79	755.260.816	79	755.260.816	105%	8,58%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																						
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	15	Persen	4.540.653.000	12	289.992.850		14.731.000		46.769.755		80.450.373	12	144.944.679	12	286.895.807	12	286.895.807	80%	6,32%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
<b>5.02 KEUANGAN</b>																						
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	166.871.733.000	100	6.448.968.051		862.503.718		1.968.484.412		1.560.438.015	100	1.960.876.314	100	6.352.302.459	100	6.352.302.459	100%	3,81%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



05.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Anggaran Yang Disusun Tepat Waktu	100	Persen	1.036.703.799.300	100	239.998.334.508		3.718.442.297		30.390.609.994		28.840.838.371	100	176.210.495.618	100	239.160.386.280	100	239.160.386.280	100%	23,07%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD Sesuai Regulasi	100	Persen	6.853.570.000	100	714.405.351		36.282.591		152.154.826		141.885.447	100	337.049.451	100	667.372.315	100	667.372.315	100%	9,74%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset		Persen	22.915.686.000	100	5.547.699.415	21,57	519.360.388	20,61	1.240.805.943	15,81	1.234.797.406	19,6	1.761.030.720	77,59	4.755.994.457	77,59	4.755.994.457	0%	20,75%	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
05.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan pajak daerah	100	Persen	6.819.912.000	100	732.092.086	13,17		9,09	216.180.100	12,99	182.194.400	17,55	330.600.468	52,8	728.974.968	52,8	728.974.968	53%	10,69%	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5.03 KEPEGAWAIAN																					
05.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	88	Persen	15.862.186.000	85	5.241.013.326	19,84	572.963.113	19,97	1.508.024.657	19,6	917.473.355		1.984.241.359	59,41	4.982.702.484	59,41	4.982.702.484	68%	31,41%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Disiplin ASN	0,36	Persen	2.239.937.736	0,51	189.545.700			0,07	2.536.800	0,02	34.486.450		109.157.309	0,09	146.180.559	0,09	146.180.559	25%	6,53%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Kinerja ASN	83	Persen	951.013.984	80	119.986.000		8.965.100	68,89	58.612.500				51.330.100	68,89	118.907.700	68,89	118.907.700	83%	12,50%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase pemenuhan regulasi manajemen ASN	100	Persen	60.000.000					9,09					9,09	0	9,09	0	9,09	9%	0,00%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber



																				Daya Manusia	
	Tingkat Kualitas pengadaan dan kesesuaian penempatan ASN dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan	95,1	Persen	4.864.743.640	69,63	710.627.600	5,64	11.721.700	98,11	87.114.850	25,92	173.525.528	411.272.189	129,67	683.634.267	129,67	683.634.267	136%	14,05%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Pengembangan Karir ASN	100	Persen	1.807.139.640	100	344.660.000	11,11	99.475.000	31,7	4.822.100	1,47	43.442.800	44,28	147.739.900	44,28	147.739.900	44%	8,18%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																					
<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																					
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
	Persentase Pemenuhan regulasi pengembangan kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	100	Persen	170.000.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	
	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	6,04	Persen	9.995.547.213	3,58	2.870.616.632	1,72	239.514.819	0,5	995.182.999	0,98	1.076.631.229	335.520.365	3,2	2.646.849.412	3,2	2.646.849.412	53%	26,48%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>							<b>11,61</b>	<b>2,47</b>	<b>31,43</b>	<b>14,26</b>	<b>13,10</b>	<b>13,36</b>	<b>38,82</b>	<b>68,92</b>	<b>94,96</b>	<b>99,01</b>					
<b>Predikat Kinerja</b>							<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>S</b>	<b>ST</b>	<b>ST</b>					
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																					
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>																					
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			31.615.326.000		11.540.238.810		898.515.888		3.288.007.719		3.141.827.446		3.922.378.522	0	11.250.729.575	0	11.250.729.575	0%	35,59%	Inspektorat
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																				
	Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	100	Persen	9.198.346.000	100	2.196.250.566		277.270.200		237.832.100		309.835.000		1.204.520.680	0	2.029.457.980	0	2.029.457.980	0%	22,06%	Inspektorat
06.01.03	PROGRAM	90	Persen	3.506.600.000	75	531.946.340						13.500.000		490.135.928	0	503.635.928	0	503.635.928	0%	14,36%	Inspektorat



PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							0,00	8,24	0,00	24,71	24,29	39,37	0,00	96,60						
Predikat Kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST						
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>																				
<b>7.01 KECAMATAN</b>																				
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	9.019.616.000	100	2.019.771.517	218.428.170	566.445.512	379.753.115	409.226.670	0	1.573.853.467	0	1.573.853.467	0%	17,45%			Kecamatan Ngabang	
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	557.149.000	100	22.755.300	22.288.310				0	22.288.310	0	22.288.310	0%	4,00%			Kecamatan Ngabang	
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	582.940.000	80	26.784.000		14.600.000		9.016.000	0	23.616.000	0	23.616.000	0%	4,05%			Kecamatan Ngabang	
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	464.100.000							0	0	0	0	0%	0,00%			Kecamatan Ngabang	
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	76	Desa	464.100.000							0	0	0	0	0%	0,00%			Kecamatan Ngabang	
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	100	Persen	650.791.000	100	35.392.300				24.230.400	0	24.230.400	0	24.230.400	0%	3,72%			Kecamatan Ngabang	



07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	100	Persen	10.173.396.000	100	1.933.937.995				753.037.039			405.848.383	0	1.158.885.422	0	1.158.885.422	0%	11,39%	Kecamatan Air Besar
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000									0	0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Air Besar
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	576.401.000	80	24.169.600							13.838.880	0	13.838.880	0	13.838.880	0%	2,40%	Kecamatan Air Besar
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000									0	0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Air Besar
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	16	Desa	464.100.000									0	0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Air Besar
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	899.202.000	100	33.305.620				22.333.164			4.629.700	0	26.962.864	0	26.962.864	0%	3,00%	Kecamatan Air Besar
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	8.628.064.000	100	1.854.522.650	23.860.380		107.831.633	1.016.485.484			527.216.183	0	1.675.393.680	0	1.675.393.680	0%	19,42%	Kecamatan Kuala Behe
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	431.000.000	100	17.576.000			5.569.520				10.472.000	0	16.041.520	0	16.041.520	0%	3,72%	Kecamatan Kuala Behe
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	502.373.000	80	36.628.000			7.920.000				15.543.000	0	23.463.000	0	23.463.000	0%	4,67%	Kecamatan Kuala Behe
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	431.000.000		13.328.000							0	0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Kuala Behe
07.01.05 PROGRAM	Persentase Kinerja Pemberdayaan	11	Desa	431.000.000		9.535.400							9.337.900	0	9.337.900	0	9.337.900	0%	2,17%	Kecamatan Kuala Behe



PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan																		
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	674.078.000	100	36.139.580		4.529.000	5.808.000	18.078.000	0	28.415.000	0	28.415.000	0%	4,22%			Kecamatan Kuala Behe
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	11.322.480.000	100	2.382.977.690	431.843.599	1.485.000	466.019.861	632.093.438	0	1.531.441.898	0	1.531.441.898	0%	13,53%			Kecamatan Sengah Temila
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	581.964.000	100	37.273.788	809.702		4.478.000	24.487.878	0	29.775.580	0	29.775.580	0%	5,12%			Kecamatan Sengah Temila
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	563.062.000	80	27.330.200		5.599.000		216.767.500	0	222.366.500	0	222.366.500	0%	39,49%			Kecamatan Sengah Temila
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	100	13.225.120			2.842.000	10.290.000	0	13.132.000	0	13.132.000	0%	2,83%			Kecamatan Sengah Temila
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	14	Desa	464.100.000	14	5.081.200				5.081.200	0	5.081.200	0	5.081.200	0%	1,09%			Kecamatan Sengah Temila
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	599.462.000	100	49.334.662	5.761.860	3.465.380	15.087.000	23.565.808	0	47.880.048	0	47.880.048	0%	7,99%			Kecamatan Sengah Temila
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	10.933.492.000	100	2.131.086.625			1.421.512.008	416.462.463	0	1.837.974.471	0	1.837.974.471	0%	16,81%			Kecamatan Menyuke
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	100	1.820.000			1.820.000		0	1.820.000	0	1.820.000	0%	0,39%			Kecamatan Menyuke
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah	95	Persen	600.545.000	80	20.340.000			10.065.000	10.275.000	0	20.340.000	0	20.340.000	0%	3,39%			Kecamatan Menyuke



DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan																		
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	100	5.460.000			5.460.000			0	5.460.000	0	5.460.000	0%	1,18%		Kecamatan Menyuke
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	16	Desa	464.100.000	16	1.820.000			1.820.000			0	1.820.000	0	1.820.000	0%	0,39%		Kecamatan Menyuke
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	604.162.000	100	40.400.000			30.260.000	10.140.000		0	40.400.000	0	40.400.000	0%	6,69%		Kecamatan Menyuke
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	6.507.208.000	100	1.297.517.828	155.502.807	375.972.371	49.285.568			0	580.760.746	0	580.760.746	0%	8,92%		Kecamatan Meranti
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	100	12.544.000						0	0	0	0	0%	0,00%		Kecamatan Meranti
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	528.887.000	80	17.602.800			3.800.000			0	3.800.000	0	3.800.000	0%	0,72%		Kecamatan Meranti
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	100	8.670.000						0	0	0	0	0%	0,00%		Kecamatan Meranti
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	6	Desa	464.100.000	6	17.960.000			5.000.000			0	5.000.000	0	5.000.000	0%	1,08%		Kecamatan Meranti
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	567.458.000	100	10.920.000			5.000.000			0	5.000.000	0	5.000.000	0%	0,88%		Kecamatan Meranti
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	8.798.036.000	100	2.318.251.941	9.032.076	687.805.823			187.268.470	0	884.106.369	0	884.106.369	0%	10,05%		Kecamatan Menjalın



07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	516.415.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Menjalin
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	487.296.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Menjalin
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Menjalin
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	8	Desa	464.100.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Menjalin
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	603.327.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Menjalin
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	10.410.176.000	100	2.371.061.489	19,63	419.931.482	11,61	50.898.810	27,44	832.612.498		58,68	1.303.442.790	58,68	1.303.442.790	59%	12,52%	Kecamatan Mandor
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Mandor
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	514.673.000	80	40.325.300	25		25	5.300.000	25	11.760.000		75	17.060.000	75	17.060.000	79%	3,31%	Kecamatan Mandor
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Mandor
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	17	Desa	464.100.000										0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Mandor
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	Persen	637.366.000	100	16.627.400	23,529 4	2.826.000	23,529 4	2.900.000	23,529 4	2.400.000		70,588 2	8.126.000	70,588 2	8.126.000	71%	1,27%	Kecamatan Mandor



PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	di wilayah Kecamatan																				
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	11.050.052.000	100	2.155.182.554		282.987.687		910.896.188		182.941.602		566.280.396	0	1.943.105.873	0	1.943.105.873	0%	17,58%	Kecamatan Mempawah Hulu
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	559.081.000		20.456.800		14.742.000						0	14.742.000	0	14.742.000	0%	2,64%	Kecamatan Mempawah Hulu	
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	555.563.000	80	10.855.500								10.240.000	0	10.240.000	0	10.240.000	0%	1,84%	Kecamatan Mempawah Hulu
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	100	20.100.000				6.435.000				17.736.600	0	24.171.600	0	24.171.600	0%	5,21%	Kecamatan Mempawah Hulu
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	17	Desa	464.100.000										0	0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Mempawah Hulu
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	553.856.000	100	15.105.620		3.073.000		1.060.164		1.683.500		9.215.916	0	15.032.580	0	15.032.580	0%	2,71%	Kecamatan Mempawah Hulu
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	6.831.076.000	100	1.466.039.255	9,66	141.682.991	30,4	445.588.442	20,1	295.164.196		1.027.658.978	60,16	1.910.094.607	60,16	1.910.094.607	60%	27,96%	Kecamatan Sebangki
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	595.457.000	100	25.299.200						5.794.920		0	5.794.920	0	5.794.920	0%	0,97%	Kecamatan Sebangki	
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	464.100.000	80	19.977.200								11.101.740	0	11.101.740	0	11.101.740	0%	2,39%	Kecamatan Sebangki
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	100	8.921.600								6.155.000	0	6.155.000	0	6.155.000	0%	1,33%	Kecamatan Sebangki



UMUM																					
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	5	Desa	464.100.000	5	3.847.000						3.619.000	0	3.619.000	0	3.619.000	0%	0,78%	Kecamatan Sebangki		
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	552.223.000	100	17.727.800						14.021.600	0	14.021.600	0	14.021.600	0%	2,54%	Kecamatan Sebangki		
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	8.978.492.000	100	2.053.477.046	9,28	190.531.673	27,9	571.905.553	16,4	336.200.136		777.722.993	53,58	1.876.360.355	53,58	1.876.360.355	54%	20,90%	Kecamatan Jelimpo
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	556.050.000	100	38.551.000			32	12.479.500				37.260.980	32	49.740.480	32	49.740.480	32%	8,95%	Kecamatan Jelimpo
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	496.587.000									0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Jelimpo		
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000									0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Jelimpo		
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	13	Desa	464.100.000									0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Jelimpo		
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	694.970.000	100	29.999.300			15	4.632.100				25.344.680	15	29.976.780	15	29.976.780	15%	4,31%	Kecamatan Jelimpo
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	8.252.540.000	100	1.742.264.125			6,11	104.185.432	64	1.092.013.198	25	433.848.150	95,11	1.630.046.780	95,11	1.630.046.780	95%	19,75%	Kecamatan Banyuke Hulu
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	556.894.000	100	32.298.000			76	24.510.250	24	7.750.900		100	32.261.150	100	32.261.150	100%	5,79%	Kecamatan Banyuke Hulu	



07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	464.100.000									0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Banyuke Hulu	
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	57	18.100.000			43	7.716.300	57	10.375.150	100	18.091.450	100	18.091.450	100%	3,90%	Kecamatan Banyuke Hulu	
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	7	Desa	464.100.000	7	7.920.000					100	7.916.400	100	7.916.400	100	7.916.400	1429%	1,71%	Kecamatan Banyuke Hulu	
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	637.104.000	100	20.420.000		27	5.428.500	37	7.492.800	37	7.459.200	101	20.380.500	101	20.380.500	101%	3,20%	Kecamatan Banyuke Hulu
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	7.889.060.000	100	1.509.311.106	171.598.374		375.799.305		277.732.955		379.097.913	0	1.204.228.547	0	1.204.228.547	0%	15,26%	Kecamatan Sompak
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pelayanan Publik	100	Persen	464.100.000	100								0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Sompak	
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	637.313.000	80	38.344.400	18.477.000				9.924.400		5.606.000	0	34.007.400	0	34.007.400	0%	5,34%	Kecamatan Sompak
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling Aktif	100	Persen	464.100.000									0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Sompak	
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	7	Desa	464.100.000									0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Sompak	



07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan akuntabel, Persentase Desa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Partisipatif, Persentase Desa yang menjalankan tertib Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	Persen	638.538.000	100	13.012.800		2.835.800					10.019.200	0	12.855.000	0	12.855.000	0%	2,01%	Kecamatan Sompak	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						1,81	8,09	5,71	19,40	5,84	24,85	4,56	24,25	17,92	76,59						
Predikat Kinerja						SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T					
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																					
<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																					
08.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	9.327.040.000	97	2.215.420.865	65	305.911.884	32,33	791.846.847		558.511.822		561.849.195	97,33	2.218.119.748	97,33	2.218.119.748	97%	23,78%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila	46	Desa	922.188.000	10	141.658.000		8.075.300	10	28.527.450		11.533.300		92.117.150	10	140.253.200	10	140.253.200	22%	15,21%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku	100	Persen	11.477.848.000	100	19.323.928.842		12.416.300	88,89	1.853.596.400	11,11	86.752.800		17.363.109.188	100	19.315.874.688	100	19.315.874.688	100%	168,29%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang aktif	97,4	Persen	553.808.000	97	65.615.200		3.960.300	60	3.840.300				44.666.205	60	52.466.805	60	52.466.805	62%	9,47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



08.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya	100	Persen	55.525.588.000	100	53.602.296	66,67	33,33	32.486.100	8.049.200	11.946.000	100	52.481.300	100	52.481.300	100%	0,09%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
08.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah	100	Persen	535.976.000	100	77.615.604			24.626.400	100	19.594.050	24.758.800	100	68.979.250	100	68.979.250	100%	12,87%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							26,13	1,51	44,55	12,50	22,05	3,13	0	82,73	92,72	99,86				
Predikat Kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	ST	ST				

Keterangan : Skala Nilai Peringkat Kinerja (Tabel T-E.1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) :

1. 91% ≤ 100% = Sangat Tinggi (ST)
2. 76% ≤ 90% = Tinggi (T)
3. 66% ≤ 75% = Sedang (S)
4. 51% ≤ 65% = Rendah (R)
5. ≤ 50% = Sangat Rendah (SR)



Capaian Kinerja Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan capaian melebihi target kinerja diatas 100%, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Landak kinerja program sebesar 113,31%, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak kinerja program sebesar 112,14%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak kinerja program sebesar 171,25% dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak kinerja program sebesar 125,39%.

Perangkat Daerah yang capaian kinerja program tidak ada atau 0 berjumlah 23 Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3 diatas. Untuk Perangkat Daerah yang capaian kinerja program dibawah 70% dengan predikat kinerja Rendah (R) berjumlah 4 Perangkat Daerah diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak kinerja program sebesar 59,36%, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak kinerja program sebesar 65,03%, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak kinerja program sebesar 65,19% dan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak kinerja program sebesar 61%.

Capaian Kinerja Anggaran terendah Perangkat Daerah yaitu Perangkat Daerah dengan nilai realisasi DPA terendah, sampai Triwulan IV TA 2023 ada 4 Perangkat Daerah dengan nilai realisasi anggaran dibawah 60%, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak kinerja anggaran sebesar 54,37%, Kecamatan Mandor kinerja anggaran sebesar 54,39%, Kecamatan Meranti kinerja anggaran sebesar 43,55% dan Kecamatan Menjalin kinerja anggaran sebesar 0%.

## **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3. 1. Permasalahan Pembangunan Berbagai Sektor**

Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar belum dapat diatasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Landak diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa permasalahan Kabupaten Landak diidentifikasi sebagai berikut:



### **2.3.1. A. Permasalahan Bidang Pendidikan**

Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Landak tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah:

1. Mentuntaskan penduduk buta huruf dan Angka Putus Sekolah ke tingkat yang lebih rendah (mendekati nol persen) dan menumbuhkan minat sekolah. Angka buta huruf Kabupaten Landak hingga tahun 2021 masih ada 7,07% dan angka putus sekolah SD/MI 0,79%; SMP/MTs 1,30%. Terlebih putus sekolah sebagai dampak dari pandemic covid-19.
2. Rata-rata lama sekolah (7,12 tahun) masih tergolong rendah (tamat SD), lebih rendah dari rerata Kalimantan Barat dan berada di rangking 6 dari 14 Kabupaten/Kota.
3. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,61 tahun atau setara Diploma-1 masih lebih rendah dari rerata Kalimantan Barat (12,65 tahun) dan jauh dari HLS yang rekomendasi UNDP 18 tahun.
4. APM Kabupaten Landak yang cenderung menurun pada jenjang pendidikan SMP/MTs dimana hingga 2021 mencapai 66,76% menurun dari capaian 2017 (68,82%). Capaian ini dapat memperlambat peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator pembentukan IPM.
5. Rasio Murid-Guru dan rasio Murid Sekolah masih di bawah standard nasional, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang berdampak pada inefisiensi.
6. Ruang kelas yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
7. Kekurangan Guru dan Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
8. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih terbatas

### **2.3.1. B. Permasalahan Bidang Kesehatan**

Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas,



puskesmas pembantu (pustu), posyandu, dan klinik maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus ditingkatkan keberadaan dan kualitasnya agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Sebagaimana pembangunan urusan pendidikan yang terkait dengan pembentukan IPM, pembangunan urusan kesehatan pun terkait erat dengan indikator pembentukan IPM (yaitu usia harapan hidup/UHH). Semakin tinggi UHH pertanda semakin berkurang Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan AKB pertanda membaiknya layanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran merawat kehamilan.

Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Landak adalah:

1. Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan penambahan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (stunting).
2. Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih sangat kurang untuk melayani kesehatan masyarakat.
3. Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan
5. Tidak seimbang penyediaan sarana kesehatan dengan laju pertumbuhan penduduk
6. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Landak relatif masih kurang

Pembangunan SDM dari aspek kesehatan terus ditingkatkan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi. Kesehatan dan gizi anak yang rendah, prevalensi penyakit tidak menular tinggi, prevalensi merokok yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

### **2.3.1. C. Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Jaringan jalan dengan kondisi rusak ringan terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2020 (285,41 km menjadi 314,96 km).
2. Jalan dengan kondisi rusak ringan di Kabupaten Landak memiliki prosentase 32,06% dari seluruh total Panjang jalan. Kerusakan-kerusakan ringan ini sebaiknya mendapat perhatian untuk dipelihara terus menerus agar tingkat kerusakan tidak semakin parah. Pemeliharaan jalan dapat juga dilakukan dengan pembatasan-pembatasan kendaraan berat melintas atau dengan cara pengaturan waktu melintas bagi kendaraan-kendaraan berat.



3. Masih terdapat jalan dengan kondisi rusak berat, yakni 22,76 km di tahun 2020
4. Prosentase jalan kondisi rusak berat hanya 2,32%, namun kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengendara. Selain itu kerusakan dengan tingkat berat ini dapat memicu kecelakaan dan mengurangi tingkat keamanan. Jalan dengan kondisi rusak berat akan mengakibatkan genangan juga saat banjir dan akan lebih cepat memperparah korosi pada lapisan permukaan jalan di sekitarnya. Jalan rusak berat Sebagian besar berada pada jalan lingkungan, dimana belum optimalnya pelayanan infrastruktur jalan lingkungan berdampak pada menurunnya kualitas Kawasan permukiman
5. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana ke-PU-an (peralatan konstruksi) untuk menunjang pelaksanaan jasa konstruksi. Hal ini dapat disebabkan karena belum terciptanya pelaku jasa konstruksi yang profesional, berkualitas dan bersertifikat untuk Penyelenggaraan Bina Jasa Konstruksi.
6. Rendahnya prosentase rumah tangga yang terlayani jaringan drainase, yakni hanya 3,29%.
7. Jaringan drainase yang ada di Kabupaten Landak hanya terkonsentrasi di Kawasan perkotaan saja seperti di Kecamatan Ngabang. Rendahnya pelayanan drainase yang hanya 3,29% tersebut menyebabkan tidak terintegrasinya jaringan drainase. Hal ini dapat mengakibatkan limpasan air hujan yang terlalu besar yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu kurangnya perawatan pada jaringan drainase menyebabkan banyaknya sedimentasi dan kerusakan pada beberapa jaringan drainase, sehingga fungsi jaringan drainase kurang optimal.
8. Menurunnya prosentase rumah tangga yang menggunakan jaringan air minum di tahun 2020, yakni dari 73,29% menjadi 71,74% di tahun 2021.
9. Air minum merupakan kebutuhan vital dalam lingkup rumah tangga maupun untuk kepentingan fasilitas umum dan sosial. Adanya penurunan penggunaan air bersih di Kabupaten Landak tersebut mengindikasikan beberapa hal, diantaranya produksi dari sumber air yang menurun, adanya faktor alam berupa perubahan iklim, serta pengelolaan dan pemeliharaan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan yang kurang optimal.
10. Belum tersedianya sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan.
11. Menurunnya prosentase rumah tangga yang menggunakan system pengelolaan air limbah atau sanitasi layak di tahun 2020, yakni dari 57,70% menjadi 53,73%.
12. Menurunnya prosentase rumah tangga yang bersanitasi diakibatkan kurangnya perawatan dari sarana dan prasarana sanitasi. Selain itu, sumber daya masyarakat dalam mengelola air limbah rumah tangga masih sangat kurang. Terkadang air



limbah rumah tangga yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur menjadi satu dengan saluran drainase. Limbah rumah tangga tersebut disebut greywater yang juga tidak dapat dijadikan satu dengan septic tank, karena kandungan detergen dapat membunuh bakteri pengurai yang dibutuhkan septic tank. Karena itu, diperlukan pengolahan khusus yang dapat menetralisasi kandungan detergen dan juga menangkap lemak.

13. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
14. Tingginya pencemaran SPAL yang terjadi akibat kurangnya perawatan saluran karena tersumbatnya aliran SPAL dari sampah dan endapan sedimentasi tanah.
15. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan di tingkat ibu kota kecamatan.
16. Masih terbatasnya anggaran guna mendukung program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang.
17. Belum efektifnya pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dikarenakan belum tuntasnya sejumlah Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).
18. Rencana Tata Ruang (RTR) belum menjadi pedoman bagi pembangunan sektoral, serta RTR belum selaras dengan rencana pembangunan yang menjadi acuan pembiayaan pembangunan.
19. Pencatatan data tanah aset Pemda kurang optimal dan belum secara spasial
20. Belum/kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan yang selaras dan sesuai dengan rencana pembangunan.
21. Terbatasnya pemahaman aparaturnya tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

#### **2.3.1. D. Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Penanganan kawasan kumuh belum tuntas, dan ada indikasi terjadinya kawasan rawan kumuh.
2. Persentase kawasan kumuh tertangani menurun namun masih belum tuntas. Masih terdapat kawasan batas dan buffer dari deliniasi kawasan kumuh yang berpotensi menjadi kumuh. Disamping itu terdapat kawasan kumuh yang belum teridentifikasi dan belum mendapat penanganan. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun di beberapa titik lokasi. Guna menekan luasan dan mencegah kawasan yang berpotensi kumuh, upaya penataan permukiman seperti penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan.



3. Masih terdapat permukiman-permukiman di bantaran sungai.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2015 telah diatur terkait garis sempadan sungai, dimana dalam rentang 10-30 meter dari tepi kanan dan kiri sungai tidak diperbolehkan untuk lahan terbangun khususnya untuk pembangunan rumah. Namun, kondisi eksistingnya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran tata ruang. Hal ini diakibatkan karena kurang mengikatnya aturan hukum, kurangnya penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hal tersebut dapat merusak lingkungan karena menurunnya daerah resapan air, kurang terkelolanya limbah rumah tangga di sekitar bantaran sungai dan lain sebagainya.
5. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB rendah, dimana kegiatan pembangunan sudah selesai baru melakukan proses perizinan. Hanya teridentifikasi 154 bangunan yang memiliki IMB atau sekitar 0,19% dari seluruh bangunan di Kabupaten Landak. Hal ini dapat diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan syarat pengurusan IMB, kurangnya penegakan hukum atas aturan IMB yang sudah dilegalkan. Pada kenyataannya IMB diperlukan sebagai tertib bangunan dan tertib hukumnya bagi setiap warga untuk mendirikan bangunan, sehingga hal tersebut merupakan sebuah peraturan pemerintah yang harus ditaati. Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB dapat mulai ditingkatkan dengan adanya sosialisasi dan menyediakan system pelayanan public yang tidak berbelit-belit dan waktu yang tidak terlampau lama.
6. Jumlah rumah layak huni belum signifikan peningkatannya. Peningkatan rasio rumah layak huni di Kabupaten Landak hanya berkisar 3,32% selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Masih terdapat 37,6% rumah tidak layak huni yang membutuhkan perhatian khusus untuk ditingkatkan kualitasnya. Adapun hal-hal yang memicu munculnya rumah-rumah tidak layak huni diantaranya tingginya jumlah angkatan kerja yang belum dapat diserap dalam kesempatan kerja yang produktif, tidak memadainya fasilitas-fasilitas kehidupan, timbulnya permukiman kumuh dengan berbagai tingkatannya, pencemaran lingkungan, serta timbulnya tekanan-tekanan sosial dan psikologis.
7. Fasilitasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah sasaran yang terbatas sesuai dengan keterbatasan anggaran secara nasional sehingga penyelesaian penanganan RTLH tidak dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
8. Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.



9. Terbatasnya lahan untuk penyediaan permukiman MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
10. Lokasi dengan harga tanah yang memungkinkan secara ekonomi untuk dibangun rumah murah umumnya merupakan lahan pertanian, atau tidak memiliki infrastruktur wilayah/akses yang baik. Penyediaan perumahan untuk MBR yang merupakan mandat dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti pembangunannya. Namun hal ini terkendala oleh terbatasnya ketersediaan lahan dengan harga dan tata ruang yang sesuai mengingat terus berkembangnya kawasan perkotaan dan juga mempertimbangkan perlindungan kawasan pertanian.
11. Belum terintegrasinya informasi terkait rumah swadaya, prasarana utama, rumah khusus, rumah susun dan komersil Berbeda-bedanya pemangku kepentingan dalam pembangunan rumah swadaya, perumahan subsidi, perumahan komersial, prasarana utama hingga kawasan komersial menyebabkan kurang terintegrasinya jaringan infrastruktur dan sarana penunjangnya. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan seperti adanya genangan saat terjadi banjir.
12. Belum optimalnya kapasitas bangunan gedung pemerintahan.
13. Minimnya sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau / Ruang Terbuka Publik baik di lingkungan perkantoran, fasilitas umum maupun Kawasan permukiman
14. Belum optimalnya pendataan rumah secara keseluruhan, rumah tidak layak huni, rumah masyarakat berpenghasilan rendah sehingga belum terdapat baseline yang kuat terkait rumah. Hal ini dapat menyebabkan distribusi bantuan dana untuk perbaikan rumah jadi terhambat dan terkadang tidak tepat sasaran
15. Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik belum optimal. Prasarana dan sarana dasar permukiman perlu diwujudkan dengan meningkatkan peran masyarakat dan swasta, baik dalam pemenuhan prasarana sarananya maupun pengelolaannya.
16. Pelayanan listrik belum mencapai seluruh masyarakat Kabupaten Landak. Rasio elektrifikasi Kabupaten Landak hanya 64,2% dan rasio desa berlistriknnya 82,6%, sehingga masih terdapat 17,4% desa yang belum berlistrik.

#### **2.3.1. E. Permasalahan Bidang Ketertiban Dan Keamanan**

Di tengah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kemananan dan ketertiban, kehadiran Satpol PP sangat dibutuhkan. Namun jumlah personil belum mencukupi atau terasa masih kurang dalam menciptakan rasa aman dan tertib. Adapun permasalahan lainnya antara lain:

Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perda dan perkara



1. Masih kurangnya kapasitas SDM bagi penegak ketertiban dan keamanan
2. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan ketertiban dan keamanan masih sangat kurang
3. Belum optimalnya pengurangan resiko bencana pada Kawasan-kawasan rawan bencana
4. Resiko bencana dapat dikurangi dengan adanya kajian-kajian terkait resiko Kawasan bencana. Dokumen kajian-kajian tersebut harusnya di upgrade secara berkala, namun karena banyaknya keterbatasan baik karena keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran maka dokumen tersebut belum disusun.
5. Belum optimalnya regulasi penanggulangan bencana.
6. Belum optimalnya pelatihan maupun sosialisasi terhadap masyarakat pada Kawasan rawan bencana terkait dengan resiko-resiko bencana dan bagaimana penanggulangannya.
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mempersiapkan desa tangguh bencana serta penganggulangan bencana.

#### **2.3.1. F. Permasalahan Bidang Sosial Budaya**

Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bidang sosial budaya yaitu:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi di bidang sosial
2. Meskipun persentase penduduk miskin memiliki tren penurunan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) namun persentase kemiskinan di Kabupaten Landak masih tinggi bahkan di Kalimantan Barat, Kabupaten Landak menempati posisi kedua tertinggi [1],
3. Pemberdayaan masyarakat miskin belum maksimal dilakukan di Kabupaten Landak, misalnya dengan memberikan bantuan modal usaha seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk mendorong masyarakat untuk beralih orientasi menjadi berfikir lebih dinamis dan terus bergerak untuk mengupayakan melepaskan diri dari persoalan sosial untuk menjadi lebih mandiri.
4. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dibina dan mendapat pelayanan masih relatif kecil
5. Terdapat kurang lebih 1.500 penyandang disabilitas yang Sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri karena diskriminasi dan hambatan mobilitas.
6. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar,



7. Menurunnya persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mendapat pelayanan
8. Kabupaten Landak juga masih mengalami berbagai masalah terkait dengan perlindungan anak, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah semakin meningkat.
9. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten bagi korban bencana alam dan bencana sosial,
10. Masih terdapatnya pengangguran, kemiskinan, keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 dan daerah rawan bencana.
11. Belum optimalnya penanganan penyandang cacat fisik dan mental serta lansia
12. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya Dayak berskala regional, nasional dan internasional.

#### **2.3.1. G. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
2. Masih terbatasnya anggaran dalam upaya peningkatan pengadaan alat-alat pengolah sampah.
3. Pelayanan kebersihan yang telah mencapai keberhasilan hanya dari pelayanan pengangkutan.
4. Masih belum optimalnya infrastruktur yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, seperti sarana prasarana persampahan, sarana prasarana air limbah, sarana prasarana limbah berbahaya dan beracun (B3).
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang tidak sebanding dengan peningkatan timbunan sampah, dan penggunaan teknologi pengelolaan sampah.
6. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup.

#### **2.3.1. H. Permasalahan Bidang Tenaga Kerja**

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Landak terkait erat dengan kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (65,5%) berlatar belakang pendidikan rendah (SMP ke bawah) dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (60,43%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millennial, Generasi Z, dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki



dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih rendah menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja meskipun bertambah, namun pertumbuhannya relatif lambat.

Pasar kerja Indonesia, termasuk Kabupaten Landak, menunjukkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga upah yang diperoleh tenaga kerja rendah. Banyak permasalahan dari banyak bidang dalam pembangunan daerah bersumber dari kualitas SDM yang masih rendah. Hal ini dapat dipengaruhi karena stimulasi dari bidang ketenagakerjaan yang kurang optimal. Berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang tenaga kerja, antara lain:

1. Hubungan kerja yang harmonis belum sepenuhnya tercapai
2. Perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja belum optimal
3. Pelatihan kerja yang belum mengcover seluruh angkatan kerja, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja
4. Tidak tersedianya pejabat fungsional mediator hubungan industrial dan pengantar kerja
5. Laporan penempatan tenaga kerja dari perusahaan yang membuka lowongan kerja belum optimal
6. Kekurangan SDM di Bidang Naker, HI dan Trans.

#### **2.3.1. I. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDG's. Masih adanya kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) khususnya yang dialami perempuan dan anak menjadi tantangan pemerintah untuk mempercepat program pemberdayaan perempuan untuk mengejar kemajuan laki-laki. Prinsipnya, no one left behind. Kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan harus diupayakan bersama. Berikut beberapa uraian permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

1. Masih ada kesenjangan gender dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.



3. Masih rendahnya keterwakilan perempuan pada jabatan publik dan politik.
4. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutmaan gender (PUG), termasuk ketersediaan data dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan daripada laki laki.
6. Masih rendahnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.
7. Belum optimalnya pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan forum anak.
9. Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat setiap tahun.

#### **2.3.1. J. Permasalahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Tiga Tertib Administrasi Kependudukan meliputi Tiga Tertib; Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib Penerbitan NIK dan Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan, maka terjadi perubahan secara signifikan dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan, namun masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Belum optimalnya kegiatan dalam rangka mewujudkan akurasi data kependudukan skala Kabupaten yang akurat dan valid
2. Belum tertatanya jumlah penduduk secara maksimal berdasarkan sistem administrasi kependudukan.
3. Intensitas sosialisasi tentang berbagai kebijakan administrasi kependudukan belum maksimal.
4. Terbatasnya infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sistem administrasi kependudukan.
5. Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domisilinya lebih dari 1 tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de yure mereka masih terdata di daerah asalnya;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya sistem administrasi kependudukan, seperti perubahan tempat tinggal, status perkawinan dan tingkat pendidikan anak.
7. Belum optimalnya pelaksanaan inovasi pelayanan terintegrasi dengan sistem digitalisasi.



8. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten oleh Perangkat Daerah dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Landak untuk berbagai keperluan sebagaimana diamanatkan didalam undang-undang.
9. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Landak.
10. Terbatasnya Anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas bidang administrasi kependudukan sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana yang telah direncanakan.
11. Belum Optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lainnya tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Kondisi sarana dan prasarana pendukung SIAK dan Perekaman KTP-el di Kecamatan, masih belum optimal dikarenakan beberapa tempat kecamatan peralatan yang tidak bisa difungsikan lagi, sehingga beberapa kecamatan mengalami kendala pelayanan adminduk (perekaman ktp-el). Disamping itu kendala jaringan yang tidak mendukung untuk pelayanan.

#### **2.3.1. K. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) dari pemerintah. Dengan demikian tujuan akhir pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan, terutama di desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Pasal 112 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014). Kapasitas dan Kapabilitas pendamping menjadi factor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam upaya membangun dan memandirikan kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.



2. Kurangnya kapasitas/kemampuan sumberdaya manusia, kelembagaan, dan pendanaan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa.
4. Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas tenaga pendamping desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang guna melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.3.1. L. Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB**

Jumlah penduduk Kabupaten Landak bertambah setiap tahunnya meskipun dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang masih tergolong rendah. Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu dikendalikan/ditata dan persebarannya pun belum merata antar kecamatan. Di sisi lain, pertambahan penduduk lansia cenderung membebani pengeluaran daerah, jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan produktif.

Permasalahan dalam KB terkait dengan masih terdapat penduduk usia di bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang belum terpenuhi (unmeet need), target realisasi pencapaian akseptor KB baru tergolong rendah. Adapun beberapa permasalahan lain terkait dengan bidang pengendalian penduduk dan KB antara lain:

1. Angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang makin menurun.
2. Partisipasi Pria dalam ber KB masih Rendah.
3. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR).
4. Masih rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB.

#### **2.3.1. M. Permasalahan Bidang Perhubungan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum karena kurangnya daya tarik.



2. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum disebabkan banyak faktor, diantaranya masih sedikitnya jumlah armada transportasi umum, rendahnya travel time (waktu tempuh), kurangnya kualitas transportasi umum, tidak terintegrasinya transportasi umum sehingga justru akan menyulitkan penumpang Ketika akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang angkutan umum untuk kenyamanan dan keamanan penumpang.
4. Meningkatkan terintegrasinya layanan angkutan umum yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pengangkutan kepada masyarakat.
5. Menyeimbangkan pertumbuhan jumlah kendaraan terhadap pertumbuhan kapasitas jalan.
6. Masih seringnya terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
7. Berdasarkan data dari Kabupaten Landak Dalam Angka Tahun 2021 jumlah banyaknya korban kecelakaan di tahun 2020 sebanyak 393 korban.
8. Belum memenuhinya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang perhubungan.

#### **2.3.1. N. Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informasi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya server yang mampu mengakomodir seluruh OPD.
2. Kurang optimalnya layanan publik dan layanan administrasi.
3. Kurangnya Pelayanan publik berbasis teknologi dan berbasis online sehingga kurang efektif di masa pandemic ini apabila masih menggunakan system layanan public tatap muka.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dapat melakukan operasionalisasi layanan publik berbasis Online dan minimnya sumber daya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.
5. Belum diterapkannya layanan satu data.
6. Literasi digital masyarakat masih rendah.

Literasi digital bagi masyarakat sangat diperlukan, kemampuan atau literasi digital sangat diperlukan masyarakat Kab. Landak khususnya yang berada pada desa-desa tertinggal. Diskominfo Kab. Landak mencatat 79 dari 156 desa di Kab. Landak belum tersentuh sinyal komunikasi (blank spot). Perlunya percepatan perluasan ditalisasi di Kab. Landak agar perekonomian semakin meningkat dan pembelajaran di dunia Pendidikan tidak terhambat.



### **2.3.1. O. Permasalahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Permasalahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas koperasi dan UKM pada umumnya rendah dikarenakan rendahnya keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.
2. Keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti permodalan, bahan baku, teknologi pasar dan informasi.
3. Belum efektifnya pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga koperasi dan UMKM belum mampu untuk memanfaatkan peluang usaha secara maksimal, dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
4. Terbatasnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip dan praktik berkoperasi.
5. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak masih kurang, mengingat cakupan binaan dan luasnya wilayah binaan.
6. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata.
7. Saat ini koperasi yang ada masih belum sepenuhnya dapat dipercaya masyarakat, mengingat pengalaman sebelumnya koperasi selalu menguntungkan pengurus.
8. Embrio usaha dan potensi yang ada cukup terbuka, namun dibatasi oleh modal usaha membuat peluang yang ada sulit dicapai secara maksimal.
9. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
10. Rendahnya daya saing produk-produk UMKM yg kurang mampu bersaing di pasar bebas.
11. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.
12. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM dibidang tertib hukum dan tertib niaga masih rendah .
13. Pengambilan kebijakan pembinaan terhadap para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal, akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan mengenai perkembangan usahanya yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah.
14. Belum adanya pusat informasi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi.



15. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representative.
16. Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi.

### **2.3.1. P. Permasalahan Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah.
2. Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP &TK.
3. Belum semua layanan menggunakan sistem online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh seketika, akibatnya pengambilan kebijakan belum berdasarkan informasi atau data yang cukup.
4. Regulasi investasi dan atau penanaman modal sering berubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha (iklim investasi).
5. Belum adanya data penanaman modal yang valid sampai dengan tahun 2019.
6. Realisasi investasi pada semester pertama tahun 2019 baru mencapai 6,67%.
7. Terbatasnya sistem informasi promosi dan peluang investasi.
8. Kemampuan manajemen promosi dan penanaman modal dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian belum optimal.
9. Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang akurat dan detail pada masing-masing satuan kerja terkait, sehingga pada saat dilakukan promosi investasi calon investor masih meragukan terhadap data peluang investasi yang dipromosikan.
10. Lemahnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.
11. Regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor.
12. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur masih menjadi penghambat investasi.
13. Belum Pahami Pelaku Usaha terhadap kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online.
14. Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Landak belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional.
15. SDM tidak memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah.



### **2.3.1. Q. Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Adapun permasalahan dari bidang kepemudaan dan olahraga antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan data keolahragaan.
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
3. Belum tersedianya sarana prasarana kegiatan kepemudaan.
4. Belum optimalnya sistem manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan, kewirausahaan dan pengembangan kepeloporan pemuda.
5. minimnya prestasi olahraga yang dicapai pemuda baik ditingkat provinsi maupun nasional.

### **2.3.1. R. Permasalahan Bidang Statistik**

Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bidang statistik, yaitu:

1. Belum optimalnya integrasi data statistic sectoral. Hal tersebut disebabkan data sectoral tersebar di berbagai perangkat daerah, baik instansi di lingkungan pemerintah kabupaten maupun instansi vertikal di daerah dan belum semuanya terintegrasi dalam sebuah system,
2. Masih ditemukan data yang berbeda untuk satu jenis data tertentu karena perbedaan sumber data dan metode pengumpulan,
3. Belum diimplementasikannya satu data Kabupaten Landak.

### **2.3.1. S. Permasalahan Bidang Persandian**

Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bidang persandian, yaitu:

1. Belum optimalnya tata Kelola persandian dalam rangka keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya persandian
3. Belum optimalnya operasional pengamanan persandian.
4. Belum optimalnya pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah.
5. Belum diterapkannya tanda tangan elektronik di semua tanda tangan daerah sebagai wujud implementasi bentuk transformasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

### **2.3.1. T. Permasalahan Bidang Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:



1. Belum terfasilitasinya prasarana dan sarana secara menyeluruh, sehingga pagelaran seni budaya kurang optimal.
2. Salah satu bentuk pelestarian keberlangsungan nilai luhur dan budaya lokal di Kabupaten Landak seperti upacara ritual Notokng di Kec. Sengah Temila, upacara adat naik dango, dan tradisi yang lain. Tradisi-tadisi ini akan memiliki nilai lebih apabila dapat dilestarikan dan dibuat berupa acara tahunan, sehingga generasi masa kini akan tetap ingat dan tertarik untuk mempelajari. Namun hal ini terkendala oleh minimnya prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan-kegiatan budaya, seperti belum adanya Gedung kesenian.
3. Masih lemahnya pengelolaan kegiatan adat, tradisi dan seni yang masih bersifat komunal, sehingga belum mendatangkan manfaat ekonomi dan belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk asset promosi daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi ikon Kabupaten Landak

#### **2.3.1. U. Permasalahan Bidang Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya budaya dan minat baca masyarakat, dan menganggap bahwa perpustakaan hanya sekedar tempat meminjam buku, padahal salah satu manfaat membaca adalah meningkatnya pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat. Minat baca masyarakat di Kabupaten Landak masih rendah, sehingga masih banyak ditemukan melek huruf atau buta aksara.
2. Kurang optimalnya kualitas dari masing-masing perpustakaan yang berada di setiap sekolah di Kabupaten Landak.  
Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Kualitas perpustakaan sangat diperlukan, baik dari fisik bangunan, sarana prasarana penunjang hingga buku-buku yang tersedia harusnya buku-buku yang update dan berkualitas.
3. Kegiatan unit kerja Perpustakaan meliputi pengadaan bahan perpustakaan, pendataan dan penataan, penyimpanan serta pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan.
4. Belum adanya perpustakaan keliling.



Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, disebutkan bahwa masyarakat di daerah yang wilayahnya terpencil, terisolasi dan terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling atau bentuk layanan Perpustakaan lainnya.

5. Kerjasama antar perpustakaan belum optimal.

Kerjasama perpustakaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan. Karena perpustakaan harus mampu menyediakan pelayanan kepada anak-anak, remaja dan kalangan dewasa, dengan konsep totalitas dalam pelayanan mencakup aspek edukatif, informasi pribadi, rekreasi, kepentingan pribadi dan kebutuhan karir.

6. Sistem teknologi informasi perpustakaan masih kurang.

### 2.3.1. V. Permasalahan Bidang Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana kearsipan daerah dan perangkat daerah belum memadai;
2. Pengelolaan arsip dinamis maupun statis belum dilakukan secara optimal, baik pada perangkat daerah, BUMD, pemerintah desa, ormas, orpol, sekolah maupun perseorangan.
3. Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan akan menghadirkan manfaat yang besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik dan terpercaya pada setiap Lembaga dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya.
4. Kualitas dan kuantitas SDM arsiparis dan pengelola arsip belum memadai
5. Fungsi dari adanya arsiparis dalam suatu instansi atau pemerintah daerah adalah dapat memberikan sumbangan nyata untuk peningkatan efisiensi operasional instansi (manajemen arsip dinamis) dan mampu melaksanakan manajemen arsip statis dengan sasaran utama pelestarian bukti dan tanggung jawab secara efisiensi.
6. Penataan kearsipan tidak sekadar disimpan atau ditumpuk begitu saja, tetapi perlu diatur cara penyimpanannya dengan melalui beberapa tahapan dengan tujuan sistem pengarsipan yang rapi dan ketika arsip dibutuhkan mudah ditemukan kembali. Terkadang terlihat disuatu instansi atau organisasi dalam



memperlakukan arsip itu tidak pada semestinya yang nantinya berdampak pada instansi itu sendiri bila arsip itu berguna sebagai informasi yang berkenaan dengan pengambilan keputusan Pengelolaan arsip di Pemerintah Kabupaten Landak belum dilakukan secara optimal.

7. Rendahnya pemahaman SDM arsiparis terkait dengan peraturan perundang-undangan kearsipan.
8. Rendahnya kesadaran aparaturnya dalam pengelolaan arsip.
9. Belum adanya Gedung depot arsip.

#### **2.3.1. W. Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya produksi perikanan dari tahun 2018 (1.324,67 ton) menjadi 1.002,96 ton di tahun 2021.
2. Menurunnya produksi perikanan di Kabupaten Landak pastinya dipengaruhi oleh banyak hal baik faktor alam, faktor ekonomi dan faktor social. Akibat dari pemanasan global dimungkinkan terjadi anomali iklim dan perubahan kualitas lingkungan yang sulit diprediksi.
3. Prasarana dan sarana perikanan (budidaya, tangkap) masih terbatas.
4. Tingkat konsumsi ikan masih rendah.
5. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB cenderung statis.
6. Belum optimalnya diversifikasi usaha perikanan.
7. Kualitas SDM dan kelembagaan petani perikanan masih rendah.
8. Perlu peningkatan kualitas SDM khususnya dalam teknologi budidaya agar dapat memproduksi ikan yang melimpah namun tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Selain itu perlunya pelatihan pemanfaatan teknologi dan informasi agar kegiatan budidaya hingga promosi dapat berjalan dengan lancar dan berdaya saing.
9. Akses asuransi/perindungan usaha dan permodalan perikanan masih kurang.

#### **2.3.1. X. Permasalahan Bidang Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bidang pariwisata, yaitu:

1. Masih kurangnya kolaborasi masyarakat, pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan pariwisata,
2. Kurangnya promosi pariwisata menggunakan media promosi dan iklan yang kreatif,



3. Fasilitas infrastruktur terutama jalan masih sangat terbatas sehingga membuat akses ke tempat-tempat wisata terutama wisata alam sangat sulit,
4. Terbatasnya prasarana objek wisata unggulan daerah yang menjadi daya tarik wisata, misalnya fasilitas/ sarana penunjang seperti MCK, tempat istirahat, taman bermain, dan kios cinderamata di objek wisata,
5. Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan daya tarik wisata tahunan
6. Destinasi Pariwisata di Kabupaten Landak yang belum berwawasan lingkungan (sustainable tourism), konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal serta masih rendahnya SDM Masyarakat dalam pengelolaan Pariwisata
7. kurangnya pelatihan untuk meningkatkan daya saing pelaku Ekraf, rendahnya sumber pembiayaan dan modal, terbatasnya sarana ruang kreatif, terbatasnya distribusi penjualan produk Ekraf, serta rendahnya kesadaran pelaku Ekraf untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karyanya
8. Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Landak yang belum berdasarkan acuan riset (target pasar wisata), komunikasi pemasaran wisata yang belum terpadu (branding wisata), kurang sinergisnya kemitraan antar pelaku usaha pariwisata, pelaksanaan event pariwisata yang belum professional serta masih lemahnya daya saing dalam pemasaran wisata.

#### **2.3.1. Y. Permasalahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan**

Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, yaitu:

1. Banyaknya program-program dari pemerintah yang tidak berkelanjutan bahkan minimnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengembangan pertanian.
2. Masih rendahnya daya dukung lahan terhadap peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan. Hal ini didukung pula dengan tren alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun terus meningkat
3. Ketersediaan benih masih rendah (UPT, TPH).
4. Menurunnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan pola konsumsi belum memenuhi pola pangan harapan. Hal ini ditandai dengan skor pola pangan harapan dalam kurun lima tahun terakhir di Kabupaten Landak. (86,00 (2017); 83,30 (2018); 80,30 (2019); 76,48 (2020)),
5. Produksi tanaman padi cenderung menurun namun produktivitas padi per hektar cenderung naik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,



6. Jumlah produktivitas perkebunan kopi, karet dan kakao menurun. Hal ini berbanding terbalik dengan namun jumlah produktivitas kelapa sawit dan Lada yang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,
7. Produksi pertanian dan perkebunan yang fluktuatif serta pemasaran hasil produksi yang kurang stabil,
8. Masih kurangnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan oleh petani,
9. Terbatasnya kapasitas penyuluh mengenai teknologi pertanian/perkebunan terbaru
10. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.
11. Masih rendahnya SDM di bidang pertanian baik dalam proses budidaya maupun pemasaran hasil produksi.
12. Kurangnya akses terhadap permodalan, asuransi maupun perlindungan usaha bagi para petani.
13. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian.
14. Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional.
15. Belum optimalnya kemampuan manajemen usaha peternak baik dalam proses produksi maupun pasca produksi.
16. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular.
17. Kurang terintegrasinya akses infrastruktur pada Kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan.

#### **2.3.1. Z. Permasalahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016 hingga 2021.
2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2016 hingga 2021 mengalami penurunan kurang lebih 6,18%, yakni dari 6,81% di tahun 2016 menjadi 0,63% di tahun 2021. Kontribusi sektor pertambangan tidak cukup besar menyumbang PDRB jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Peningkatan sektor pertambangan sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor PDRB.
3. Permasalahan Bidang Perdagangan
4. Permasalahan bidang Perdagangan diantaranya adalah sebagai berikut:



5. Kurang maksimalnya penggunaan aset los dan kios di pasar oleh para pedagang.
6. Kurangnya kesadaran para pedagang dalam membayar kewajiban retribusi pemakaian aset daerah.
7. Kurangnya kesadaran pihak ketiga dalam membayar kewajibannya kepada pemerintah daerah untuk melunasi tunggakan retribusi.
8. Belum adanya sanksi yang jelas.

#### **2.3.1. AA. Permasalahan Bidang Industri**

Permasalahan bidang Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Belum berkembangnya hilirisasi industri pengolahan yang memberikan nilai tambah cukup tinggi terutama untuk hasil-hasil tanaman perkebunan.
2. Terbatasnya modal untuk mendukung usaha dalam rangka pengembangan usaha.
3. Terbatasnya tenaga pembina dibidang pengembangan teknologi industri.
4. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan para pelaku industri.

#### **2.3.1. BB. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik**

Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum dan politik, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Belum optimalnya pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan administrasi pembangunan
3. Belum optimalnya pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat
4. Belum optimalnya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Kesadaran Pendidikan politik masyarakat masih rendah
6. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah
7. Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun.
8. Potensi konflik terhadap ketentraman dan ketertiban masih tinggi.
9. Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda masih rendah.
10. Masih rendahnya potensi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya.

#### **2.3.1. CC. Permasalahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu:

1. Belum optimalnya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi,



2. Masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat. Era industri 4.0 menuntut ASN sebagai human capital untuk memiliki integritas, jiwa nasionalisme, profesional, berwawasan internasional/global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki kemampuan melayani (hospitality) dan menjalin jejaring serta memiliki jiwa entrepreneurship (kewirausahaan) dan inovatif. Kompetensi pegawai dapat ditingkatkan salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan,
3. Belum memadai data dan informasi yang disediakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan,
4. Pengurusan administrasi yang masih kurang maksimal dari pemerintah ditinjau dari terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan baik sarana teknologi maupun informasi.
5. Permasalahan Bidang Perencanaan Pembangunan
6. Permasalahan bidang Perencanaan Pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:
7. Belum optimalnya kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar pusat dan daerah.
9. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan, terutama koordinasi perencanaan bidang ekonomi, fisik, dan prasarana, bidang sosial budaya, dan bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

#### **2.3.1. DD. Permasalahan Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan bidang Penelitian dan Pengembangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi penelitian dan pengembangan daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara implementatif akan



memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah.

3. Belum optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan di daerah secara tepat dan terarah dengan SKPD, kabupaten/kota, dan provinsi.

#### **2.3.1. EE. Permasalahan Bidang Keuangan**

Permasalahan bidang Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Masih perlu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
2. Rendahnya kemandirian fiskal daerah.
3. Terbatasnya sumber penerimaan pendapatan daerah, terutama penerimaan
4. dari Pendapatan Asli Daerah.
5. Potensi penerimaan daerah (DBH, DAU, DAK, dll.) yang cenderung menurun.
6. Penataan kelembagaan keuangan.

#### **2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Landak yakni sebagai berikut:

1. Belum optimalnya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tatakelola pemerintahan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan SPBE dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Belum terpenuhinya akses infrastruktur pelayanan dasar.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana umum.
5. Masih kurangnya infrastruktur pendukung perekonomian dan pengembangan wilayah.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
7. Ketersediaan sarana pendidikan belum memadai.
8. Belum Optimalnya pengelolaan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan non formal.
9. Ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata.
10. Belum berimbang rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk.
11. Tingkat Kesehatan masyarakat masih relative rendah.
12. Masih tingginya prevalensi Stunting.
13. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan belum maksimal.
14. Masih rendahnya cakupan perlindungan Jaminan Sosial dan Ketenaga kerjaan.
15. Masih tingginya Angka Kemiskinan dan masih adanya kemiskinan ekstrem.



16. Belum tercapainya kesejahteraan sosial, ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
17. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam sebagai pendorong perekonomian masyarakat dan potensi produk unggulan daerah.
18. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Inflasi masih perlu dikendalikan.



## BAB III

# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 pada dasarnya menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024, lebih memperhatikan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dari sektor sektor potensial, kondisi perekonomian global dan regional yang ditunjukkan untuk mengalokasikan dengan suatu pendekatan money follow program yang pada akhirnya dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien.

Dampak akibat terjadinya Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 dampaknya masih dirasakan sampai saat ini sangat mempengaruhi ekonomi daerah dimana pendapatan daerah terkena dampak akibat perekonomian yang melambat baik lokal, regional, nasional dan internasional, walaupun pada tahun 2022 sudah terjadi kebangkitan ekonomi (rebound) yang ditunjukkan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak pada angka 4,89%. Untuk tahun 2025 masih akan melihat perkembangan lebih lanjut sampai semester pertama tahun 2024 untuk menentukan pengaruhnya pada proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dari arahan pemerintah pusat.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Landak serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dan diupayakan tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional tahun 2024.

#### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Landak**

Pertumbuhan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi

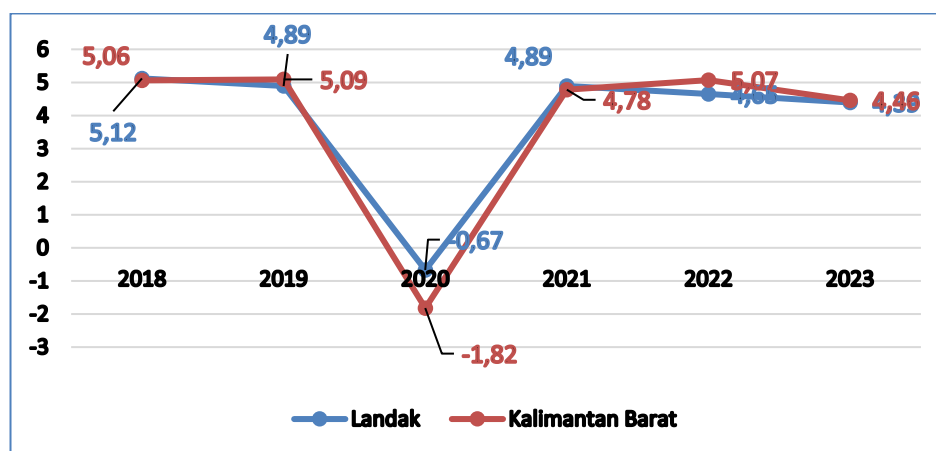


pula pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang dihasilkan, sebagai balas jasa seluruh kegiatan ekonomi. Naik turunnya angka PDRB bisa juga disebut laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Landak atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 12.775,76 miliar di tahun 2022 menjadi Rp. 13.684,30 miliar di tahun 2023. Sementara, PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) meningkat dari Rp. 7.652,66 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp. 7.988,20 miliar pada tahun 2023, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah 4,39%.

PDRB Kalbar atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 274 trilyun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (20,08%), sektor industri pengolahan (15,65%), dan sektor perdagangan (14,385%). Struktur ekonomi ini masih menempatkan sektor pertanian sebagai leading sector. Namun, jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir tampaknya terjadi pergeseran sektoral, dimana sedikit demi sedikit sektor pertanian tergeser oleh industri pengolahan dan perdagangan.

Ekonomi Kalimantan Barat mengalami perlambatan dimana tahun 2023 turun sebesar 4,46 persen yang sebelumnya tahun 2022 yaitu 5,07 persen, penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ini dikarenakan ada beberapa faktor baik itu dari adanya El Nino yang berdampak pada sektor pertanian khususnya pangan, juga karena terkontraksinya pertumbuhan sektor pertambangan sebesar -15,81 persen dan pada sisi PDRB pengeluaran dimana ekspor barang dan jasa Kalimantan Barat berkontraksi sebesar 23,93 persen dengan adanya kebijakan hilirisasi atau pelarangan ekspor barang mentah khususnya bauksi, dan yang terakhir juga karena masih belum stabilnya kondisi Geopolitik dunia.



**Gambar 3. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak**

*Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2019-2024 dan Kalimantan Barat Dalam Angka 2019-2024, BPS*

Struktur Perekonomian, Pada tahun 2023 struktur perekonomian di Kabupaten Landak masih sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.



Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Landak adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 15,08% dan sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 10,01% pada pembentukan PDRB Kabupaten Landak tahun 2023.

**Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak (persen) 2018-2023**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,11	5,68	1,53	5,03	2,73	1,45
Pertambangan dan Penggalian	4,02	3,82	0,63	5,18	-0,03	-3,31
Industri Pengolahan	3,03	4,82	-1,00	5,75	3,37	2,73
Pengadaan Listrik dan Gas	2,78	4,37	12,31	1,34	4,23	15,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,75	7,00	4,45	6,41	6,48	6,84
Konstruksi	3,89	4,04	-2,46	5,48	0,85	4,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,83	5,22	-4,43	3,77	12,39	7,22
Transportasi dan Pergudangan	5,94	5,16	-6,64	-7,14	18,78	5,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,32	6,66	-17,55	5,93	9,48	7,83
Informasi dan Komunikasi	6,15	7,03	8,00	8,14	5,37	8,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,99	-0,87	-0,45	3,54	1,85	5,23
Real Estat	4,03	2,72	1,22	4,39	0,32	10,02
Jasa Perusahaan	4,47	4,48	-3,76	0,61	11,68	9,22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	5,38	2,06	-1,11	0,93	6,23
Jasa Pendidikan	3,35	4,31	-5,41	5,06	6,01	8,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,87	4,22	12,83	34,02	9,10	14,30
Jasa lainnya	5,64	4,74	-12,04	0,84	13,41	16,80
<b>PDRB Landak</b>	<b>5,09</b>	<b>5,01</b>	<b>-0,67</b>	<b>4,89</b>	<b>4,65</b>	<b>4,39</b>
<b>PDRB Kalimantan Barat</b>	<b>5,07</b>	<b>5,09</b>	<b>-1,83</b>	<b>4,80</b>	<b>5,07</b>	<b>4,46</b>

Sumber: Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2024, BPS

**Tabel 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Landak**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.429,91	3.717,95	3.844,66	4.247,15	4.700,21	5.049,21
Pertambangan dan Penggalian	237,30	253,20	263,43	287,23	289,81	282,98
Industri Pengolahan	1.116,52	1.187,36	1.195,97	1.321,50	1.441,83	1.450,40
Pengadaan Listrik dan Gas	0,89	0,99	1,15	1,19	1,26	1,46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,39	1,51	1,60	1,74	1,86	2,06



Konstruksi	983,45	1.044,02	1.067,93	1.154,33	1 223,55	1.283,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.438,08	1.572,53	1.556,52	1.627,05	1 902,87	2.062,93
Transportasi dan Pergudangan	199,45	220,77	227,10	217,91	277,25	326,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261,70	288,59	246,57	264,82	290,12	314,39
Informasi dan Komunikasi	291,88	322,37	352,39	381,70	402,78	433,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	253,38	258,11	255,40	274,70	294,76	306,78
Real Estat	320,41	343,06	347,67	355,21	361,68	390,95
Jasa Perusahaan	49,71	53,34	50,74	50,75	57,56	63,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	702,45	776,65	825,78	830,24	880,34	940,09
Jasa Pendidikan	242,71	260,80	246,10	261,62	277,49	302,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,21	176,88	204,86	280,98	307,43	352,31
Jasa lainnya	65,67	71,56	58,43	56,03	64,95	76,69
PDRB	9.755,30	10,549,68	10.746,29	11.614,17	12 775,76	13.684,30

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2024, BPS

**Tabel 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Landak (miliar rupiah), 2018-2022**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020 (M)	2021 (M)	2022 (M)	2023 (M)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	244.775,92	2.604,73	2.644,46	2.775,45	2 851,18	2.892,20
Pertambangan dan Penggalian	144.162,20	148,17	149,10	156,82	156,78	151,59
Industri Pengolahan	811.538,03	845,98	837,54	885,50	915,37	940,40
Pengadaan Listrik dan Gas	573,34	0,60	0,67	0,68	0,71	0,82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.057,36	1,13	1,18	1,251,6	1,332,6	1,42
Konstruksi	565.557,50	580,76	566,45	596,96	602,05	630,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.038.398,08	1.087,21	1.039,08	1.078,23	1 211,8	1,299
Transportasi dan Pergudangan	134.420,32	140,91	131,55	122,15	145,101	153,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	178.165,43	189,27	156,06	165,30	180,98	195,16
Informasi dan Komunikasi	200.200,08	215,46	232,69	251,63	265,14	286,91



Jasa Keuangan dan Asuransi	191.036,34	188,73	187,88	194,53	198,12	208,48
Real Estat	217.688,41	221,59	224,29	233,62	234,36	257,85
Jasa Perusahaan	31.267,22	32,67	31,44	31,63	35,33	38,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	410.876,94	432,97	441,87	436,95	441,02	468,50
Jasa Pendidikan	170.051,50	175,81	166,29	174,71	185,21	200,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105.366,41	109,82	123,91	166,06	181,17	207,08
Jasa lainnya	44.417,69	46,52	40,79	41,13	46,65	54,49
PDRB	6.710.002,78	7.022,18	6.975,27	7.312,66	7,652,35	7.988,20

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2023, BPS

PDRB Perkapita, PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. PDRB per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Landak pada tahun 2023 adalah 33,08 juta rupiah meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 31,51 juta rupiah. Yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Landak selama setahun adalah pada tahun 2023 adalah sebesar 33,08 juta rupiah. Hal ini dapat terjadi akibat semakin membaiknya iklim usaha investasi tiap – tiap sektor usaha sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Landak.

### 3.1. 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Landak, akan banyak dipengaruhi tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Kabupaten Landak sendiri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 tertuang sejumlah sasaran ekonomi makro pemerintah yang hendak dicapai dalam kurun lima tahun kedepan.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD 5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada



tahun 2025. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada RKP tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,5% - 7,5 persen dan 5,0 - 5,7 persen; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,374-0,377; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 73,99 - 74,02.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Pemerintah Kabupaten Landak sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada kisaran 5,01 persen, yang masih dibawah kisaran target asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 5,8 - 5,7 persen (Rancangan Awal RKP). Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Landak sebagaimana sasaran Nasional tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (pro growth, pro job dan pro poor), serta pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Data menunjukkan bahwa nilai investasi berskala nasional di tahun 2021 dengan nilai 479 740,60 juta rupiah, sedangkan di tahun 2022 dengan nilai 875 917,10 juta rupiah.

Selain itu stabilisas perekonomian suatu negara sangat jelas dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, disamping variabel ekonomi makro lainnya. Tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif dari suatu negara, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak terutama dalam hubungannya dengan posisi dari suatu negara dalam memperbaiki variabel-variabel ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi perpolitikan dan stabilitas keamanan di Indonesia.

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan



dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,51 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang, yaitu sebesar 45,40 persen. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan I-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 0,51 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar 12,45 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami kontraksi terdalam adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP), yaitu sebesar 3,01 persen. Secara struktur, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 22,83 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 49,28 persen.

Untuk PDRB menurut pengeluaran pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang terkontraksi sedalam 13,98 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 45,40 persen; diikuti oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 29,63 persen; Komponen PMTB sebesar 10,06 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,22 persen; dan Komponen PK-P sebesar 4,53 persen Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Barat masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Barat yaitu sebesar 49,28 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 32,22 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,00 persen; Komponen PK-P sebesar 10,55 persen; Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang sebesar 9,30 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,49 persen. (Berita Resmi Statistik No. 28/05/61/Th. XXVII, 6 MEI 2024)

Prospek Perekonomian Daerah dengan dinamika perekonomian global yang masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi, divergensi pertumbuhan antar negara dan ketegangan geopolitik diperkirakan akan berdampak terhadap harga energi dan pangan dan inflasi global. Respons kebijakan moneter ketat diperkirakan masih akan berlangsung sebagaimana tercermin dari kenaikan suku bunga. Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2024 diperkirakan masih akan melanjutkan pertumbuhan secara moderat. Kinerja lapangan usaha utama dan tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan masih cukup kuat ditambah perbaikan kinerja ekspor menjadi sentimen positif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian setempat. Untuk keseluruhan tahun 2024, inflasi di Kalimantan Barat diperkirakan bergerak stabil pada rentang sasaran target inflasi nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).



Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat didorong oleh peningkatan pagu anggaran APBD. Peningkatan anggaran belanja pada APBN 2024 juga berdampak pada peningkatan belanja pemerintah pusat di daerah melalui kementerian dan lembaga lainnya. Selain itu, penyaluran bantuan sosial pemerintah di tahun 2024 yang terus berlanjut diperkirakan mampu mendorong konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,01%. Dasar proyeksi tersebut hasil analisa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yaitu sebesar 4,65% sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,89%. Secara umum di Provinsi Kalimantan Barat dan secara khusus di Kabupaten Landak, selain itu sebagai acuan berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Kabupaten Landak Tahun 2018 - 2023 ada 5 (lima) sektor yang tidak terpengaruh oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid tersebut dan bisa dianalisa bahwa sektor-sektor tersebut merupakan fundamental perekonomian di Kabupaten Landak, adapun kelima sektor sebagai penyumbang kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Landak tersebut berdasarkan data time series Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak, 2018-2023**

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	35,16	35,24	35,78	36,57	36,79	37,23
2	Pedagang Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair Of Motor Vehicles and Motorcycles	14,74	14,91	14,48	14,01	14,89	15,08
3	Indusri Pengolahan/Manufacturing	11,45	11,25	11,13	11,38	11,29	10,20
4	Konstruksi/Construction	10,08	9,9	9,94	9,94	9,58	9,38
5	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	7,20	7,36	7,68	7,15	6,89	6,87

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelima sektor tersebut merupakan sektor penyumbang distribusi bagi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Landak bahkan pada saat pandemi covid pun kelima sektor tersebut tidak mengalami perlambatan ekonomi secara signifikan, dengan penjelasan sbb:



### **1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing**

Dengan rata-rata kontribusi sebesar 36,12% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak penting dalam perekonomian di Kabupaten Landak. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk pedesaan, pemasok pangan, penggerak transaksi domestik dan lainnya. Mengingat begitu pentingnya Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Landak, maka kemajuan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sangat perlu tetap dijaga untuk menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk dan menghindari dari bahaya kelaparan apalagi Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten yang berbasis pada sektor pertanian karena sektor ini merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Landak disamping sub sektor lainnya, serta dapat pula menjadi penunjang pertumbuhan sektor usaha lainnya, Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Landak menempatkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai elemen penting dalam perumusan kebijakan yang akan diterapkan dan terbukti berhasil menjaga kesinambungan sektor ini dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak bahkan dimasa pandemic covid sekalipun.

### **2. Sektor usaha Pedagang Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair Of Motor Vehicles and Motorcycles**

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran sepanjang tahun 2023 terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Landak sebesar 15,08% sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2022 diawal masa pandemi covid yaitu sebesar 14,89%, tetapi secara umum dalam data series yang tersaji pada tabel diatas sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan produk domestik regional bruto di Kabupaten Landak cenderung stabil dalam menyumbang distribusi kontribusi bagi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Landak dengan rata menyumbang 14 – 15 % bagi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) pada periode 2018 sampai 2023.

### **3. Sektor Usaha Industri Pengolahan/Manufacturing**

Sektor industri manufaktur masih mencatatkan kinerja positif dengan menyumbangkan kontribusi bagi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 11,29% di



tahun 2022 dan menurun menjadi 10,20% pada tahun 2023, penurunan pesanan domestic dan luar negeri, masih banyak persediaan produk, ketersediaan bahan baku dan factor musiman, melemahnya permintaan global untuk produk ekspor industri.

Strategi pemulihan ekonomi yang dapat berkaitan dengan industri pengolahan antara lain: (1) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat yang kompetitif; (2) penyediaan stimulus dunia usaha; (3) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui rehiring dan retraining tenaga kerja; (4) percepatan pembangunan Kawasan Industri Prioritas untuk menampung relokasi investasi; (5) perluasan pendanaan proyek industri prioritas; dan (6) peningkatan realisasi investasi yang berskala besar dan menyerap tenaga kerja. Berbagai kebijakan ini sebenarnya telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir sehingga jika dilihat dari time series sektor usaha industry pengolahan/manufacturing termasuk salah satu sektor yang cukup stabil dalam menyumbang kontribusi bagi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Landak.

#### **4. Sektor Usaha Konstruksi/Construction**

Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai upaya pendukung penggerak perekonomian secara nasional juga terjadi di Kabupaten Landak dimana pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan berpengaruh pada sektor usaha konstruksi dan menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Kabupaten Landak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase sektor konstruksi terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Landak yang secara trend konsisten menyumbang 9 – 10% dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) selama 5 (lima) tahun terakhir, Walaupun terjadi pandemi covid ditahun 2020 sehingga mengakibatkan perlambatan ekonomi dan sampai saat ini masih belum mereda meskipun penularannya telah dapat dikendalikan, pembangunan infrastruktur tidak bisa diabaikan untuk tidak dilaksanakan karena dengan pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi dimana peran sektor konstruksi dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur dan bangunan, hubungan timbal balik dengan sektor sektor pendukung, bahkan menjadi fasilitator dalam pergerakan dan pertumbuhan barang dan jasa pemerataan pembangunan untuk semua sektor juga didukung oleh sektor konstruksi antara lain ketahanan pangan di tiap daerah, pemenuhan kebutuhan energi listrik, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan peningkatan daya tarik pariwisata.



## 5. Sektor Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security

Sektor usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib jika dilihat dari tabel diatas cenderung stabil memberikan pengaruh positif dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Landak walaupun ada penurunan tetapi tidak signifikan dan penurunan tersebut hanya berkisar beberapa point saja tetapi secara umum sektor ini secara konsisten mendistribusikan angka 7% bahkan disaat awal pandemic covid tahun 2020 sektor usaha ini menyumbang 7,68-8% bagi produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Landak.

Selain mempertimbangkan kontribusi 5 (lima) sektor lapangan usaha tersebut pada periode 2018 – 2023, diamati pula data perkembangan PDRB 2018-2023 Kabupaten Landak yang diolah melalui metode Tipologi Klassen, terdapat beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi serta memiliki kriteria “sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat” seperti dapat dilihat pada tabel perkembangan sektor-sektor berikut ini :

**Tabel 3. 5 Pertumbuhan dan Kontribusi Kabupaten Landak terhadap Provinsi Kalimantan Barat**

Kategori	Uraian	Kab. Landak	
		Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Kontribusi
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,5	37,23
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,33	2,07
C	Industri Pengolahan	2,7	10,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,6	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,8	0,02
F	Konstruksi	4,8	9,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,2	15,08
H	Transportasi Pergudangan	5,7	2,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,8	2,30
J	Informasi dan Komunikasi	8,2	3,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,2	2,24
L	Real Estate	10,0	2,86
M,N	Jasa Perusahaan	9,2	0,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,2	6,87
P	Jasa Pendidikan	8,5	2,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,3	2,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	16,8	0,56

Sumber : FFP bappeda dan data PDRB distribusi BPS 2024

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 (enam) sektor lapangan usaha potensial dan berkembang dalam produk domestik regional bruto kabupaten Landak, sektor ini potensial dan



berkembang berdasarkan data produk domestik regional bruto pertumbuhannya stabil. adapun keenam sektor tersebut meliputi:

**1. Sektor Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Sektor perdagangan besar ini meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran. Kontribusi sektor ini mengalami penurunan pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 kontribusinya 14,89% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan pada tahun 2023 kontribusinya naik diangka 15,08%. Kondisi ini berpeluang untuk meningkatkan pertumbuhan ataupun kontribusi yang ada di Kabupaten Landak, melihat trend yang baik pada sektor ini diharapkan juga akan terus menjaga trend positif guna untuk mendongkrak lapangan usaha, kontribusi kepada angka Provinsi dan juga pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Landak, agar dapat menyentuh target/proyeksi yang telah ditetapkan.

**2. Sektor Usaha Pengadaan Listrik Dan Gas**

Walaupun sektor ini belum terlalu signifikan dalam menyumbang kontribusi dan pertumbuhan bagi pembentukan produk domestik regional bruto Kabupaten Landak tetapi pertumbuhannya cenderung stabil dan memberikan trend positif, Kabupaten Landak diharapkan bisa menjaga stabilitas bahkan bisa meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi pada sektor ini dimana masih banyak daerah di Kabupaten Landak yang belum mendapatkan aliran listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

**3. Sektor Usaha Informasi dan Komunikasi**

Sektor usaha informasi dan komunikasi ini juga cenderung stabil dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Landak dan pertumbuhannya secara rata-rata juga lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat, meskipun kontribusi/distribusi pada 2022 memang mengalami penurunan tidak signifikan, tetapi pada 2023 cenderung naik/positif kembali.

**4. Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan**

Lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan untuk distribusi/kontribusi setiap tahun, meskipun memang bukan sektor ini bukan sektor basis dan berdaya saing di Kabupaten Landak, tetapi dengan trend yang baik setiap tahunnya diharapkan sektor ini akan terus berkembang dan memberi kontribusi lapangan usaha yang positif bagi perkembangan sektor yang ada di Kabupaten Landak.

**5. Sektor Usaha Jasa Perusahaan**

Pandemi global Covid-19 berdampak besar terhadap perkembangan sektor jasa nasional tanpa terkecuali Kabupaten Landak yang merupakan bagian integral NKRI. Pada 2020,



pertumbuhan sektor jasa perusahaan mengalami kontraksi sebesar -3,76 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi 2019 yang mencapai 4,48 persen namun secara trend data series pertumbuhan sektor ini masih lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat, bounce back dari tahun pandemi covid sektor ini terus mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan.

#### **6. Sektor Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib.**

Berdasarkan data pada tabel di atas sektor usaha ini juga tergolong sektor potensial di Kabupaten Landak dan tidak menutup kemungkinan juga menjadi sektor prima jika potensi-potensi yang ada dalam pembentukan sektor usaha ini lebih dioptimalkan dan secara pertumbuhan sektor usaha ini menyumbang 3,72 persen lebih tinggi dari pertumbuhan provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,91 persen.

Memperhatikan hal-hal di atas, sasaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak pada tahun 2024 yang diperkirakan sebesar 4,94% persen diharapkan tidak sekedar bertumbuh dalam arti peningkatan nilai PDRB-nya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, seperti:

1. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar sektor pembangunan;
2. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan;
3. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan angka pengangguran.

Berdasarkan pengamatan lingkungan saat ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktornya baik secara internal maupun eksternal, maka dirancang Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 dengan sumber dari sektor-sektor yang sama dengan skala prioritas berdasarkan urutan berikut ini:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
5. Jasa pendidikan;
6. Pengadaan listrik dan gas;
7. Informasi dan komunikasi;
8. Industri pengolahan;
9. Jasa keuangan dan asuransi;
10. Jasa perusahaan;
11. Jasa lainnya;
12. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
13. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
14. Pertambangan dan penggalian;
15. Konstruksi;
16. Real estate;
17. Transportasi dan pergudangan;

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Landak Dalam Angka BPS, Tingkat Pengangguran Kabupaten Landak pada tahun 2023 sebesar 2,24%, memang tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, maka untuk



memkasimalkan sektor lapangan usaha yang ada, peluang diversifikasi lapangan usaha diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kabupaten Landak. Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 2,19%.

Keenam sektor lapangan usaha ini yang secara tren selalu menunjukkan hasil positif meskipun tidak signifikan dan bukan merupakan sektor basis dan berdaya saing tetapi berpeluang untuk dikembangkan. Berikut tabel asumsi dasar dalam penyusunan RKPD 2025 :

**Tabel 3. 6 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2025**

No.	Indikator Makro	Satuan	Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	5,11
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,14	68,73
3.	Angka Kemiskinan	%	9,97	8,96
4.	Angka Pengangguran (TPT)	%	2,24	2,13
5.	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	%	0,27	0,264
6.	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. (Juta)	33,08	38,68

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, RPJMD/RPD Kab. Landak Tahun 2023-2026, Penyesuaian dengan Target Provinsi Kalimantan Barat (Rakortekrenbang) dan Hasil Perhitungan Bappeda KEMD

### 3.1. 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak tahun 2025 tentunya dipengaruhi kondisi ekonomi Provinsi dan Nasional tahun sebelumnya dan yang tantangan serta prospek ekonomi kedepan. Pendekatan perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak dengan memperhatikan angka inflasi yang terjaga setiap tahunnya 2,09 persen pada 2023 dan kurs nilai tukar 15.300 – 16.000 sehingga diperoleh target pertumbuhan tahun 2025 dengan mempertimbangkan asumsi faktor pendorong sebagai berikut:

Sektor utama yang menjadi sektor basis dan berdaya saing di Kabupaten Landak, mengingat memang khususnya untuk pangan, Kabupaten Landak adalah salah satu lumbung pangan yang ada di Kalimantan Barat, juga dengan adanya program yang bertujuan menjaga lahan pangan agar tidak alih fungsikan juga menjadi factor bahwa sektor ini masih akan tetap menjadi basis beberapa tahun kedepan, serta harga jual sawit yang cenderung sudah mulai stabil sehingga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan yang ada.

Potensi Kawasan Industri Landak (KIL) yang kembali masuk dalam pentapan kawasan industri nasional, diharapkan bisa menjadi pintu pembuka untuk merangsang sektor industry pengolahan di Kabupaten Landak, serta bisa berefek pada banyak sektor lainnya dan penyerapan tenaga kerja yang ada.



Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah pasca pemulihan pandemi Covid 19 seperti infrastruktur jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten serta fasilitas umum.

Sektor perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global serta bounce back pertumbuhan sektor ini pasca pandemi Covid 19, sektor perdagangan besar meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran.

**Tabel 3.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak dari Sisi lapangan Usaha**

PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)		
	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,45	3,07	3,17 - 3,39
Pertambangan dan Penggalian	-3,31	3,14	3,21 - 3,42
Industri Pengolahan	2,73	4,60	4,61 - 5,03
Pengadaan Listrik dan Gas	15,6	6,45	6,59 - 7,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah/Limbah,Daur Ulang	6,84	5,08	5,19 - 5,53
Konstruksi	4,80	6,75	6,78 - 7,35
Perdagangan Besar/Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,22	7,28	7,30 - 7,57
Transportasi dan Pergudangan	5,70	6,65	6,67 - 6,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,83	6,21	6,23 - 6,46
Informasi dan Komunikasi	8,21	7,96	7,99 - 8,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,23	6,55	6,69 - 7,13
Real Estate	10,0	5,9	6,0 - 6,5
Jasa Perusahaan	9,22	6,53	6,67 - 7,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan/ Jamsos Wajib	6,23	2,28	2,33 - 3,31
Jasa Pendidikan	8,52	7,12	7,18 - 7,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,30	9,88	9,91 - 10,03
Jasa lainnya	16,80	6,50	6,52 - 6,75
<b>PDRB</b>	<b>4,39</b>	<b>5,01</b>	<b>5,11 - 5,45</b>

Sumber: KEMD 2025

Untuk sisi Pengeluaran, akan diperkirakan bahwa konsumsi rumah tangga akan naik cukup signifikan seiring naiknya konsumsi LNPRT karena adanya pilkada serentak di semua Kabupaten, dan juga karenaterkendalnya harga barang dan inflasi yang stabil di Kabupaten Landak.

**Tabel 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dari Sisi Pengeluaran tahun 2024 -2025**

PDRB Berdasarkan Pengeluaran	Pertumbuhan (%)
------------------------------	-----------------



	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025	
Konsumsi Rumah Tangga	5,57	5,58	5,60	- 5,80
Konsumsi LNPRT	9,21	11,45	4,01	- 4,21
Konsumsi Pemerintah	1,85	2,24	2,29	- 3,26
Pembentukan Modal Tetap bruto	7,79	6,04	6,07	- 6,57
Perubahan Inventori	30,38	-29,41	6,07	- 6,57
				-
Net Ekspor	-121,49	-313,28	-17,26	- 27,31
PDRB	4,39	5,01	5,11	- 5,45

Sumber: KEMD 2025 Bappeda

Tercapai atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2025 akan sangat ditentukan oleh beberapa hal, antara lain:

Pengendalian inflasi secara optimal dan berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga terhadap masyarakat sehingga meningkatkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang dapat terkendali.

Kondisi politik yang terjaga atau kondusif serta kondisi geopolitik dunia yang juga kondusif akan menjadi aspek yang penting bagi pertumbuhan baik dari sisi pengeluaran maupun sisi lapangan usaha.

Adanya mitigasi atau rencana penanggulangan bencana/iklim yang akan mempengaruhi khususnya sektor pertanian atau pangan yang menjadi sektor basis dan berdaya saing.

Optimalisasi kawasan industri seperti contoh bisa masuknya investor dan akan secara tidak langsung memberikan multiplier efek kepada pertumbuhan daerah.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan menjadi landasan awal sebagai baseline dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Landak 2025 – 2045 dan sebagai target awal dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak tahun 2025-2029.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional dan provinsi yang terjadi di tahun 2023 memberikan cukup dampak bagi pencapaian sasaran pembangunan. Harapan dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak yang tetap optimis kedepannya membawa dampak baik pula terhadap penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan dan tingkat kesenjangan (Rasio Gini), serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dihasilkan suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat, Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang baik.



Dalam pencapaian suatu pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Daerah.

### 3.2. 1. Analisis Kinerja Keuangan Periode Tahun 2020-2023

#### 3.2.1. A. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak**

Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	1.269.297.662.308,11	1.564.325.055.441,97	1.338.510.857.504,99	0,99%
Pendapatan Asli Daerah	61.644.009.497,14	82.385.456.698,00	62.613.089.144,18	-3,20%
Hasil Pajak Daerah	28.759.935.294,00	42.000.978.373,00	22.967.298.697,00	-25,67%
Hasil Retribusi Daerah	2.358.151.977,00	2.977.222.200,00	3.243.908.588,00	14,51%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.237.816.479,43	5.303.279.113,00	6.167.277.283,00	7,62%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	25.288.105.746,71	32.103.977.012,00	30.234.604.576,18	7,52%
Dana Perimbangan	965.882.361.897,00	1.240.168.307.830,00	1.251.345.040.238,81	11,51%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	951.222.361.897,00	1.171.898.864.196,00	1.162.679.270.371,00	9,02%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.660.000.000,00	68.269.443.634,00	88.665.769.867,81	50,76%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	241.771.290.913,97	241.771.290.913,97	24.552.728.122,00	-442,35%



Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Per-tumbuhan (%)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.738.076.513,97	55.738.076.513,97	24.012.728.122,00	-66,06%
Pendapatan Lainnya	186.033.214.400,00	186.033.214.400,00	540.000.000,00	n/a

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Landak 2021-2022 - BPKAD Kabupaten Landak, 2024 (Diolah)

### 3.2.1. B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja tidak langsung daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan tidak langsung daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.

**Tabel 3. 8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Landak**

Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Per-tumbuhan (%)
BELANJA	1.237.781.647.548,61	1.365.900.343.641,00	1.365.089.477.794,95	4,66%
BELANJA OPERASI	789.903.998.512,61	898.045.465.640,00	924.558.952.381,87	7,45%
Belanja Pegawai	385.539.079.470,40	438.334.666.141,00	451.837.861.285,18	7,52%
Belanja Barang dan Jasa	373.877.572.738,21	427.202.455.124,00	425.454.051.746,69	6,04%
Belanja Hibah	30.237.746.304,00	32.237.104.375,00	46.867.439.350,00	18,71%
Belanja Bantuan Sosial	249.600.000,00	271.240.000,00	399.600.000,00	20,05%
BELANJA MODAL	189.707.769.298,00	217.869.768.388,00	203.606.183.415,28	2,96%
Belanja Modal	189.707.769.298,00	217.869.768.388,00	203.606.183.415,28	2,96%
BELANJA TIDAK TERDUGA	19.949.484.324,00	12.267.957.322,00	6.046.364.527,00	-82,76%
Belanja Tidak Terduga	19.949.484.324,00	12.267.957.322,00	6.046.364.527,00	-82,76%
BELANJA TRANSFER	238.220.395.414,00	237.717.152.291,00	230.877.977.470,80	-1,59%
Belanja Bantuan Keuangan	238.220.395.414,00	237.717.152.291,00	230.877.977.470,80	-1,59%

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Landak 2019-2021 - BPKAD Kabupaten Landak, 2024.



### 3.2.1. C. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan dirumuskan kembali dalam penyusunan RPJMD/RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dapat diproyeksikan kerangka pendanaan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Landak**

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2025
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>04.01</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>92.152.660.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	53.152.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.100.660.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.900.000.000
<b>04.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.237.145.509.493</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.224.671.156.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.474.353.493
<b>04.03</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>28.500.000.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.357.798.169.493</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>05.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.079.550.798.359</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	697.897.812.614
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.510.455.745
5.1.05	Belanja Hibah	86.942.530.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000
<b>05.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>126.532.358.020</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	45.345.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.821.544.842
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.623.020.778
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.980.584.400
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.061.863.000
<b>05.03</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000
<b>05.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>234.402.084.600</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.763.044.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	228.639.040.600
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.447.485.240.979</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-89.687.071.486</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>06.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000
<b>06.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.000.000.000</b>



KODE	URAIAN	PROYEKSI 2025
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>13.000.000.000</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-76.687.071.486</b>
	<b>TOTALPROYEKSI APBD</b>	<b>1.377.798.169.493</b>

Sumber: Hasil Perhitungan (Olahan) dari LRA Kabupaten Landak 2022-2023, Anggaran Berjalan Kabupaten Landak Tahun 2024 dan RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Dengan demikian, RKPD disusun berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Pelaksanaan RPD dalam bentuk RKPD bertujuan agar target-target pembangunan jangka menengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai. RKPD Kabupaten Landak Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari RPD Kabupaten Landak 2023-2026.

Berdasarkan isu strategis yang ada di Kabupaten Landak, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing Tujuan RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Tujuan RPD Kabupaten Landak**

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,51	88,80	89,30	89,90	90,02	90,02
	2. Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B
	3. Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai	4. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	0,57
	5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,56	65,76	65,86	65,96	66,06	66,06
Meningkatkan kontribusi sumber daya alam bagi perekonomian daerah	Presentase Pertumbuhan Ekonomi	2,38	4,05	4,68	4,93	5,01	5,01
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan	Indeks Desa Membangun	0,7135	0,7385	0,751	0,7635	0,776	0,776
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	6. Persentase Tingkat Kemiskinan	10,99	10,06	9,66	9,26	8,86	8,86
	7. Indeks Pembangunan Manusia	66,21	66,54	66,86	67,19	67,51	67,51



**Tabel 4. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Landak 2023-2026**

TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET					KONDISI AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,51	88,80	89,30	89,90	90,02	90,02	
	2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	21,78	31,04	32,26	33,86	35,87	35,87	
	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	19,90	21,00	21,50	22,00	22,50	22,50	
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	15,50	17,00	17,50	18,00	18,50	18,50	
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	8,81	10,00	10,50	11,00	11,50	11,50	
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14,18	15,50	16,00	16,50	17,00	17,00	
		Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B	
	4. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah SPBE yang dibangun dan dikembangkan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	67	71	73	75	77	77	
		Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43	
		Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan Pemerintah Daerah	41	45	47	49	51	51	
	5. Meningkatnya profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	46,34	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	
		Persentase tata Kelola Administrasi Kepegawaian yang berkualitas	53,35	65,49	73,15	67,87	78,69	78,69	
	6. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung	Persentase hasil Litbang yang diterapkan (%)	10	12	13	14	15	15	



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET					KONDISI AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
	pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
	7. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan tugas DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	8. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	9. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2	2	2	2	2	2	2
		Level kapabilitas APIP	2	2	2	2	2	2	2
	10. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11. Terwujudnya Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	23,72	24,00	24,25	24,50	24,75	24,75	24,75
	12. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan data kependudukan	57,01	57,55	58,48	59,00	59,67	59,67	59,67
2. Meningkatkan ketersediaan	13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00	65,00	65,00



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET					KONDISI AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
infrastruktur dasar yang memadai.	14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan kinerja pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	56,00	57,00	61,00	63,00	67,00	67,00	
	15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	65,56	65,76	65,86	65,96	66,06	66,06	
	16. Meningkatnya konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	53,50	58,07	62,38	66,69	71,00	71,00	
		Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	77,13	82,85	88,57	94,28	100,00	100,00	
17. Meningkatnya aksesibilitas telekomunikasi dan internet	Menurunnya Desa Non Sinyal ( <i>Blank Spot Area</i> )	28	26	24	22	20	18		
3. Meningkatkan kontribusi sumber daya alam bagi perekonomian daerah	18. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Inflasi (%)	1,16	3,74	3,56	3,42	3,11	3,11	
		PDRB Per kapita (juta Rp)	29,21	31,46	32,97	34,14	35,76	35,76	
		Indeks Gini	0,206	0,206	0,206	0,205	0,205	0,205	
	19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	Angka Produksi Sektor Pertanian (ton/thn)	153.645	135.063	137.159	139.366	141.903	141.903	
		Rata-Rata Persentase Tingkat Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	34,45	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	36,13	36,5	37,2	37,9	38,5	38,5	
	20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	9,50	27,11	32,11	37,11	42,11	42,11	
		Nilai Transaksi Domestik	N/A	471.744.000	566.092.800	679.311.360	815.173.632	815.173.632	
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	N/A	50,28	54,28	58,28	62,28	62,28	
	21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Rasio Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	N/A	32,85	34,85	36,85	38,85	38,85	
Rasio keanggotaan koperasi		N/A	6,50	8,50	10,50	12,56	12,56		
22. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	2.28	2.38	2.43	2.48	2.53	2.53		
	Rasio pelaku usaha ekonomi kreatif	0	7	9	11	13	13		



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET					KONDISI AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
	23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi di Kabupaten	700,78	514,03	565,433	621,97	684,173	684,173	
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan	24. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Desa Mandiri	13	18	23	28	34	34	
		Persentase BUMDes Sehat	N/A	5	6	8	8	8	
		Persentase TP. PKK tingkat desa aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	25. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Prosentase Penyusunan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES tepat waktu dan akuntabel	N/A	32,17	33,67	34,67	39,00	39,00	
26. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan sosial masyarakat di pedesaan	Persentase Karang Taruna Aktif	N/A	1,92	3,2	4,48	6,41	6,41		
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	27. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,43	12,45	12,46	12,48	12,49	12,49	
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,12	7,15	7,16	7,17	7,17	7,17	
	28. Meningkatnya Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40	40	47	54	61	61	
		Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	N/A	7	7	7	7	7	
		Jumlah Sanggar seni budaya yang berprestasi	N/A	7	7	7	7	7	
	29. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	N/A	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	1,5	1,7	2,0	2,2	2,2	
	30. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,04	73,23	73,42	73,60	73,79	73,79	
31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	100	100	100	100	100	100		
	Persentase Validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	N/A	100	100	100	100	100		



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET					KONDISI AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
	32. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	10,99	9,55	8,84	8,12	7,4	7,4	
	33. Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1,83	1,85	1,87	1,89	1,91	1,91	
		Unmet Need KB	29,31	28,36	27,51	26,61	25,66	25,66	
	34. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	35. Meningkatnya Kapasitas Daerah Menuju Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak	Inisiasi	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	
	36. Meningkatnya Keterbukaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,22	3,18	3,15	3,12	3,09	3,09	
	37. Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	75,6	73,0	75,0	77,0	79,0	79,0	
		Persentase ketersediaan pangan utama (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	404,55	200	200	210	220	220	
	38. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	N/A	27,16	27,16	29,62	32,09	34,56	
	39. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan (jenis)	N/A	1	2	2	3	3	
	40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
	41. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00	
	42. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



## **4. 2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025**

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, tahun 2025 merupakan momentum pembangunan. Dimana tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Untuk itu diperlukan fokus demi tercapainya landasan dasar secara fundamental pembangunan, dan

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah pembangunan dan agenda transformasi yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 demi mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045, serta memperhatikan Rancangan RKP Tahun 2025.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Landak tahun 2025 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Landak yang diselaraskan dengan Rancangan RPJPN 2025 – 2045 dan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Tema dan Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dalam Rancangan RKP Tahun 2025.
- 3) Tema dan Prioritas pembangunan dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025.
- 4) Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yang ditetapkan pada RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026.
- 5) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu.
- 6) Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
- 7) Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

### **4.2. 1. Telaahan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045**

Perencanaan pembangunan Kabupaten Landak tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2025, maka perlu dilakukan telaahan terhadap Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Dengan menetapkan 5 (lima) Visi sebagai sasaran utama RPJPN 2025-2045, yaitu antara lain :



**1) Sasaran Visi 1 : Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju.**

Pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar di dunia sebesar USD 30.300, Kontribusi PDM Maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB Industri Pengolahan 28,0 persen.

**2) Sasaran Visi 2 : Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.**

Kemiskinan pada kisaran 0,5 – 0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen.

**3) Sasaran Visi 3 : Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatkan**

Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia.

**4) Sasaran Visi 4 : Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan**

Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreatifitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73.

**5) Sasaran Visi 5 : Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission**

Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Selanjutnya untuk mewujudkan kelima visi tersebut dirumuskan **8 agenda pembangunan RJPPN 2025-2045** yaitu antara lain :

**1) Mewujudkan Transformasi Sosial**

Indonesia memiliki agenda untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh kehidupan dan juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.

**2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi**

Indonesia berambisi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan IPTEK, inovasi, dan ekonomi produktif pada sektor-sektor berikut ini; manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, blue economy, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN.

Selain pada aspek-aspek di atas, Pemerintah juga berfokus pada penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

**3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola**



Indonesia melalui RP3JPN 2025-2045 menargetkan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang bisa menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

**4) Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**

Indonesia memiliki tujuan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global, dan juga membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

**5) Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Melalui Indonesia Emas 2045, Indonesia juga berfokus untuk memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

**6) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**

Indonesia juga memiliki fokus untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.

**7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Poin ini menjadi salah satu faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

**8) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan**

Aspek ini diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

**4.2. 2. Tema, Sasaran, dan Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dalam Rancangan RKP Tahun 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, menyebutkan bahwa Tema RKP Tahun 2025: **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.



**Gambar 4. 1 Tema Pembangunan RKP Tahun 2025**

*Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas No 2 Tahun 2024*

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

- **PRIORITAS NASIONAL 1**  
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- **PRIORITAS NASIONAL 2**  
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- **PRIORITAS NASIONAL 3**  
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
- **PRIORITAS NASIONAL 4**  
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.



- **PRIORITAS NASIONAL 5**  
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- **PRIORITAS NASIONAL 6**  
Membangunan dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- **PRIORITAS NASIONAL 7**  
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
- **PRIORITAS NASIONAL 8**  
Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.



**Gambar 4. 2 Prioritas Nasional**

*Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas No 2 Tahun 2024*

#### **4.2. 3. Penetapan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Landak**

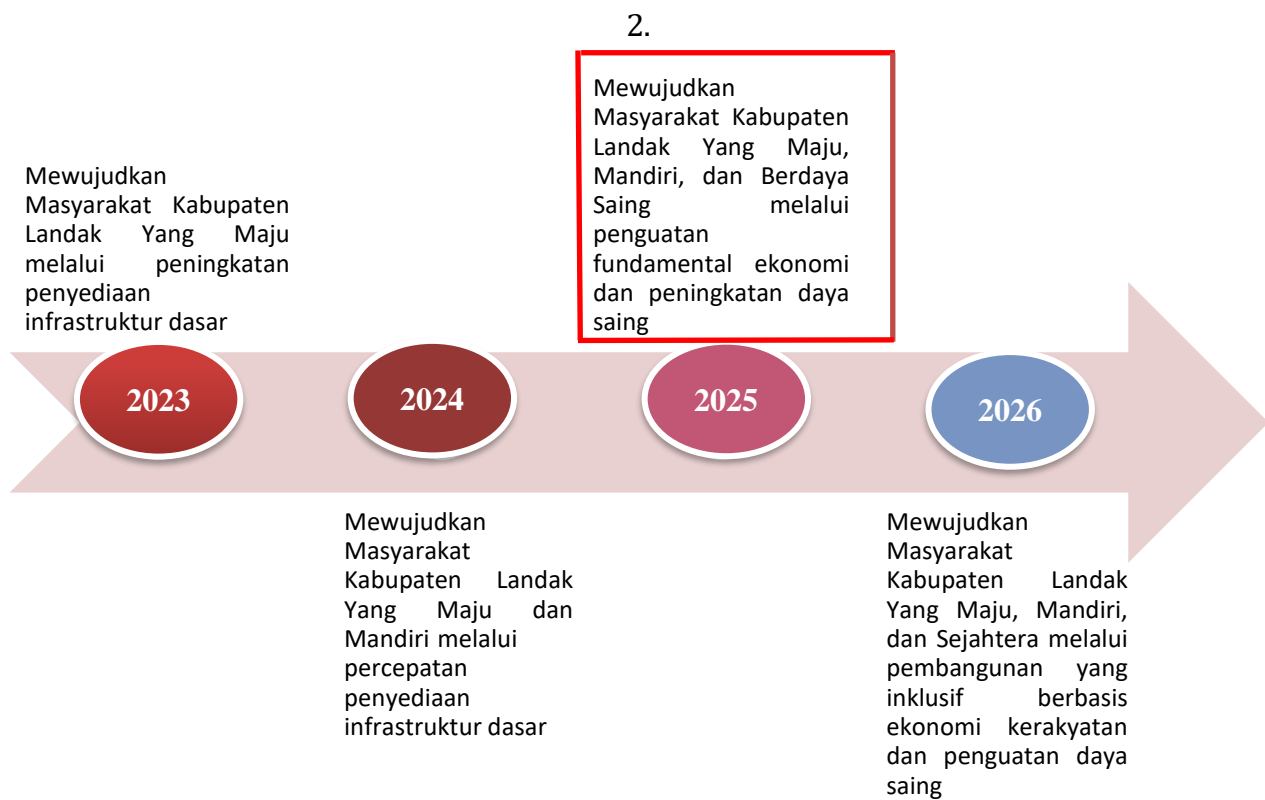
Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Landak selama kurun waktu 4 (empat) tahun mulai 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana dirumuskan dalam RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, masih menjadi isu yang relevan untuk pembangunan Tahun 2025. Isu strategis pembangunan Kabupaten Landak yang termuat dalam RPD Kabupaten Landak 2023-2026, meliputi:



1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas serta pelayanan publik yang responsif dan terukur.
2. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Melambatnya pertumbuhan ekonomi.
4. Belum optimalnya ketahanan sosial masyarakat.
5. Belum memadainya peningkatan sistem jaringan prasarana dan sarana dasar yang berkualitas dan terintegrasi.
6. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan pada perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.
7. Pengembangan potensi sumber daya alam dengan penggerak utama sektor pertanian dalam arti luas untuk kemandirian ekonomi.
8. Penguatan kemandirian desa sebagai pusat pembangunan daerah dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
9. Belum optimalnya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif.

Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan di atas tentunya didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Berkaitan dengan hal tersebut, pada RPD Kabupaten Landak telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 4 (empat) tahun mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Landak selama 4 (empat) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas. Sasaran yang menjadi fokus untuk dicapai mulai tahun pertama pelaksanaan RPD berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan SDM yang tangguh sebagai landasan menuju Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera. Tahun pertama pelaksanaan RPD diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju melalui peningkatan penyediaan infrastruktur dasar. Tahap selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju dan mandiri melalui percepatan penyediaan infrastruktur dasar. Tahun ketiga pelaksanaan RPD diharapkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan fundamental ekonomi dan peningkatan daya saing. Pada tahun akhir implementasi RPD, diharapkan mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan yang inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan penguatan daya saing. Perwujudan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Landak secara kronologis dideskripsikan melalui tahapan arah kebijakan Kabupaten Landak sebagai berikut.



**Gambar 4.3 Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan (2023-2026) Kabupaten Landak**

*Sumber: RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026*

Berdasarkan pengamatan lingkungan saat ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktornya baik secara internal maupun eksternal, maka dirancang Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 dengan sumber dari sektor-sektor yang sama dengan skala prioritas berdasarkan urutan berikut ini:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
5. Jasa pendidikan;
6. Pengadaan listrik dan gas;
7. Informasi dan komunikasi;
8. Industri pengolahan;
9. Jasa keuangan dan asuransi;
10. Jasa perusahaan;
11. Jasa lainnya;
12. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
13. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
14. Pertambangan dan penggalian;
15. Konstruksi;
16. Real estate;



17. Transportasi dan pergudangan;

**Tabel 4. 2 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2025**

No.	Indikator Makro	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,88-5,20
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	70,32
3.	Angka Kemiskinan	%	9,34
4.	Angka Pengangguran (TPT)	%	1,70
5.	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	%	0,264
6.	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. (Juta)	38,68
7.	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	%	5,07

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, RPD Kab. Landak Tahun 2023-2026, Penyesuaian dengan Target Provinsi Kalimantan Barat (Rakortekrenbang) dan Hasil Perhitungan

Adapun Rancangan Tema RKPD Kabupaten Landak Tahun 2025 adalah:

**“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Landak Yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui penguatan fundamental ekonomi dan peningkatan daya saing”**

Prioritas pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2025 diarahkan untuk melaksanakan amanat RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Acuan utama penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2025 adalah isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPD 2023-2026. Selain itu, penentuan prioritas tersebut juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat baik Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, rancangan RKP Tahun 2025 dan fokus pada penguatan fundamental ekonomi dan peningkatan daya saing.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Landak Tahun 2025, sebagai berikut:

- 1. Pengendalian Inflasi.**
- 2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.**
- 3. Penurunan Stunting.**
- 4. Penguatan Fundamental Ekonomi**
- 5. Peningkatan Daya Saing**

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.3.



**Tabel 4. 3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025**

**3.**

<b>SASARAN</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>OPD</b>
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Daya Saing	Seluruh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik, termasuk kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Peningkatan Daya Saing	BPKAD dan BPRD
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Daya Saing	Bappeda, Sekretariat Daerah dan Inspektorat
4. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Daya Saing	Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Meningkatnya profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	Peningkatan Daya Saing	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
6. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	Peningkatan Daya Saing	Bappeda
7. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan tugas DPRD	Peningkatan Daya Saing	Sekretariat DPRD
8. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Peningkatan Daya Saing	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah	Peningkatan Daya Saing	Inspektorat
10. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel	Peningkatan Daya Saing	Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Terwujudnya Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi	Peningkatan Daya Saing	Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Daya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	OPD
13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Penguatan Fundamental Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Penguatan Fundamental Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga daya dukung lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup
16. Meningkatnya konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi	Penguatan Fundamental Ekonomi	Dinas Perhubungan
17. Meningkatnya aksesibilitas telekomunikasi dan internet	Peningkatan Daya Saing	Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Penguatan Fundamental Ekonomi	BAPPEDA (Bid. PEFP) & Sekretariat Daerah (Bag. Ekbang)
19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	Peningkatan Daya Saing	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan
20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Penguatan Fundamental Ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Penguatan Fundamental Ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
22. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Daya Saing	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Penguatan Fundamental Ekonomi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK)
24. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.</li> <li>• Penurunan Stunting.</li> <li>• Peningkatan Daya Saing</li> <li>• Penguatan Fundamental Ekonomi</li> </ul>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	OPD
25. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.</li> <li>• Penurunan Stunting.</li> <li>• Peningkatan Daya Saing</li> <li>• Penguatan Fundamental Ekonomi</li> </ul>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa & Kecamatan (DPMPD)
26. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan sosial masyarakat di perdesaan	Peningkatan Daya Saing	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa & Kecamatan (DPMPD)
27. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas pendidikan	Peningkatan Daya Saing	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28. Meningkatkan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Peningkatan Daya Saing	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Peningkatan Daya Saing	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
30. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Daya Saing	Dinas Kesehatan
31. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)
32. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)
33. Meningkatkan Pelayanan penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Peningkatan Daya Saing	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)
34. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Daya Saing	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)
35. Meningkatkan Kapasitas Daerah Menuju Kabupaten Layak Anak	Peningkatan Daya Saing	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)



<b>SASARAN</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>OPD</b>
36. Meningkatkan Keterbukaan Lapangan Kerja	Penguatan Fundamental Ekonomi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPD)
37. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
38. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan Daya Saing.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
39. Meningkatkan budaya olahraga masyarakat	Peningkatan Daya Saing.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Peningkatan Daya Saing.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
41. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing.	Satuan Polisi Pamong Praja
42. Meniadakan Pencegahan dan Penanganan Konflik	Peningkatan Daya Saing.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



#### 4. 3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKP 2025

Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP 2025 bertumpu pada 8 (delapan) prioritas nasional. Adapun gambaran keselarasan antara 12 (dua belas) prioritas pembangunan daerah dengan 7 (tujuh) prioritas RKP adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 4 Keselarasan Antara 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah dengan 8 (delapan) Prioritas RKP**

PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	
1. Pengendalian Inflasi.	PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.	PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
3. Penurunan Stunting.	PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
4. Penguatan Fundamental Ekonomi	PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
	PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
	PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
5. Peningkatan Daya Saing	PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
	PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
	PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan



PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	
		dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
	PN 8	Memperkuat Penyelesaian kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Adapun program-program yang mendukung prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2025 dan target pembangunan Tahun 2025 yang akan dicapai Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :



**Tabel 4. 5 Program Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan dan Target Tahun 2025 Kabupaten Landak yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional yang Tertuang dalam RKP**

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			<b>01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	5. Peningkatan Daya Saing	27. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas pendidikan	01.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			01.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Presentasi meningkatnya pemerataan mutu pada jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			01.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			01.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentasi meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			01.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Presentasi meningkatnya pelayanan dalam upaya pengendalian perizinan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			01.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Presentasi meningkatnya satuan pendidikan dalam menerapkan bahasa dan sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>		
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	5. Peningkatan Daya Saing	28. Meningkatnya Kesenian dan Kebudayaan Daerah	02.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			02.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			02.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase jumlah pembinaan sejarah yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			02.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase jumlah cagar budaya dilestarikan dan dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			02.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah museum yang dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			<b>01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	5. Peningkatan Daya Saing	30. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Kesehatan
	3. Penurunan Stunting.		01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terwujudnya Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Teroptimalisasinya Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3. Penurunan Stunting.		01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas kesehatan Promosi kesehatan	Dinas Kesehatan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Rumah Sakit Umum Daerah
	3. Penurunan Stunting.		01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rumah Sakit Umum Daerah



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			<b>01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	01.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	3. Penurunan Stunting.		01.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	3. Penurunan Stunting.		01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan sistem pengelolaan air limbah/sanitasi layak (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
	5. Peningkatan Daya Saing		01.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang di Rehabilitasi dan di Relokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penyediaan Rumah layak huni yang berhasil ditangani	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan Perumahan layak huni	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing	14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Meningkatnya Ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber daya air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman (Luas Kawasan Target Yang Ditangani /HA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
	5. Peningkatan Daya Saing		01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah Kecamatan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	4. Penguatan Fundamental Ekonomi		01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan kondisi mantab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	5. Peningkatan Daya Saing		01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelengaraa Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			<b>01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	02.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
		14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	02.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pembebasan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah untuk menunjang pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			<b>01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.	5. Peningkatan Daya Saing	40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Satuan Polisi Pamong Praja



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		41. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.		40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan dan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
			<b>01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	5. Peningkatan Daya Saing	40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.		40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan dan kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			<b>01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.	31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	01.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	01.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					dan Keluarga Berencana
		31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang ditangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	01.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Peningkatan Penanganan Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	01.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	5. Peningkatan Daya Saing	34. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	02.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PUG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		34. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan / pendampingan perlindungan perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		34. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tingkat Kecamatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		34. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		35. Meningkatnya Kapasitas Daerah Menuju Kabupaten Layak Anak	02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		34. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan/Pendampingan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	5. Peningkatan Daya Saing	33. Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	02.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		33. Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	02.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		33. Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	02.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Poktan (Kelompok Kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	37. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	02.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		37. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		37. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya daerah rawan pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		37. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan	02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		dan Pemanfaatan Pangan			
			<b>03 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
			<b>03.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
	5. Peningkatan Daya Saing	19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Jenis Olahan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			<b>03 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
			<b>03.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengadaan Alsintan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah penyakit ternak yang dicegah dan ditanggulangi	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya OPT dan tertanggulangnya bencana	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi standarisasi mutu dan hasil pertanian dan pendataan poktan pengolah TPH	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.	5. Peningkatan Daya Saing	15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Data Kualitas Lingkungan Hidup dan Konservasi Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	jumlah Layanan Izin dan/atau Layanan Pemeriksaan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Persetujuan Teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izn PPLH, PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif "	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Yang Dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perolehan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Peningkatan Daya Saing	12. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	02.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang dilaksanakan (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		dan Pencatatan Sipil			
		12. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	02.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	02.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			<b>02.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	5. Peningkatan Daya Saing	24. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	02.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des
		24. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	02.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan wilayah desa yang ditata	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des
		24. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	02.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des
		25. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik	02.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		24. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	02.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>		
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	16. Meningkatnya konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi	02.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Perhubungan
		16. Meningkatnya konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan yang tersedia	Dinas Perhubungan
		16. Meningkatnya konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi	02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	4. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	02.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>		
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	10. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel	02.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru					
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>		
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	4. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	02.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tersedianya keamanan Informasi Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/ aset	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase tingkat kesadaran keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya rasio pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya rasio pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			<b>03 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
			<b>03.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>		
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	20. Meningkatkan produksi sektor industri dan perdagangan	03.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan berusaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		20. Meningkatkan produksi sektor industri dan perdagangan	03.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					Perindustrian dan Perdagangan
		20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	03.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok barang penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	03.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	03.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	03.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			<b>03 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
			<b>03.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	03.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersusunnya laporan rencana pembangunan industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	03.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	03.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	36. Meningkatnya Keterbukaan Lapangan Kerja	02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Pencari Kerja dilatih	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		36. Meningkatnya Keterbukaan Lapangan Kerja	02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		36. Meningkatnya Keterbukaan Lapangan Kerja	02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola yang Layak (memiliki PP/PKB)	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	02.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	02.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	02.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	02.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Pelayanan Perizinan dan non perizinan berusaha dan non Berusaha	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	02.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	02.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			<b>03 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
			<b>03.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>		
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	36. Meningkatnya Keterbukaan Lapangan Kerja	03.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		36. Meningkatnya Keterbukaan Lapangan Kerja	03.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			<b>02.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	5. Peningkatan Daya Saing	38. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	02.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		38. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	02.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		39. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat	02.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olahraga ditingkat provinsi	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		38. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	02.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pembinaan Pramuka	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
			<b>03 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
			<b>03.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	22. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	03.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		22. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	03.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		22. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	03.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		22. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	03.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	"Jumlah Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	5. Peningkatan Daya Saing	29. Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	02.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		29. Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	02.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno Yang Dilestarikan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			<b>02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
			<b>02.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Peningkatan Daya Saing	8. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	02.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kera, Meningkatnya Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan / Aset	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		8. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	02.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		8. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	02.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		8. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	02.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			<b>03 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
			<b>03.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>		
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	4. Penguatan Fundamental Ekonomi	19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Dinas Perkebunan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengadaan Alsintan	Dinas Perkebunan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya OPT dan tertanggulangnya bencana	Dinas Perkebunan
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi standarisasi mutu dan hasil pertanian dan pendataan poktan pengolah TPH	Dinas Perkebunan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	03.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan
			<b>04 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
			<b>04.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Peningkatan Daya Saing	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	04.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran - Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota di Bidang Organisasi	Sekretariat Daerah
		3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	04.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu Persentase kerjasama yang aktif Persentase Ketersediaan Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota di SKPD Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Organisasi Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang	Sekretariat Daerah



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
				kesejahteraan rakyat Persentase Raperda yang Diundangkan Menjadi Peraturan Daerah	
		18. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	04.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	Sekretariat Daerah
			<b>04 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
			<b>04.02 SEKRETARIAT DPRD</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	5. Peningkatan Daya Saing	7. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan tugas DPRD	04.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Sekretariat DPRD



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		7. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan tugas DPRD	04.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
			<b>05 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
			<b>05.01 PERENCANAAN</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Peningkatan Daya Saing	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	05.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran dan meningkatnya Evaluasi kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	05.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen bahan perumusan dan pengambilan kebijakan berupa hasil koordinasi, informasi, pedoman, pustaka, dan arsip tersedia tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	05.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan yang terlaksana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<b>05 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			<b>05.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	5. Peningkatan Daya Saing	6. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	05.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<b>05 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
			<b>05.02 KEUANGAN</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Peningkatan Daya Saing	2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	05.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	05.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Anggaran Yang Disusun Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	05.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD Sesuai Regulasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	05.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	05.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan pajak daerah	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
			<b>05 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
			<b>05.03 KEPEGAWAIAN</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Peningkatan Daya Saing	5. Meningkatnya profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	05.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		5. Meningkatnya profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<b>05 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
			<b>05.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Peningkatan Daya Saing	5. Meningkatnya profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	05.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pemenuhan regulasi pengembangan kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man
			<b>06 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
			<b>06.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Peningkatan Daya Saing	9. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah	06.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Inspektorat
		9. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah	06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	Inspektorat
		3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten	Inspektorat
			<b>07 UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
			<b>07.01 KECAMATAN</b>		
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	5. Peningkatan Daya Saing	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	13 Kecamatan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	13 Kecamatan
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Kemiskinan.	24. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	13 Kecamatan
Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.	5. Peningkatan Daya Saing	26. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan sosial masyarakat di perdesaan	07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	13 Kecamatan
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	13 Kecamatan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		25. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik	07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	13 Kecamatan
			<b>08 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
			<b>08.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.	5. Peningkatan Daya Saing	31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	08.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	08.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan		42. Meniadakan Konflik Sosial	08.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan			PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	sesuai dengan Kriteria yang berlaku	
		42. Meniadakan Konflik Sosial	08.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	08.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		42. Meniadakan Konflik Sosial	08.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



#### 4. 4. Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Kabupaten Landak dengan Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

N/A



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada Lampiran Tabel 5.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.



**Tabel 5. 1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Landak**



## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Landak dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2025.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Landak disajikan pada Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Landak Tahun 2024. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Sedangkan IKK Kabupaten Landak disajikan pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak Tahun 2024. Tabel ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

**Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Landak Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALIASASI KINERJA TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN KINERJA		KONDISI AKHIR TAHUN 2026
			2024	2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,51	89,30	89,90	90,02
2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B
3	Nilai SAKIP	B	B	B	B
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	0,50	0,54	0,55	0,57
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,56	65,86	65,96	66,06
6	Presentase Pertumbuhan Ekonomi	4,89	4,94	4,88-5,20	5,76
7	Indeks Desa Membangun	0,7135	0,751	0,7635	0,7760
8	Persentase Tingkat Kemiskinan	10,01	9,60	9,34	8,86
9	Indeks Pembangunan Manusia	67,17	68,01	68,80	68,86

Sumber : RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dan hasil perhitungan penyesuaian tahun 2025



**Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
<b>1</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>					
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	4,98	4,94	5,02	5,76
1.2	Laju Inflasi	%	1,16	3,56	3,42	3,11
1.3	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. (Juta)	29,21	33,77	34,14	35,76
1.4	Indeks Gini	Indeks	0.310	0.296	0.295	0.295
1.5	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	10,01	9,60	9,26	8,86
1.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,51	89,30	89,90	90,02
1.7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	4.86	6.23	6.48	6.72
1.8	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
1.9	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor	75,6	70,0	70,5	70,0
1.10	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	404,55	200,00	210,00	220,00
1.11	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	%	36,13	21,68	22,12	22,56
1.12	Angka Produksi Sektor Pertanian	Ton/Tahun	372.982	137.159	139.366	361.903
1.13	Rata-Rata Persentase Tingkat Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	%	34,45	34,80	35,00	40,00
1.14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,28	2,43	2,48	2,53
<b>2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>					
2.1	Pendidikan					
2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	67,17	68,01	68,80	68,86
2.1.2	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,26	99,42	99,42	99,66
2.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,15	7,16	7,16	7,17
2.2	Kesehatan					
2.2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,39	73,53	73,65	73,85
2.2.2	Persentase Balita Gizi Buruk (Sangat Kurus)	%	15,10	7,00	7,00	7,00
2.2.3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	22,40	12,00	12,00	12,00
2.3	Ketenagakerjaan					
2.3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	96,78	96,78	96,80	73,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
2.3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,22	1,70	1,60	3,09
<b>B. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Juta Rp	1.003,79	1.078,85	1.092,15	1.179,45
1.2	Nilai Tukar Petani	%	96,00	96,30	96,60	97,20
1.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	Juta Rp	462,85	487,6	498,15	559,4
1.4	Indeks Gini	Indeks	0.310	0.296	0.296	0.295
<b>2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>						
2.1	Perhubungan					
2.1.1	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Transportasi	%	44,44	66,66	77,77	90,00
2.1.2	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penumpang Angkutan	%	10,00	50,00	55,00	60,00
2.1.3	Persentase Ketersediaan Jumlah Dermaga, Tambatan Perahu	%	90,19	9411,00	96,07	100,00
2.2	Penataan Ruang					
2.2.1	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Ruang	%	40,00	60,00	68,00	98,00
<b>3 Fokus Iklim Berinvestasi</b>						
3.1	<b>Angka Kriminalitas yang Tertangani</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3.2	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Faktor Sumber Daya Manusia</b>						
4.1	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,26	99,42	99,5	99,66
4.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,15	7,16	7,17	7,17
4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,19	72,00	72,50	73,00
4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1.78	1,70	1,66	3,09
<b>C. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>1 Pendidikan Dasar</b>						
1.1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	12.44	12.45	12.46	12.49
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	7,12	7,15	7,16	7,17
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	32,75	32,99	33,10	33,10



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	35,20	35,92	36,20	36,20
1.4	Angka Partisipasi Kasar	%	100,03	100,04	100,05	100,06
1.4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100,03	100,02	100,02	100,01
1.4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100,02	100,06	100,08	100,10
1.5	Angka Partisipasi Murni	%	94,34	96,13	97,05	97,99
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,98	99,99	99,99	99,99
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,70	92,27	94,11	95,99
1.6	Angka Partisipasi Sekolah	%	99,35	99,53	95,66	96,83
1.6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	98,68	99,00	91,23	93,56
1.6.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100,02	100,06	100,08	100,1
1.7	Angka Putus Sekolah	%	0,09	0,08	0,07	0,05
1.7.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,13	0,12	0,10
1.7.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,04	0,03	0,02	0,00
1.8	Rasio guru terhadap murid	Rasio	34,03	34,28	34,35	34,61
1.8.1	Rasio guru terhadap murid SD/MI	Rasio	31,33	31,10	30,50	29,50
1.8.2	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	36,72	37,45	38,19	39,72
1.9	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	Rasio	20,08	20,03	19,98	19,88
1.9.1	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SD/MI	Rasio	20,20	20,15	20,10	20,00
1.9.2	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SMP/MTs	Rasio	19,95	19,90	19,85	19,75
1.10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Rasio	78,14	77,32	76,60	73,86
1.10.1	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	101,05	98,30	95,74	89,13
1.10.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio	55,23	56,33	57,45	58,59
1.11	Angka Kelulusan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	Angka Melanjutkan (AM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.13	Fasilitas Pendidikan	%	83,93	88,43	92,93	97,93
1.13.1	Ruang Kelas yang Kondisi Bangunannya Baik SD/MI	%	87,86	91,86	95,86	95,86
1.13.2	Ruang Kelas yang Kondisi Bangunannya Baik SMP/MTs	%	80,00	85,00	90,00	100,00
1.14	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,26	99,33	99,42	99,66



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
1.15	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	50,46	50,83	51,30	52,01
1.16.1	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Sekolah Dasar	%	21,92	22,35	22,8	23,72
1.16.2	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Sekolah Menengah	%	79,00	79,30	79,80	80,30
1.17	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik (Termasuk PPG Model Baru)	%	27,17	30,21	33,39	38,75
1.17.1	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik (Termasuk PPG Model Baru) PAUD	%	2,41	2,45	2,50	2,60
1.17.2	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik (Termasuk PPG Model Baru) Sekolah Dasar	%	38,27	43,27	48,27	53,87
1.17.3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik (Termasuk PPG Model Baru) Sekolah Menengah	%	40,84	44,92	49,41	59,78
1.18	Persentase Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak	%	8,92	13,13	19,80	25,85
1.18.1	Persentase Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak PAUD	%	0,34	0,35	0,36	0,38
1.18.2	Persentase Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak Sekolah Dasar	%	0,16	10,16	20,16	30,16
1.18.3	Persentase Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak Sekolah Menengah	%	26,25	28,87	38,87	47,02
1.19	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Menerima Penghargaan dan Perlindungan	%	21,67	25,29	29,21	37,05
1.19.1	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Menerima Penghargaan dan Perlindungan PAUD	%	3,94	4,01	4,09	4,25
1.19.2	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Menerima Penghargaan dan Perlindungan Sekolah Dasar	%	0,30	5,03	10,03	15,03
1.19.3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Menerima Penghargaan dan Perlindungan Sekolah Menengah	%	60,77	66,84	73,52	91,87
1.20	Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh BOS dan Melaporkan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.20.1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh BOS dan Melaporkan Tepat Waktu Sekolah Dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.20.2	Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh BOS dan Melaporkan Tepat Waktu Sekolah Menengah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.21	Jumlah Satuan Pendidikan Menjadi Sekolah Penggerak	Jumlah	10	10	10	10
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>					
2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,39	73,53	73,65	73,79
2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Orang	194	183	183	183
2.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	17	16	16	16
2.4	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Orang	21	16	16	16



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
2.5	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	22,40	13,00	12,00	12,00
2.7	Persentase Balita Gizi Buruk (Sangat Kurus)	%	15,10	7,30	7,00	7,00
2.8	Persentase Rumah Tangga yang Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	65,00	70,00	75,00	85,00
2.9	Persentase Desa/Kelurahan yang Mencapai UCI $\geq$ 90%	%	79,00	83,00	87,00	95,00
2.10	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%				
2.11	Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Orang	4	4	4	4
2.12	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)	%	85,00	86,00	87,00	90,00
2.13	Tingkat Prevalensi Penderita Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Orang	231	211	190	180
2.14	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Orang	31	29	27	22
2.15	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	%	75,00	78,00	80,00	85,00
2.16	Proporsi Kasus Tuberkolosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	85,00	85,00	86,00	87,00
2.17	Persentase Kasus Covid 19 yang Tertangani	%	90,00	90,00	90,00	90,00
2.18	Presentase Pencegahan Penyakit HIV/AIDS	%	60,00	63,00	65,00	70,00
2.19	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	%	50,00	52,00	53,00	55,00
2.20	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	%	55,00	55,00	56,00	58,00
2.21	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.22	Penderita Diare yang Ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.23	Angka Kejadian Malaria	Orang	< 1/1000 penduduk	< 1/1000 penduduk	< 1/1000 penduduk	< 1/1000 penduduk
2.24	Tingkat Kematian Akibat Malaria	Orang	1	0	0	0
2.25	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.26	Persentase Capaian Desa ODF (Open Defecation Free) / Persentase Kepemilikan Jamban	%	60,00	75,00	80,00	90,00
2.27	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) yang Mendapatkan Pengobatan	%	60,00	64,00	68,00	76,00
2.28	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pengobatan	%	20,00	30,00	40,00	60,00
2.29	Persentase Penderita ODGJ Ditangani Sesuai Standar	%	60,00	65,00	70,00	80,00
2.30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin		100,00	100,00	100,00	100,00
2.31	Persentase Jumlah Puskesmas yang Sudah Terakreditasi	%	87,50	100,00	100,00	100,00
2.32	Persentase 1 Rumah Sakit di Kabupaten Landak yang Terakreditasi Paripurna	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.33	Persentase Terlaksananya Pengadaan Obat, Sediaan Farmasi dan BMHP Sesuai dengan RKO		72,00	92,00	92,00	95,00
2.34	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Bayi	9	8	7	5
2.35	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per 1000 Balita	152	153	154	156



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
2.36	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	36	37	38	40
2.37	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0,25	0,30	0,30	0,35
2.38	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	4	6	8	12
2.39	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	87	90	92	95
2.40	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	97	98	99	100
2.41	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.42	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	31,36	34,36	36,36	41,36
2.43	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	85,00	90,00	93,00	97,00
2.44	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	99,20	99,40	99,60	100,00
2.45	Cakupan Pelayanan Nifas	%	91,52	92,50	93,00	95,00
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
3.1	Pekerjaan Umum					
3.1.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	62,00	64,00	65,00	65,00
3.1.2	Cakupan Kinerja Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	56,00	61,00	63,00	67,00
3.1.3	Persentase Rumah Tangga yang Terakses Air Minum	%	76,49	78,49	79,48	80,70
3.1.4	Persentase Rumah Tangga yang Terakses Pelayanan Air Limbah Domestik	%	57,05	61,55	63,05	65,50
3.1.5	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan	%	14,00	15,56	16,06	17,00
3.1.6	Persentase Volume Layanan Air untuk Meningkatkan Produktivitas Irigasi	%	50,00	2,05	2,05	58,20
3.1.7	Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kabupaten	%	0,49	0,57	0,61	0,65
3.1.8	Persentase Jalan Kondisi Mantab	%	46,43	47,93	48,43	48,93
3.1.9	Persentase Jembatan Kondisi Baik	%	58,24	59,74	60,24	60,74
3.1.10	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	20,00	25,00	25,00	100,00
3.1.11	Persentase Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	%	35,00	50,00	50,00	100,00
3.1.12	Persentase Jalan Lingkungan dan Jembatan yang Direhab dan Dibangun	%	73,45	79,45	82,45	85,50
3.1.13	Persentase Jumlah Perizinan Bangunan Gedung dan Bangunan atau Prasarana Bangunan yang Diterbitkan	%	N/A	10,00	15,00	22,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
3.1.14	Persentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	%	64,00	74,00	79,00	85,00
3.2	Penataan Ruang					
3.2.1	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Ruang	%	40,00	68,00	76,00	98,00
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Permukiman</b>					
4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	62,00	64,00	65,00	65,00
4.2	Cakupan Kinerja Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	56,00	61,00	63,00	67,00
4.3	Persentase Rumah Layak Huni yang Terdampak Bencana atau Terkena Relokasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4	Persentase Penyediaan Perumahan Layak Huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>					
<b>5.1</b>	<b>Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan PERDA, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat</b>	%	<b>95,00</b>	97,00	98,00	<b>99,00</b>
5.2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang
5.3	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk atau (Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas))	%	48,23	48,23	48,23	48,23
5.4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100,00	130,00	143,00	158,00
5.5	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	%	89,00	88,00	89,00	97,00
5.6	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15
5.7	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5.8	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang Ditangani	%	40,00	70,00	80,00	85,00
5.9	Persentase Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	22,73	70,00	80,00	85,00
5.10	Jumlah Poskamling	Jumlah	156	161	166	172
5.11	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per-Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	16,82	48,23	48,23	48,23
5.12	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Jumlah	240	282	311	343
5.13	Persentase Warga yang Memperoleh Pelayanan Penanganan Kebakaran, Evakuasi Korban dan Penyelamatan	%	95,00	100,00	100,00	100,00
5.14	Persentase Pembentukan Pokmas/Destana di Daerah Rawan Bencana	%	80,00	79,00	87,00	88,00
5.15	Persentase Jumlah Orang yang Dilatih/Diberikan Pengetahuan Kebencanaan	%	79,00	86,00	89,00	94,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
5.16	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	Jam	6	6	6	6
5.17	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Pasca Bencana	%	97,00	88,00	89,00	95,00
<b>6</b>	<b>Sosial</b>					
6.1	Persentase PPKS yang Tertangani	%	99,76	100,00	100,00	100,00
6.2	Validas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	69,80	80,00	85,00	90,00
6.3	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	52,81	85,50	85,80	89,00
6.4	Persentase PPKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	10,01	9,60	9,26	8,86
6.6	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yang Dilakukan Pemeliharaan	Buah	0	2	2	2
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>					
7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,78	1,70	1,50	3,09
7.2	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	42,50	42,90	43,10	43,30
7.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,19	72,00	72,50	73,00
7.4	Persentase Perusahaan Besar yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak (Memiliki PP/PKB)	%	59,60	60,00	60,20	60,40
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
8.1	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.3	Kategori Kabupaten / Kota Layak Anak	Kategori	Inisiasi	Pratama	Madya	Madya
8.4	Rasio KDRT	Per 1000 Perempuan	1,08	1,06	1,04	1,00
8.5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.6	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	0,014	0,013	0,012	0,100
8.7	Persentase OPD yang Melaksanakan PPRG dan PUG	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.8	Persentase Puspaga Aktif	%	N/A	50,00	55,00	65,00
8.9	Kapasitas Perangkat Daerah dalam Menyediakan Data Gender dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.10	Capaian Indikator KLA	%	50,00	60,00	61,00	63,00
<b>9</b>	<b>Pangan</b>					
9.1	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor	75,6	70,0	70,5	70,0



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
9.2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	404,55	200,00	210,00	220,00
<b>10</b>	<b>Pertanahan</b>					
10.1	Cakupan Kinerja Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	56,00	61,00	63,00	67,00
10.2	Persentase Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	3,40	65,00	70,00	83,20
<b>11</b>	<b>Lingkungan hidup</b>					
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,56	65,86	65,96	66,06
11.2	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11.4	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
11.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	53,00	53,30	53,40	53,50
11.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	95,03	95,33	95,53	95,53
11.7	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	32,62	32,92	33,02	33,12
11.8	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	47,00	60,00	65,00	70,00
11.9	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah	0	2	2	2
11.10	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
11.11	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	12321,67	13821,67	14571,67	15321,67
11.12	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	168265	183265	190765	198265
11.13	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	50,36	57,36	60,86	64,36
11.14	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	74,94	78,94	80,94	82,94
<b>12</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
12.1	Persentase Kepemilikan Data Kependudukan	%	57,01	58,48	59,00	59,67
12.2	Persentase Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	69,65	72,30	73,30	74,85
12.3	Persentase Surat Keterangan Kependudukan	%	59,00	62,00	63,00	64,00
12.4	Persentase Akta Pencatatan Sipil	%	6,82	71,80	74,10	79,85
12.5	Persentase Biodata Penduduk	%	0,38	0,40	0,41	0,42
12.6	Persentase Kartu Keluarga	%	99,00	99,20	99,30	99,40



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
<b>13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
13.1	Jumlah Desa Mandiri	Desa Mandiri	13	23	28	34
13.2	Persentase BUMDes Sehat	%	N/A	6	8	8
13.3	Persentase Tim Penggerak PKK Tingkat Desa Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00
13.4	Prosentase Penyusunan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES tepat waktu dan akuntabel	%	N/A	33,67	34,67	39,00
13.5	Persentase Karang Taruna Aktif	%	N/A	3,20	4,48	6,41
<b>14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
14.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,83	1,87	1,89	1,91
14.2	Unmeet Need KB	%	29,31	27,51	26,61	25,66
14.3	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,59	2,51	2,4	2,23
14.4	Rasio Akseptor KB	%	81,45	82,21	83,33	85
14.5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	81,45	82,21	83,33	85
14.6	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (ASFR 15-90)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	79,76	72,15	67,92	41,97
14.7	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	%	N/A	48,57	49,21	51,58
<b>15</b>	<b>Perhubungan</b>					
15.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah penumpang	26.817	45.798	48.088	50.492
15.2	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Transportasi	%	44,44	77,77	88,88	90,00
15.3	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penumpang Angkutan	%	10,00	55,00	55,00	60,00
15.4	Persentase Ketersediaan Jumlah Dermaga, Tambatan Perahu	%	90,19	96,07	98,03	100,00
15.5	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji	%	50,00	65,00	70,00	75,00
15.6	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Tersedia	%	65,00	85,00	90,00	100,00
15.7	Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	%	67,26	86,90	93,45	100,00
15.8	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Jumlah	1.539	1.874	1.968	2.066
15.9	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Jumlah	1	1	1	1
15.10	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Jumlah	6.714	7.323	7.689	8.073
15.11	Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun	Jumlah	N/A	37.568	39.446	41.418



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
15.12	Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Jumlah	37.710	41.133	42.844	44.555
15.13	Jumlah Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Jumlah	6.000	15.522	16.083	16.644
<b>16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
16.1	Jumlah SPBE yang Dibangun dan Dikembangkan untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah SPBE	67	73	75	77
16.2	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	14,29	42,86	57,14	71,43
16.3	Jumlah Website yang Dikelola dan Dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah Website	41	47	49	51
16.4	Persentase Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Layanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	%	40,10	50,00	55,00	60,00
16.6	Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	%	85,71	100,00	100,00	100,00
16.7	Predikat Penilaian SPBE	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik
16.8	Persentase Menurunnya Daerah/Wilayah yang Blank Spot	%	42,31	35,90	30,77	24,36
16.9	Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	2,63	52,63	92,10	100,00
16.10	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	83,00	87,00	89,00	92,00
<b>17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
17.1	Rasio Keanggotaan Koperasi	Rasio/%	N/A	8,50	10,50	12,56
17.2	Rasio Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rasio/%	N/A	34,85	36,85	38,85
<b>18</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
18.1	Nilai Investasi di Kabupaten	Milyar Rp	700,780	565,433	621,970	684,173
18.2	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah	1.832	1.905	1.943	1.982
<b>19</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
19.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	27,16	29,62	32,09	34,56



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
19.2	Jumlah Olahraga Rekreasi yang Dikembangkan	Jenis	1	2	3	3
19.3	Jumlah Pemuda yang Dibina	Orang	278	282	285	288
19.4	Prestasi Olahraga Pelajar yang Diperoleh	Cabor	0	1	2	6
19.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Tersedia	Unit	1	2	2	8
<b>20</b>	<b>Statistik</b>					
20.1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	100,00	100,00	100,00	100,00
20.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
20.3	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
20.4	Persentase Data Statistik yang Tersusun dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>21</b>	<b>Persandian</b>					
21.1	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	23,72	24,25	24,50	24,75
21.2	Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Dengan Baik	%	23,72	24,25	24,50	24,75
<b>22</b>	<b>Kebudayaan</b>					
22.1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	40	47	54	61
22.2	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	N/A	7	7	7
22.3	Jumlah Sanggar Seni Budaya yang Berprestasi	Jumlah	N/A	7	7	7
22.4	Jumlah Peserta yang Mengikuti Expo Budaya Seni Tari Dayak	Jumlah	327	331	333	335
22.5	Jumlah Peserta yang mengikuti Sastra Lisan (Singara/Cerita Rakyat)	Jumlah	30	40	45	50
22.6	Jumlah kesenian (Jonggan) Seni Dayak	Jumlah	15	19	21	23
22.7	Jumlah peserta yang mengikuti Sendra Tari Dayak	Jumlah	110	130	140	150
22.8	Jumlah Warisan Cagar Budaya (Benda ) yang Dilestarikan	Jumlah	30	40	45	50
22.9	Jumlah Warisan Cagar Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah	10	14	16	18
<b>23</b>	<b>Perpustakaan</b>					
23.1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	N/A	Rendah	Rendah	Rendah
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	N/A	1,7	2,0	2,2
23.3	Jumlah Tenaga Pengelola dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Dibina	Jumlah	N/A	28	32	36
23.4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah	N/A	2.500	2.700	3.000



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
23.5	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah	N/A	29.052	29.778	30.522
23.6	Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan	Jumlah	N/A	3	3	3
<b>24</b>	<b>Kearsipan</b>					
24.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kategori	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
24.2	Persentase Ketersediaan Arsip Daerah Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban	%	N/A	65,00	70,00	75,00
24.3	Persentase Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	%	N/A	40,00	50,00	60,00
24.4	Jumlah Unit Kearsipan yang Dibina	Jumlah	N/A	5	5	5
24.5	Jumlah Perangkat Daerah yang Diaudit	Jumlah	N/A	10	10	10
24.6	Jumlah Pengguna Layanan Akses Arsip Statis Terbuka	Jumlah	N/A	5	5	5
<b>25</b>	<b>Pariwisata</b>					
25.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	2,28	2,43	2,48	2,53
25.2	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	%	0	9	11	13
25.3	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (Orang)	Jumlah	59.977	62.000	62.500	63.000
25.4	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pelatihan/Bantuan	Jumlah	0	2	2	2
<b>26</b>	<b>Pertanian</b>					
26.1	Angka Produksi Sektor Pertanian	Ton/Tahun	372.982	137.159	139.366	361.903
26.2	Rata-Rata Persentase Tingkat Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	%	34,45	30,00	35,00	40,00
26.3	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	%	36,13	21,68	22,12	22,56
26.4	Produktivitas Padi	Kw/Ha	39,19	108.636,00	110.809,00	38,70
26.5	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	93,80	90,75	91,00	91,25
26.6	Nilai Tukar Petani	%	96,00	96,60	96,90	97,20
26.7	Produksi Jagung	Ton	41.936,25	23.541,31	23.776,72	24.014,49
26.8	Produksi Daging Ternak	Ton	6.206,95	5.612,25	5.436,85	5.545,58
26.9	Jumlah Kelembagaan Pertanian	Jumlah	3427	3594	3701	3807
26.10	Persentase perencanaan pembangunan perkebunan yang tercapai	%	50,00	0,70	0,80	0,90
26.11	Persentase data dan informasi pembangunan perkebunan Persentase yang akurat dan mutakhir	%	80,00	0,90	0,95	0,95
26.12	Peningkatan luasan pembangunan perkebunan	Ha	0,0	50,0	50,0	200,0
26.13	Jumlah Produktivitas Perkebunan Karet	Kg/Ha/Tahun	753,5	750,0	750,0	750,0



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
26.14	Jumlah Produktivitas Perkebunan kelapa sawit	Kg/Ha/Tahun	2430,2	2000,0	2200,0	2500,0
26.15	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kopi	Kg/Ha/Tahun	517,2	457,0	457,0	457,0
26.16	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kakao	Kg/Ha/Tahun	428,9	500,0	500,0	500,0
26.17	Jumlah Produktivitas Perkebunan Lada	Kg/Ha/Tahun	572	600,0	600,0	600,0
<b>27</b>	<b>Perdagangan</b>					
27.1	Nilai Transaksi Domestik	Rp	N/A	566.092.800	679.311.360	815.173.632
27.2	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Dikelola Dengan Baik	%	N/A	54,28	58,28	62,28
<b>28</b>	<b>Perindustrian</b>					
28.1	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	%	9,05	32,11	37,11	42,11
<b>29</b>	<b>Transmigrasi</b>					
29.1	Persentase Koordinasi Transmigrasi Lokal	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>30</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
30.1	Produksi Hasil Perikanan	Ton	1084,13	934,00	940,00	946,00
30.2	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	33,5	34,0	35,0	36,0
<b>31</b>	<b>Perencanaan</b>					
31.1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	%	19,90	21,50	22,00	22,50
31.2	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	%	15,50	17,50	18,00	18,50
31.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31.5	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31.6	Persentase Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat dan Mutakhir	%	68,00	90,00	100,00	100,00
31.7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra-PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00
31.8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja-PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00
31.9	Persentase Konsistensi Program RPJMD dan RKPD	%	99,73	100,00	100,00	100,00
31.10	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	95,41	95,00	95,00	95,00
31.11	Tingkat Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	%	70 (Data 2020)	65,00	70,00	75,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
31.12	Tingkat Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan Bidang Perkonomian dan Sumber Daya Alam	%	100 (Data 2020)	85,00	87,00	90,00
31.13	Tingkat Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	%	100 (Data 2020)	80,00	85,00	90,00
<b>32</b>	<b>Keuangan</b>					
32.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
32.2	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	21,78	32,26	33,86	35,87
32.3	Ketepatan Waktu Penyusunan Perda dan Perbup APBD serta Perda dan Perbup Perubahan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
32.4	Persentase Kesesuaian Penganggaran terhadap Perencanaan	%	133,00	100,00	100,00	100,00
32.5	Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Daerah	%	77,35	100,00	100,00	100,00
32.6	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
32.7	Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
32.8	Persentase Kesesuaian LK SKPD dan LK Konsolidasi dengan SAP dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya	%	N/A	100,00	100,00	100,00
32.9	Persentase Pengguna Barang yang Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00
32.10	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	%	76,56	100,00	100,00	100,00
32.11	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	%	92,53	100,00	100,00	100,00
<b>33</b>	<b>Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					
33.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	46,34	55,00	60,00	65,00
33.2	Persentase Tata Kelola Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	%	53,35	73,15	67,87	78,69
33.3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan	%	2,60	5,12	6,40	21,81
33.4	Persentase Pendidikan Lanjutan yang Memiliki Nilai Minimal Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00
33.5	Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Pegawai dengan Nilai Minimal Baik	%	80,00	81,00	82,00	83,00
33.6	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,15	0,46	0,41	0,36
33.7	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	%	84,37	86,00	87,00	88,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
33.8	Persentase Data ASN yang Dimuktahirkan	%	44,45	83,25	69,04	95,10
33.9	Persentase Regulasi Kepegawaian yang Diselesaikan Secara Tepat dan Akurat	%	9,09	27,27	27,27	100,00
<b>34</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
34.1	Persentase Hasil Litbang yang Diterapkan	%	10,00	13,00	14,00	15,00
34.2	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
<b>35</b>	<b>Pengawasan</b>					
35.1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	2	2	2	2
35.2	Level kapabilitas APIP	Level	2	2	2	2
35.3	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	%	14,18	16,00	16,50	17,00
35.4	Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan	%	82,75	73,00	77,00	80,00
35.5	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,15	0,46	0,41	0,36
35.6	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Selesai Ditindaklanjuti	%	97,00	82,00	84,00	85,00
35.7	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	%	68,50	65,00	70,00	75,00
35.8	Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti	%	N/A	100,00	100,00	100,00
35.9	Persentase Jumlah OPD yang Memenuhi Standar untuk Diusulkan Memperoleh Predikat WBK/WBBM	%	N/A	8,00	10,00	12,00
35.10	Persentase Pegawai yang Menyampaikan LHKASN	%	N/A	80,00	85,00	90,00
35.11	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	%	25,00	53,00	55,00	60,00
<b>36</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>					
36.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,51	89,30	89,90	90,02
36.2	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	%	8,81	10,5	11	11,5
36.3	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
36.4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B
36.5	Laju Inflasi (%)	%	1,16	3,56	3,42	3,11
36.6	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	(juta Rp.)	29,21	32,97	34,14	35,76
36.7	Indeks Gini	Rasio	0,206	0,206	0,205	0,205
36.8	Rata - Rata Nilai Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Baik	Sedang	Tinggi	Tinggi
36.9	Persentase Penataan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	%	95,00	100,00	100,00	100,00
36.10	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
36.11	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama (Januari-Maret)	%	0	0	0	0
36.12	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	%	15,21	11,00	10,00	8,00
36.13	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Rasio/%	47,17	60,00	65,00	70,00
36.14	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Sesuai Standar Pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
36.15	Persentase Pelayanan Pimpinan Daerah dan Tamu Pimpinan Sesuai Standar Pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
36.16	Persentase Jumlah Bantuan Hibah dan Sosial yang Disalurkan	%	95,00	98,03	98,04	98,05
36.17	Jumlah BUMD Yang Terfasilitasi	Jumlah	2	2	2	2
<b>37</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>					
37.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
37.2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
37.3	Terintegrasinya Program- Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
37.4	Jumlah Perda Inisiatif Yang Ditetapkan	Jumlah	4	4	4	4
37.5	Jumlah Rekomendasi Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Mitra Kerja	Jumlah	9	9	9	9

Sumber : RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dan hasil perhitungan penyesuaian tahun 2025



## BAB VII

### P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Landak Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari tahun ketiga RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Pembangunan pada Tahun 2025 memiliki tema atau fokus **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Landak Yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui penguatan fundamental ekonomi dan peningkatan daya saing”**. Perencanaan pembangunan tahun pertama ini diharapkan menjadi pijakan yang kokoh dalam mencapai target-target pembangunan.

Dokumen RKPD Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Landak khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten) maupun forum antar pelaku pembangunan.



Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Landak Tahun 2025 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap RKPD juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum dari pemerintah pusat yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap RKPD ini.


Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIA NUARTI, SH  
NIP. 19661128199402 2 001